

LAPORAN KINERJA 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan rencana aksi perjanjian kerja yang telah disahkan Kepala BPOM di Ambon. Penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mencapai target sasaran kinerja melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instan Pemerintah (SAKIP) sebagai dasar pembuatan laporan kinerja meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja.



Acuan penyusunan Laporan Kinerja BPOM di Ambon Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Laporan Kinerja BPOM di Ambon tahun 2022 tertuang perjanjian kinerja yang mengacu pada Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap target tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.



LAPORAN KINERJA

BADAN POM

Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 ini diharapkan akan memberikan informasi capaian terhadap rencana kinerja, dan sebagai upaya mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) guna upaya perbaikan berkesinambungan bagi perbaikan kinerja Balai POM di Ambon di masa mendatang.

Ambon, 02 Februari 2023

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt. MPPM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja tahun 2022 BPOM di Ambon disusun sebagai pertanggungjawaban pencapaian Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Renstra BPOM di Ambon Tahun 2020-2024, yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis yang terbagi menjadi 29 Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2022 ini terdapat 1 target indikator tambahan (Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik) serta 1 indikator (Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Ambon) yang tidak lagi menjadi target pengukuran. Nilai perspektif Sasaran Strategis total (NPSS total) BPOM di Ambon di tahun 2022 mendapat nilai 101.39% dengan kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI.

Berikut **capaian keberhasilan** sasaran strategis BPOM di Ambon di tahun 2022 :

Sasaran Strategis	NPS	Kriteria
1. Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	93,48 %	Belum Memenuhi Ekspetasi
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	95,15%	Belum Memenuhi Ekspetasi
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99,77%	Belum Memenuhi Ekspetasi
4. eningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di di lingkungan kerja BPOM di Ambon	107,35%	Memenuhi Ekspetasi



5. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkungan kerja BPOM di Ambon	99,57	Belum Memenuhi Ekspetasi
6. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	99,10	Belum Memenuhi Ekspetasi
7. Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	112,82%	Memenuhi Ekspetasi
8. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	102,43%	Memenuhi Ekspetasi
9. Mewujudkan SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang berkinerja optimal	100,52%	Memenuhi Ekspetasi
10. Melakukan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	113,72%	Memenuhi Ekspetasi
11. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melakukan "Pengelolaan keuangan secara Akuntabel	96,60	Belum Memenuhi Ekspetasi

Dari ke-11 sasaran strategis tersebut, terdapat 6 sasaran dengan capaian belum memenuhi ekspetasi. Persentase capaian target indikator kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2022 antara 85,35% sampai dengan 126,99%.

Indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki capaian terendah 85,35% (capaian 85,35%) dengan realisasi 73,40% karena masih banyak ditemukan peredaran obat dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK label penandaan). sedangkan capaian tertinggi pada

indikator "Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 126,99 % dengan realisasi 97,78%

Pada tahun 2022 BPOM di Ambon melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,18 (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM). Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Sedangkan perhitungan efisiensi anggaran per sasaran strategis secara keseluruhan sasaran strategis dinyatakan efisien yang disebabkan realisasi anggaran pada indikator tersebut selaras dengan pencapaian kinerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Maluku untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon didukung APBN sebesar Rp. 23.670.173.000,- . Namun mengalami revisi anggaran karena pengurangan dan penambahan belanja pegawai beberapa kali sehingga pagu DIPA menjadi Rp. 22.551.018.000,- dengan penyerapan sebesar Rp. 22.493.574.379,- atau 99,75%.

Ambon, 02 Februari 2023
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon



Hermanto, S.Si., Apt. MPPM

HIGHLIGHT

Selama Tahun 2022, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon meraih beberapa catatan keberhasilan dan penghargaan yang diantaranya adalah :

1. Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori SANGAT BAIK Tahun 2022.



2. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon turut membantu perkembangan dan pertumbuhan sektor UMKM dengan memfasilitasi pengurusan izin edar PIRT bagi UMKM Pangan gratis tanpa dipungut biaya apapun melalui program inovasi Pesta Kenari atau Pendampingan Penerbitan SPP-IRT bagi UMKM Pangan dalam Sehari.



- Perjanjian Kerjasama Antara BPOM Di Ambon dan KPID yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi, dan iklan obat dan makanan di Maluku.



- Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM Ambon jalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Ambon. Dalam perjanjian kerjasama ini, mengatur aspek pengawasan obat dan makanan di Kota Ambon, pendampingan pembinaan UMKM pangan serta edukasi obat dan makanan kepada masyarakat di Kota Ambon.



5. Penguatan Sinergitas Penta Heliks Obat Tradisional (OT) Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan *Antimicrobial Resistance* (AMR) yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon dengan menggandeng lintas sektor di lingkup Provinsi Maluku



6. Balai POM di Ambon menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sebagai wujud komitmen untuk mencapai predikat WBK.



7. Laboratorium Pengujian Balai POM di Ambon berhasil mempertahankan status Akreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 setelah proses audit Surveilans yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Oktober 2022 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)



8. Balai POM di Ambon pada tahun 2022 berhasil meraih peringkat ke-2 unit kerja dengan nilai pengawasan kearsipan untuk kategori unit kearsipan II (Balai Besar & Balai POM) dengan nilai 94,5.

PERINGKAT 5 TERTINGGI UPT BALAI BESAR DAN BALAI POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Usulan Badan POM	Nilai Final
1.	Balai Besar POM di Yogyakarta	96.45	96.45
2.	Balai POM di Ambon	94.5	94.50
3.	Balai Besar POM di Palangkaraya	94.32	94.32
4.	Balai Besar POM di Banda Aceh	94.08	94.08
5.	Balai Besar POM di Mataram	94.02	94.02

9. Balai POM di Ambon turut berpartisipasi dalam program Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Universitas Pattimura pada tanggal 10 Oktober – 10 Desember 2022



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	1
Ringkasan Eksekutif	3
Highlight	6
Daftar Isi	10
Daftar Tabel	11
Daftar Gambar	21
Daftar Lampiran	28
BAB I Pendahuluan	29
1.1 Latar Belakang	29
1.2 Gambaran Umum Organisasi	30
1.3 Struktur Organisasi	32
1.4 Isu Strategis	33
BAB II Perencanaan Kinerja	63
2.1 Rencana Strategis	63
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022	70
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2022	73
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022	77
2.5 Metode Pengukuran	81
BAB III Akuntabilitas Kinerja	84
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	84
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya.....	278
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	282
3.4 Pemanfaatan Laporan Kinerja	293
BAB IV Penutup	297
4.1 Kesimpulan	297
4.2 Saran	302
Lampiran	305

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	38
Tabel 2. Perubahan Arah Kebijakan Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon ..	67
Tabel 3. Perubahan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon 2020-2024	68
Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022	70
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon Tahun 2022	74
Tabel 6. Rencana Aksi Perjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022	77
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2022	86
Tabel 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Cluster 8	87
Tabel 9. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Ambon Tahun 2022	88
Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022	93
Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 BPOM Ambon	93
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	94
Tabel 13. Perbandingn Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional ...	94
Tabel 14. Data Sampel TMS 1 2022	95

Tabel 15.	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022	102
Tabel 16.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 BPOM Ambon	103
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	103
Tabel 18.	Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	104
Tabel 19.	Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022	107
Tabel 20.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 BPOM Ambon	107
Tabel 21.	Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	108
Tabel 22.	Perbandingn Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	109
Tabel 23.	Data Sampel TMS 2 2022	109
Tabel 24.	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022	116
Tabel 25.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon.....	117
Tabel 26.	Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	117
Tabel 27.	Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	118
Tabel 28.	Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022	122
Tabel 29.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 BPOM Ambon	122

Tabel 30.	Diagram Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2020-2022	123
Tabel 31.	Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	123
Tabel 32.	Sampel fortifikasi yang tidak memenuhi syarat	124
Tabel 33.	Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat	128
Tabel 34.	Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dengan Target Tahun 2022	128
Tabel 35.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2022 dengan Tahun 2021	129
Tabel 36.	Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Target renstra 2024	130
Tabel 37.	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara dan Target Nasional	130
Tabel 38.	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon berdasarkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku	131
Tabel 39.	Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022	135
Tabel 40.	Capaian Survey Index Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2022	135
Tabel 41.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon	136
Tabel 42.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon	137
Tabel 43.	Perbandingan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	137
Tabel 44.	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat	141
Tabel 45.	Target dan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022	142
Tabel 46.	Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya	142

Tabel 47.	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 terhadap Target Renstra 2020-2024	143
Tabel 48.	Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara dan Target Nasional	144
Tabel 49.	Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	149
Tabel 50.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM target dan realisasi tahun 2022	149
Tabel 51.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 dengan Tahun 2021	150
Tabel 52.	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024	150
Tabel 53.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	151
Tabel 54.	Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022	158
Tabel 55.	Perbandingan Realisasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon	159
Tabel 56.	Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	160
Tabel 57.	Perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional ...	160
Tabel 58.	Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022	163
Tabel 59.	Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon	163

Tabel 60.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	164
Tabel 61.	Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional ..	164
Tabel 62.	Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022	167
Tabel 63.	Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022 BPOM Ambon	167
Tabel 64.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon	168
Tabel 65.	Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	168
Tabel 66.	Hasil Penilaian Sertifikasi Tahun 2022	169
Tabel 67.	Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022	173
Tabel 68.	Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020	173
Tabel 69.	Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	174
Tabel 70.	Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan relisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target Nasional	175
Tabel 71.	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat	176
Tabel 72.	Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022	177
Tabel 73.	Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022, 2021 dan 2020	178

	Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	179
Tabel 74.		
	Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan relaisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target Nasional	179
Tabel 75.		
	Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	183
Tabel 76.		
	.Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022	183
Tabel 77.		
	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022 dengan Tahun 2021	184
Tabel 78.		
	Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024 ..	184
Tabel 79.		
	Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	185
Tabel 80.		
	Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	192
Tabel 81.		
	Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022 BPOM Ambon	193
Tabel 82.		
	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon	193
Tabel 83.		
	Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	194
Tabel 84.		
	Bobot Indikator Efektivitas KIE Obat dan Makanan	197
Tabel 85.		
	Interpretasi Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan	197
Tabel 86.		
	Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022	198
Tabel 87.		
	Perbandingan Indeks Efektivitas KIE BPOM di Ambon Tahun 2022 dengan Tahun 2020-2021	198
Tabel 88.		

Tabel 89.	Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Terhadap Target renstra 2020-2024	199
Tabel 90.	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Tingkat Nasional	199
Tabel 91.	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022	206
Tabel 92.	Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman Terhadap Target renstra 2020-2024	206
Tabel 93.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional	208
Tabel 94.	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022	212
Tabel 95.	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya	212
Tabel 96.	Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Terhadap Target renstra 2020-2024	213
Tabel 97.	Jumlah Desa Pangan Aman BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 8) dan Capaian Nasional Tahun 2022	214
Tabel 98.	Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah PPABK Tahun 2022	218
Tabel 99.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah PPABK Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	219
Tabel 100.	Perbandingan Realisasi Jumlah PPABK Terhadap Target renstra 2020-2024	219
Tabel 101.	Jumlah PPABK dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional Tahun 2022	220
Tabel 102.	Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	223

Tabel 103.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon	223
Tabel 104.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	224
Tabel 105.	Perbandingn realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain (KLastr 7) sejenis dan target nasional	224
Tabel 106.	Parameter uji kritis PUK dan timeline	225
Tabel 107.	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022	228
Tabel 108.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon	229
Tabel 109.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	229
Tabel 110.	Perbandingn realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	230
Tabel 111.	Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2022	234
Tabel 112.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun 2021	234
Tabel 113.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	235
Tabel 114.	Perbandingn realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain sejenis	236
Tabel 115.	Realisasi Indeks RB UPT dengan Target Tahun 2022	241
Tabel 116.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB UPT Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	241
Tabel 117.	Perbandingan Realisasi Capaian Indeks RB UPT Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024	242
Tabel 118.	Indeks RB UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	243
Tabel 119.	Kriteria Penilaian AKIP	246



Tabel 120.	Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2022	247
Tabel 121.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BPOM Ambon Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	247
Tabel 122.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	248
Tabel 123.	Perbandingn realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	249
Tabel 124.	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan Target Tahun 2022	255
Tabel 125.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	255
Tabel 126.	Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024 Indeks Profesionalitas ASN UPT di Wilayah Kerja BPOM di	256
Tabel 127.	Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	256
Tabel 128.	Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022	260
Tabel 129.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon	261
Tabel 130.	Perbandingan Realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	262
Tabel 131.	Perbandingn Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	262
Tabel 132.	Penilaian kemampuan laboratorium BPOM Ambon	263
Tabel 133.	Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan Target Tahun 2022	267

	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Indeks	
Tabel 134.	pengelolaan data dan informasi yang optimal Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	267
	Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Indeks pengelolaan	
Tabel 135.	data dan informasi yang optimal Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2024	268
	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di	
Tabel 136.	Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	269
	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon tahun	
Tabel 137.	2022	272
	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun	
Tabel 138.	2021 dan 2020 BPOM Ambon	273
	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target	
Tabel 139.	Renstra 2020-2024 BPOM Ambon	274
	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain	
Tabel 140.	sejenis dan target nasional	274
Tabel 141.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi APIP sebelumnya	276
Tabel 142.	Realisasi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2022	280
Tabel 143.	Tingkat Efisiensi	284
Tabel 144.	Tingkat efisiensi kinerja BPOM Ambon tahun 2022	284
	Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran	
Tabel 145.	Strategis	286
	Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja dari seluruh	
Tabel 146.	target indikator	291
Tabel 147.	Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi APIP sebelumnya	295
Tabel 148.	Realisasi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2022	299

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	32
Gambar 2.	Audiensi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan Pemerintah Daerah dan BI	35
Gambar 3.	Analisis SWOT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	36
Gambar 4.	Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	38
Gambar 5.	Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPNPN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dibandingkan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022	39
Gambar 6.	Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022 berdasarkan tingkat Pendidikan	39
Gambar 7.	Peta Provinsi Maluku	42
Gambar 8.	Bimbingan Teknis Internal Pengujian Mikrobiologi	44
Gambar 9.	Pelatihan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Bagi Petugas, Kolaborasi BPOM Ambon dan Unit Pusat BPOM	46
Gambar 10.	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian	47
Gambar 11.	Layanan Parkir yang Lapang, Sistem Keamanan Gate (Oleh Satpam dan CCTV) serta Sistem Parkir dengan Karcis Parkir pada Gate Masuk	48
Gambar 12.	Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas	49
Gambar 13.	Ketersediaan tempat duduk prioritas, kursi roda, parker, dan toilet untuk penyandang disabilitas	49
Gambar 14.	Pembayaran secara elektronik (mesin EDC atau mobile banking)	49
Gambar 15.	40' high performance dry block incubator	50
Gambar 16.	Kegiatan KIE Keamanan Pangan dan Higiene Sanitasi di lokasi KLB Desa Tungwatu Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru	51
Gambar 17.	Bimbingan Teknis Komunitas Desa Fatmite dan Leku Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan	52
Gambar 18.	Pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Pangan Negeri Passo	52
Gambar 19.	Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi	54
Gambar 20.	Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku	55



Gambar 21.	Percepatan Penerbitan Izin Edar Melalui Desk Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku ...	55
Gambar 22.	Pemeriksaan Sarana Layanan Kesehatan	56
Gambar 23.	B POM Ambon Tetap Kawal Keamanan Pangan Desa di Jazirah Leihitu Maluku Tengah	57
Gambar 24.	B POM Di Ambon Berikan Pelatihan Penanganan KLB Keracunan Pangan Untuk Petugas Kesehatan Di Kab. Aru	57
Gambar 25.	Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan, Iklan Dan Recall Di Kab. SBB	59
Gambar 26.	Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Nataru Di Tual Dan Maluku Tenggara	59
Gambar 27.	Kegiatan peninjauan Sarana Produksi UMKM	61
Gambar 28.	Kegiatan pendampingan pelaku usaha UMKM	61
Gambar 29.	Peta Strategi Level II Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	66
Gambar 30.	Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	81
Gambar 31.	Capaian Kinerja Balai POM Ambon 2022 pada aplikasi e-Performance	85
Gambar 32.	Grafik Capaian Sasaran Strategis B POM Ambon Tahun 2022	86
Gambar 33.	Diagram Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	93
Gambar 34.	Diagram Perbandingan Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	94
Gambar 35.	Diagram Sampel TMS 1 2022	95
Gambar 36.	Diagram Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	103
Gambar 37	Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	104
Gambar 38	Diagram Persentase obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	108
Gambar 39.	Perbandingan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	109
Gambar 40.	Diagram Data Sampel TMS 2 2022	110
Gambar 41.	Jumlah sampling bertarget 202(diluar fortifikasi)	115
Gambar 42.	Diagram Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	117
Gambar 43.	Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	118
Gambar 44.	Diagram Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2020-2022	123

Gambar 45.	Diagram Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	124
Gambar 46.	Diagram Sampel Fortifikasi yang Tidak Memenuhi Syarat	125
Gambar 47.	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2022 dengan Tahun 2020-2021	129
Gambar 48.	Diagram Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu ..	130
Gambar 49.	Diagram Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	136
Gambar 50.	Diagram Perbandingan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional	138
Gambar 51.	Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2022	143
Gambar 52.	KIE di Desa Tungwatu, Kec, Pulau-Pulau Aru, Kab. Kep. Aru	145
Gambar 53	Konferensi pers hasil pengawasan BPOM di Ambon	146
Gambar 54.	Talkshow Hasil Pengawasan di TVRI Maluku	146
Gambar 55.	Sosialisasi hasil pengawasan dan menerima masukan stakeholder dalam forum konsultasi public	147
Gambar 56.	Sosialisasi video edukasi dari inovasi Sagu Salempeng di akun youtube Balai POM di Ambon	147
Gambar 57	Informasi jenis dan alur layanan pada website	152
Gambar 58.	Informasi jenis dan alur layanan pada profil WA layanan public	153
Gambar 59.	Inovasi Hape Beta dan Lacak POM	154
Gambar 60.	Forum Konsultasi Publik BPOM di Ambon mengundang lintas sektor terkait pada tanggal 23 Juni 2022	154
Gambar 61.	Pelatihan Internal Service Excellence pada 11 Februari 2022	155
Gambar 62.	Ruang pelayanan publik yang dilengkapi dengan AC, wifi, snack, minuman gratis dan free charging	155
Gambar 63.	Penyebaran standing banner Cek KLIK ke kantor pelayanan PTSP Provinsi Maluku dan Ombudsman Perwakilan Maluku	156

Gambar 64	Diagram Perbandingan Presentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian tahun 2020 - 2022	159
Gambar 65.	Diagram Perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	160
Gambar 66.	Diagram perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian tahun 2022,2021 dan 2020	163
Gambar 67.	Diagram perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	165
Gambar 68.	Diagram Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	167
Gambar 69.	Diagram Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	169
Gambar 70.	Diagram Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020	174
Gambar 71.	Diagram Persentase capaian IKM Balai Kluster 7	175
Gambar 72.	Grafik Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	178
Gambar 73.	Diagram Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan relaisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target Nasional	180
Gambar 74.	Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022 dan 2020-2021	184
Gambar 75.	Diagram Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	185
Gambar 76.	Forum Konsultasi Publik	186
Gambar 77.	Pelaksanaan Inovasi Pesta Kenari di Kab. Buru	187
Gambar 78.	Ruang Pelayanan Publik	188
Gambar 79.	Sosialisasi Maklumat dan Standar Pelayanan melalui Media Luar Ruang	189

Gambar 80.	Pendistribusian informasi non elektronik berupa leaflet produk layanan, standar pelayanan publik BPOM di Ambon kepada stakeholder	189
Gambar 81.	Forum Konsultasi Publik Tahun 2022	190
Gambar 82.	Inovasi Hapr Beta dan Lacak POM	190
Gambar 83.	Diagram Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional.....	194
Gambar 84.	Tingkat efektivitas KIE BPOM di Ambon Tahun 2020-2022	199
Gambar 85.	Diagram Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Kluster 7	200
Gambar 86.	Keterlibatan Pramuka dalam kegiatan KIE BPOM di Ambon	201
Gambar 87.	Pelibatan media untuk menyebarkan informasi dalam bentuk konferensi pers	201
Gambar 88.	KIE bersama Dharma Wanita Kab. Buru	202
Gambar 89.	Tampilan Panorama Lain	202
Gambar 90.	KIE dalam bentuk Talkshow Televisi bersama lintas sektor terkait di TVRI Maluku	203
Gambar 91.	Kegiatan KIE bersama organisasi kemasyarakatan	203
Gambar 92.	Inovasi Sagu Salempeng yang dapat diakses melalui Kanal Youtube dan media sosial lainnya	204
Gambar 93.	KIE Keamanan Pangan di bulan Ramadhan Tahun 2022	204
Gambar 94.	Grafik Realisasi PJAS Aman BPOM di Ambon Tahun 2020-2022	207
Gambar 95.	Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional	208
Gambar 96.	Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam kesuksesan intervensi PJAS Aman tahun 2022	209



Gambar 97.	Advokasi program nasional di Kabupaten Buru	209
Gambar 98.	Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Buru Selatan	210
Gambar 99.	Monev Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	210
Gambar 100.	Audit kantin sekolah dalam rangka sertifikasi Keamanan pangan Sekolah	211
Gambar 101.	Grafik Realisasi Desa Pangan Aman Tahun 2020-2022	213
	
Gambar 102.	Grafik Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional Tahun 2022	214
Gambar 103.	Surat edaran Sekda Buru Selatan untuk tiap desa merencanakan kegiatan GKPD	215
Gambar 104.	Advokasi Terpadu Program Nasional di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022	216
Gambar 105.	Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Namsina (kiri) dan Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa Fatmite (kanan)	216
Gambar 106.	Intensifikasi pengawasan keamanan pangan Desa Namsina (kiri) dan fasilitasi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Desa Leku (kanan)	217
Gambar 107.	Capaian PPABK BPOM di Ambon Tahun 2020-2022	219
	
Gambar 108.	Tahapan kegiatan program PPABK 2022	221
Gambar 109.	Diagram Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Capaian Tahun 2020-2022	223
Gambar 110.	Diagram Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar perbandingan capaian tahun 2020-2022	229
Gambar 111.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada cluster 7	230
Gambar 112.	Diagram Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	235
Gambar 113.	Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Reformasi Birokrasi	240
Gambar 114.	Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Reformasi Birokrasi	240



Gambar 115.	Rincian Bobot Komponen Hasil	241
Gambar 116	Diagram perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya	248
Gambar 117.	Diagram Perbandingan Nilai AKIP tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	249
Gambar 118.	Diagram Indeks Profesionalitas ASN UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	257
Gambar 119.	Diagram Perbandingan Capaian tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	261
Gambar 120.	Diagram Perbandingan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	263
Gambar 121.	Diagram Perbandingan Capaian tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020	268
Gambar 122.	Diagram Indeks Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional	269
Gambar 123.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM Ambon Tahun 2022	272
Gambar 124.	Diagram perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya	273
Gambar 125	Diagram IKSS 29 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional	274

LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 (Awal)	305
Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022	311
Lampiran 3. Rencana Kinerja BPOM Ambon Tahun 2022	313
Lampiran 4. Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BPOM Ambon Tahun 2022	321
Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM Ambon Tahun 2022	322
Lampiran 6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BPOM Ambon Tahun 2022	324
Lampiran 7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2022	325
Lampiran 8. Perbandingan Kinerja BPOM Ambon dengan BPOM Jambi dan Target Nasional	326
Lampiran 9. Perbandingan Kinerja BPOM Ambon dengan BPOM Kupang dan BPOM Kendari	328
Lampiran 10. Ringkasan Perbandingan NPS Balai Sejenis	329
Lampiran 11. Nilai Kinerja Anggaran SATKER 2022	330
Lampiran 12. Capaian Nilai SKM	331
Lampiran 13. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Tahun 2022	331
Lampiran 14. Indeks Pelayanan Publik UPP UPT BPOM	332
Lampiran 15. Target dan Capaian Intervensi Kab/Kota dan Desa Tahun 2022	332
Lampiran 16. Hasil Penilaian Monitoring dan Keberlanjutan Desa Pangan Aman 2022	333



Lampiran 17.	Hasil Penilaian Pemenuhan Peralatan Pengujian sesuai Standar GLP 2022	334
Lampiran 18.	Perbandingan IP ASN Tahun 2021 dan Tahun 2022	335
Lampiran 19.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	336

LAPORAN KINERJA 2022



BAB I PENDAHULUAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI AMBON

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon sebagai UPT dari BPOM bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapan, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Maluku. Tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan yang melekat pada BPOM di Ambon sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan di Provinsi Maluku dalam hal perlindungan terhadap konsumen terkait obat dan makanan, baik di hulu maupun di hilir. Tupoksi tersebut sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir-butir berikut:

BUTIR	PRIORITAS PEMBANGUNAN
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan
2	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; serta
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Oleh karena itu, BPOM di Ambon sebagai lembaga pengawas Obat dan Makanan sangat penting untuk diperkuat. Baik dari sisi kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan sarana pendukung lainnya seperti laboratorium, sistem teknologi informasi dan lain sebagainya dalam rangka mendukung tugas tersebut.

Pembuatan laporan kinerja tahunan sangat penting untuk dibuat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, BPOM di Ambon merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai unit pelaksana teknis Badan POM yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapanik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, pangan dan bahan berbahaya.

Tugas

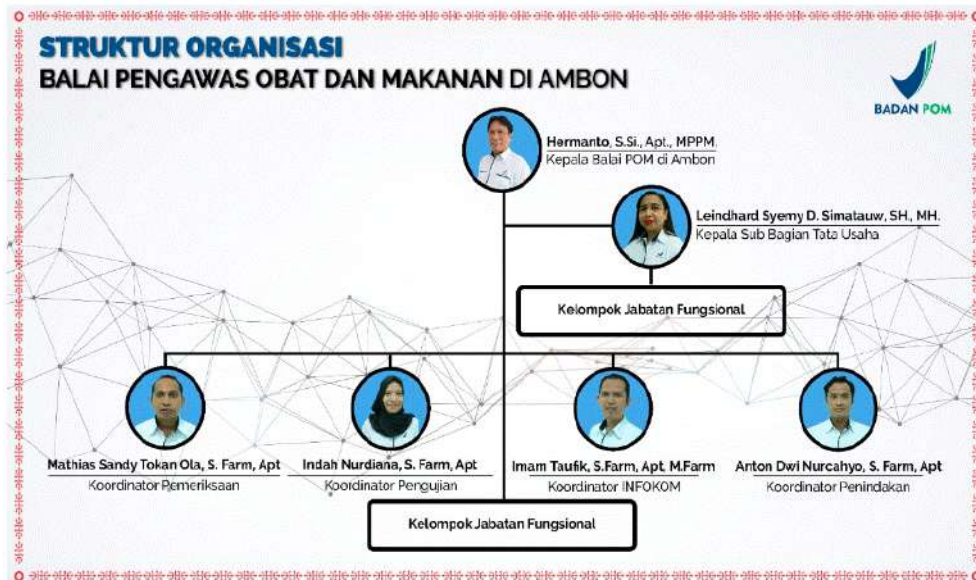
Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, BPOM di Ambon mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi dijabarkan sebagai berikut :

1. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
2. **Kelompok Substansi Pengujian** mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler.
3. **Kelompok Substansi Pemeriksaan** mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.
4. **Kelompok Substansi Penindakan** mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5. **Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
6. **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai bagian integral dari Badan POM dalam realitasnya mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan di bidang obat dan makanan kepada masyarakat/konsumen khususnya di wilayah Provinsi Maluku.

Produk-produk obat dan makanan yang merupakan kebutuhan dasar manusia, juga sekaligus memiliki resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar atau penggunaan produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan, maka fungsi pengawasan merupakan suatu keharusan agar produk-produk yang beredar tersebut mempunyai keamanan, mutu, dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai institusi Pengawas Obat dan Makanan di daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan terus meningkatkan kerjasama dengan para pemangku kepentingan di daerah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku dan mitra kerja lainnya guna meningkatnya kinerja dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon agar lebih dirasakan manfaat keberadaannya bagi masyarakat di Maluku khususnya dan Indonesia secara umum.

Dalam membangun kemitraan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Audiensi Kepala Balai POM di Ambon dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon tanggal 03 November 2022 terkait program “Pesta Kenari” (Penerbitan Ijin Edar PIRT)
- b. Audiensi Kepala Balai POM di Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan Ditreskrimsus Polda Maluku tanggal 28 Oktober 2022 terkait cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada sirup obat
- c. Talkshow TVRI tanggal 13 Desember 2022 Terkait Pengawasan Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru
- d. Konferensi Pers BPOM di Ambon, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan Kota Ambon tanggal 19 Desember 2022 Terkait Pengawasan Pangan Olahan Menjelang Hari Raya Natal 2022 Dan Tahun Baru 2022
- e. Audiensi Kepala Balai POM di Ambon dan BI tanggal 19 Oktober 2022 terkait rangka menjalin sinergisme antar Lembaga untuk memajukan dan meningkatkan kapasitas UMKM yang ada di Provinsi Maluku agar naik kelas dan mampu berdaya saing.





Gambar 2. Audiensi Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan Pemerintah Daerah dan BI

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Balai POM di Ambon. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 3 berikut :



Gambar 3. Analisis SWOT Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan SDM yang Profesional, berintegritas tinggi, kredibel, mau bekerja sama, inovatif dan responsif untuk menjaga Kepercayaan Publik
2. Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait agar tercipta komitmen dan sinergitas pengawasan full spectrum
3. Optimalisasi penggunaan fasilitas dan kemajuan teknologi untuk mengatasi permasalahan wilayah geografis Maluku yang susah dijangkau untuk pemerataan pengawasan

4. Optimalisasi kemajuan teknologi untuk pelayanan public
5. Optimalisasi pendampingan pada UMKM dalam meningkatkan daya saing produk
6. Modifikasi sistem pengawasan obat dan makanan dalam memasuki masa New Normal

1.4.2 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

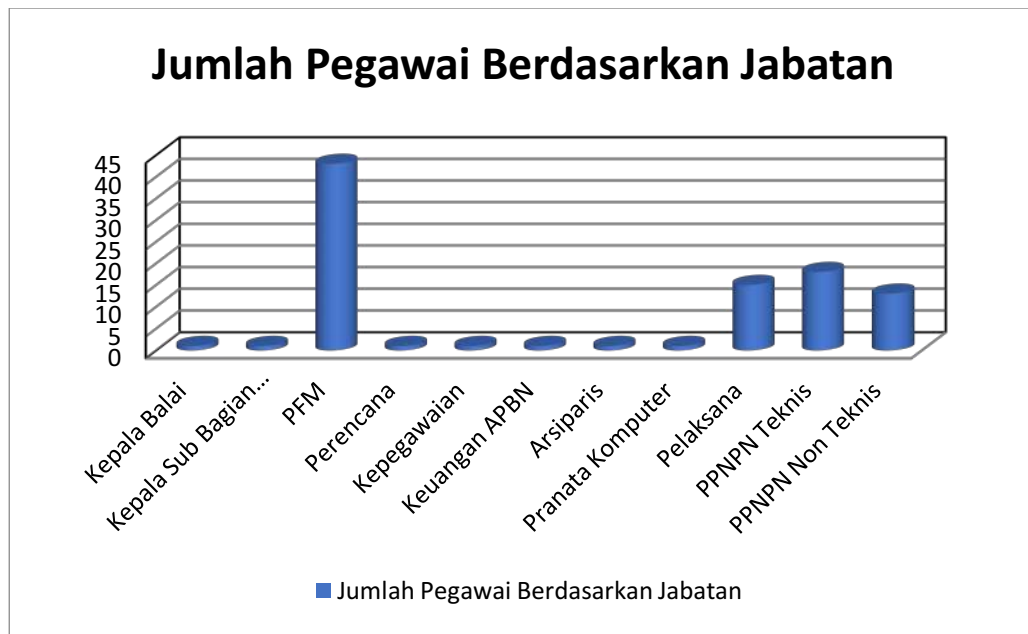
1.4.2.1 INTERNAL

1.4.2.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 30 September 2022 adalah sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sejumlah 9 (sembilan) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 32 (tiga puluh dua) Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) termasuk 4 (empat) pegawai yang menjadi Koordinator Kelompok Substansi yang menjabat sebagai PFM dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional tertentu, fungsional umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural sebanyak 22 (dua puluh dua) pegawai. Kemudian untk PPNPN, sebanyak 18 pegawai adalah PPNPN teknis dan sisanya 13 pegawai adalah PPNPN non-teknis. Berikut beberapa tabel data pegawai BPOM di Ambon pada tahun 2022 :

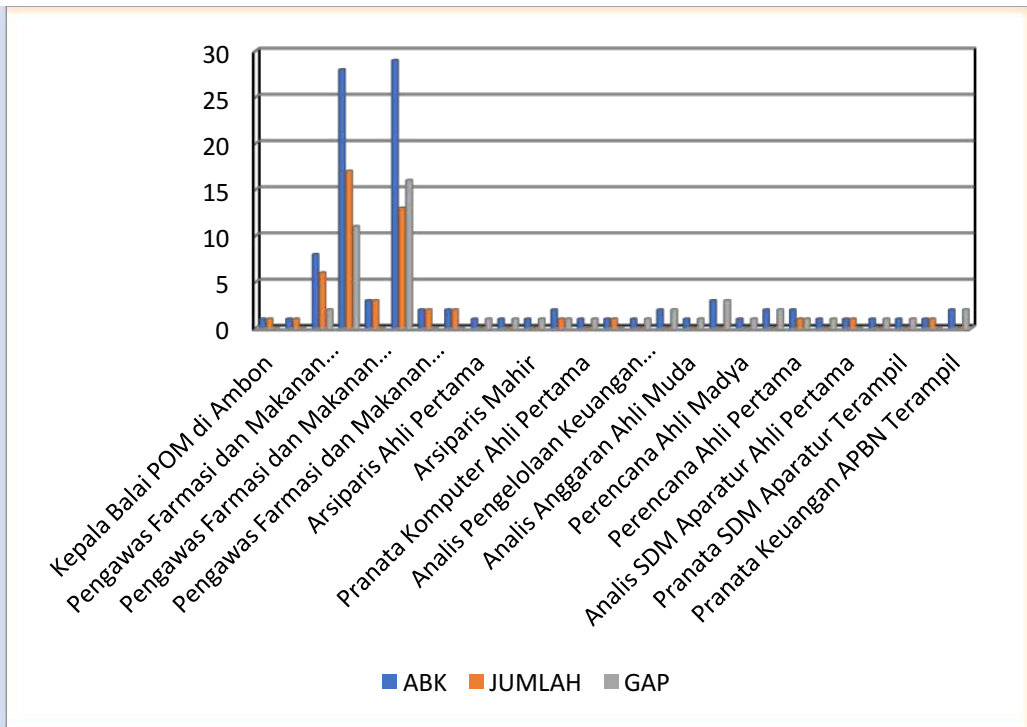
Tabel 1. Jumlah Pegawai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

NO	KATEGORI	JUMLAH PEGAWAI
1	PNS	56
2	CPNS	9
3	PPNPN	31
Total		96

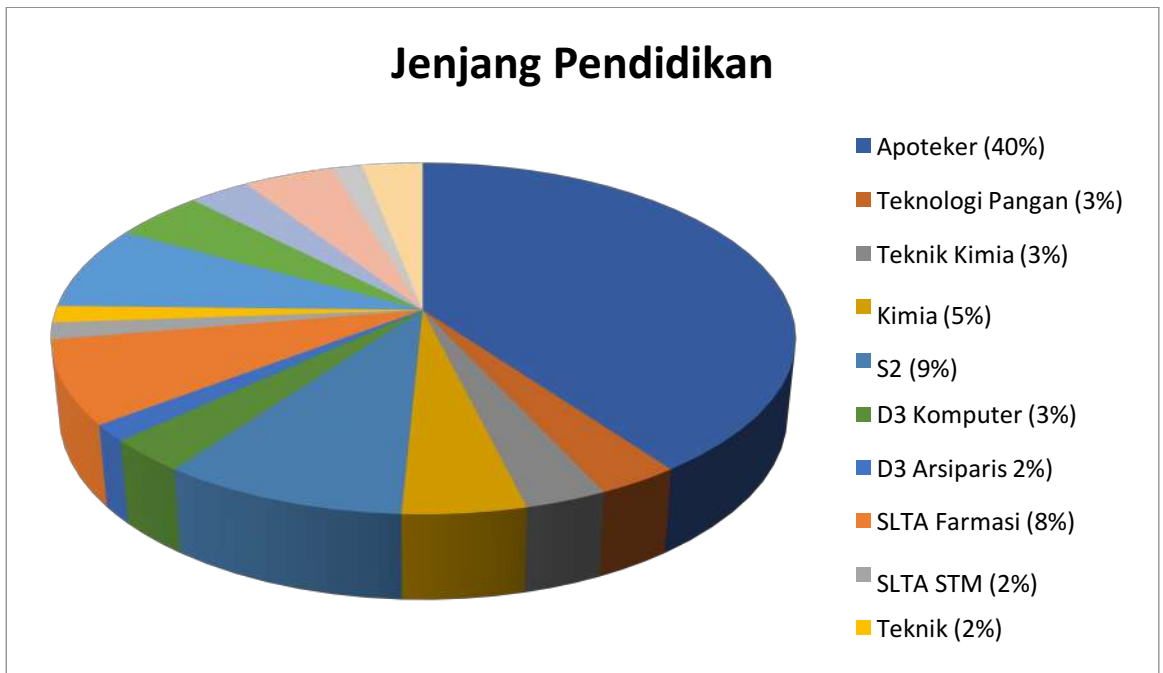


Gambar 4. Diagram Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 126 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 56 orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 9 Calon Pegawai Negeri Sipil dan 31 orang sebagai Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 30 orang guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.



Gambar 5. Jumlah seluruh SDM (PNS dan PPNPN) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dibandingkan Analisis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022



Gambar 6. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022 berdasarkan tingkat Pendidikan

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat pada tahun 2022 sebanyak 2 pegawai diberikan tugas untuk melakukan Tugas Belajar dan 2 pegawai Izin belajar.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development palnning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.4.2.1.2 Sumber Daya Lainnya

Luas lahan Balai POM di Ambon Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon seluas 4.450 m² dengan luas lantai Bangunan sebesar 2.457 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi. Pada tahun 2018 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam tahap perluasan bangunan Laboratorium Mikrobiologi seluas 690 m². Dalam mendukung upaya percepatan penanganan pengujian sampel spesimen Covid-19, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

melengkapi fasilitas laboratorium biomolekuler demi mendukung pengujian sampel spesimen Covid-19. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon. Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun system manajemen mutu berdasarkan Standar ISO 9001:2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.

1.4.2.1.3 Anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Tahun 2022 sebesar Rp22.551.018.000,- (Dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan belas ribu rupiah)

Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp22.493.574.379,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 99.75%.

1.4.2.2 EKSTERNAL

1.4.2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90 wilayah propinsi Maluku adalah lautan.



Gambar 7. Peta Provinsi Maluku

Provinsi Maluku terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.831.880 jiwa menurut proyeksi 2020.

Wilayah Kerja Balai POM di Ambon meliputi 9 kabupaten/kota:

- Kota Ambon
- Kota Tual
- Kabupaten Maluku Tengah
- Kabupaten Seram Bagian Barat
- Kabupaten Seram Bagian Timur
- Kabupaten Buru
- Kabupaten Buru Selatan
- Kabupaten. Maluku Tenggara
- Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

Pola transportasi yang digunakan ke semua kota/kabupaten di Provinsi Maluku adalah melalui transportasi darat, laut dan udara.

1.4.2.2 Sarana yang diawasi

Dalam rangka pengawasan obat dan makanan, selama triwulan IV tahun 2022 sarana produksi dan distribusi yang diawasi sejumlah 1042 sarana dengan rincian sarana produksi OMKA sebanyak 93, sarana distribusi OMKA termasuk sarana pelayanan kefarmasian sebanyak 949.

1.4.3 Pembahasan Isu Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Triwulan IV

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai POM di Ambon baik internal maupun eksternal, antara lain:

1.4.3.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

1.4.3.2 Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sejumlah 56 (lima puluh enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 (sepuluh) orang Calon Pegawai Negeri Sipil dan 31 Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang telah ditetapkan, jumlah SDM Balai POM di Ambon tersebut masing sangat kurang sejumlah 29 orang untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di Provinsi Maluku, mengingat jumlah ABK Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sejumlah 126 orang pada tahun 2022. Dengan tantangan pengawasan yang semakin kompleks Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon harus selalu melakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Selain itu, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis, serta

melakukan pengembangan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang, berbudaya kerja yang baik dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Dimana kegiatan pengembangan kompetensi yang dilakukan selama triwulan IV tahun 2022, sebagai berikut :

A. Bimtek Pengujian Mikrobiologi

Sebagai upaya peningkatan kompetensi personil laboratorium, BPOM di Ambon selenggarakan Bimtek internal dengan tema "Pengujian Mikrobiologi pada Sediaan Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik" pada tanggal 10-14 Oktober 2022 dan diikuti oleh 8 orang personil uji Laboratorium Mikrobiologi dan Biomolekuler bersama dengan Narasumber dari P3OMN Badan POM, Yus Hanggono Cahyaning Yudi, S.Pd, M.Sc



Gambar 8. Bimtek Internal Pengujian Mikrobiologi

B. Pelatihan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Bagi Petugas, Kolaborasi BPOM Ambon dan Unit Pusat BPOM RI

BPOM Ambon dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Ditwasdar PO) BPOM RI berkolaborasi menyelenggarakan Pelatihan Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB-KP) Bagi Petugas, secara hybrid bertempat di Ruang Pattimura BPOM Ambon dan melalui zoom, Senin-Selasa (28-29/11). Pelatihan KLB ini diselenggarakan oleh BPOM Ambon dalam merespon terjadinya 2 KLB-KP yang terjadi di Provinsi Maluku pada semester 2 tahun 2022. Untuk itu dibutuhkan peningkatan kompetensi bagi petugas Balai dan petugas Puskesmas serta Dinas Kesehatan dalam

merespon dan menangani secara tepat dan cepat kasus KLB yang terjadi di wilayah Maluku. Pelatihan KLB-KP ini juga untuk mengakomodir kompetensi petugas sebagaimana yang diamanahkan dalam regulasi yaitu UU Pangan No 18 tahun 2012, PP Keamanan Pangan No 86 Tahun 2019 serta Permenkes KLB Keracunan Pangan No 2 tahun 2013. Pelatihan ini diikuti oleh 60 orang peserta baik yang hadir secara luring maupun daring yang terdiri dari petugas BPOM Ambon, Dinas Kesehatan Kota Ambon, Puskesmas Nania Kota Ambon, BBPOM Palembang, BBPOM Semarang, BBPOM Pekanbaru, Loka POM Banyumas, Loka POM Tanimbar serta Loka POM Indragiri Hulu. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini diisi oleh materi yang disampaikan oleh narasumber ahli di bidangnya. Terdapat 5 materi yang dipaparkan, yaitu Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Indonesia oleh Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yaitu Ibu Dra Ratna Irawati Apt MKes, Step by Step Investigasi KLB-KP oleh Dr Citra Indriani MPH dari Departemen Biostatistik Epidemiologi dan Kesehatan Populasi FK-KMK UGM, Teknik Advokasi Pemerintah Daerah dalam Rangka Koordinasi Penanggulangan KLB-KP oleh Dasep Wahidin SSi Apt MSc PhD, Tata Cara Pengambilan Contoh dan Pengujian Oleh Fatatai SFarm Apt MAB, serta Aplikasi Spimker dan Pelaporan oleh Prita Dwi Lasnita Sitanggang STP.



Gambar 9. Pelatihan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan Bagi Petugas, Kolaborasi BPOM Ambon dan Unit Pusat BPOM RI

C. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian

Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian yang merupakan salah satu sub menu kegiatan pembinaan dan pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap pemenuhan standar dan persyaratan Yang penadanaannya bersumber dari BOK DAK NF POM TA 2022. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini seluruh penanggungjawab fasilitas kefarmasian diharapkan semakin meningkat kompetensinya dan bertanggungjawab dalam pengelolaan ONPP dan OOT, serta memahami isu – isu terkini terkait obat dan dapat bertindak sebagai agen dalam menginformasikan hal-hal yang benar kepada masyarakat.



Gambar 10. Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Fasilitas Kefarmasian

1.4.3.3 Infrastruktur dan Fasilitas

Pembangunan Infrastruktur sangat penting untuk menghadapi persaingan di masa mendatang. Infrastruktur bukan hanya bangunan fisik, tetapi meliputi juga jaringan komunikasi, informasi, etika kerja dll. Dalam berupa bangunan fisik, pembangunan tempat pelayanan publik sangatlah penting karena akan menciptakan kenyamanan bagi publik dalam memperoleh pelayanan, dan kepuasan dari pelayanan publik dapat tercapai dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Gedung Layanan Publik belum terselesaikan sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Etika kerja sangat mempengaruhi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga proses terciptanya pengawasan yang baik terhadap obat dan makanan. Peningkatan fasilitas laboratorium juga sangat penting di era yang akan datang, dikarenakan semakin meningkatnya kemampuan mereka yang menyalahgunakan kemajuan teknologi untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak negatif bagi masyarakat lainnya.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah meningkatkan kualitas layanan publik dengan melakukan pembenahan ruang pelayanan publik. Pembenahan ini berpedoman dengan prinsip layanan publik yang transparan dan nyaman termasuk bagi konsumen penyandang disabilitas.



Gambar 11. Layanan Parkir yang Lapang, Sistem Keamanan Gate (Oleh Satpam dan CCTV) serta Sistem Parkir dengan Karcis Parkir pada Gate Masuk



Gambar 12. Layanan 5S, Ruang Tunggu yang nyaman dengan berbagai fasilitas



Gambar 13. Ketersediaan tempat duduk prioritas, kursi roda, parker, dan toilet untuk penyandang disabilitas



Gambar 14. Pembayaran secara elektronik (mesin EDC atau mobile banking)

Selain penyelenggaraan *Good Governance*, Balai POM di Ambon juga selalu mengutamakan aspek Pelayanan Prima (*Service Excellent*) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Balai POM di Ambon harus mampu menjawab ekspektasi dan kepercayaan masyarakat Maluku, yang begitu besar terhadap kehadiran Balai POM di Ambon untuk menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di Maluku.

BPOM Ambon juga melakukan pengadaan Peralatan Laboratorium untuk memenuhi Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.



Gambar 15. 40' high performance dry block incubator

1.4.3.3 Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Dikatakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, Kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 pertama kehidupan (HPK), Stunting menjadi masalah serius yang perlu ditangani bersama. Provinsi Maluku BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa

pangan aman) dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Beberapa upaya yang telah dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam mengatasi generasi Stunting selama triwulan IV tahun 2022, adalah sebagai berikut :

A. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon melaksanakan kegiatan IE Keamanan Pangan dan Higiene Sanitasi di lokasi KLB Desa Tungwatu Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru



Gambar 16. Kegiatan KIE Keamanan Pangan dan Higiene Sanitasi di lokasi KLB Desa Tungwatu Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru

B. Bimbingan Teknis Komunitas Desa Fatmite dan Leku Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menangani permasalahan keamanan pangan di desanya



Gambar 17. Bimbingan Teknis Komunitas Desa Fatmite dan Leku Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan

C. Pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Pangan Negeri Passo untuk terus mengawal keamanan pangan di desa adalah melalui rencana aksi keamanan pangan desa tahun 2022 yang kemudian dituangkan dalam RAB anggaran dana desa.



Gambar 18. Pelaksanaan Rencana Aksi Keamanan Pangan Negeri Passo

1.4.3.4 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (IV) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah

meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat.

Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre - market melalui sertifikasi CPOB dan post - market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Beberapa upaya yang dilakukan guna perbaikan berkesinambungan pengelolaan Obat JKN adalah :

- a) Pengadaan sistem kendali inventori obat berbasis web
- b) Perkembangan sistem *e-Katalog* : Multi winner dan Multiyear
- c) *e - Purchasing* oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi.

Sepanjang triwulan IV tahun 2022 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah berkomitmen dan melaksanakan kegiatan pengawasan obat dan makanan untuk mendukung Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional, seperti :

A. Pemeriksaan sarana distribusi pangan di Provinsi Maluku secara rutin



Gambar 19. Kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi

B. Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Ma



Gambar 20. Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku

C. Percepatan Penerbitan Izin Edar Melalui Desk Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku



Gambar 21. Percepatan Penerbitan Izin Edar Melalui Desk Registrasi Pangan Olahan Bagi Pelaku Usaha di Provinsi Maluku

D. Pemeriksaan sarana pelayanan Kesehatan daerah



Gambar 22. Pemeriksaan Sarana Layanan Kesehatan

1.4.3.5 Kerjasama dalam hal Pengawasan

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah yang berfungsi mengawasi beredarnya obat dan makanan, mempunyai tugas yang tidak mudah. Tak hanya luasnya wilayah Indonesia, maraknya kejahatan cyber obat dan makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 juga menjadi tantangan yang harus dihadapi Badan POM. Badan POM terus berbenah, termasuk membenahi Sumber Daya Manusia (SDM) dari segi kuantitas maupun kualitas. Kompetensi SDM Badan POM harus terus ditingkatkan untuk menjaga Indonesia terhindar dari Obat dan Makanan yang berbahaya.

Pengawasan Obat dan Makanan memerlukan kerjasama dan keterlibatan dari berbagai pihak (multisektoral) sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan serta Permendagri 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

Balai POM di Ambon juga tak henti melakukan kerja sama dengan *stakeholder* terkait untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu mengkonsumsi obat dan makanan yang memenuhi standar.

- a. BPOM Ambon Tetap Kawal Keamanan Pangan Desa di Jazirah Leihitu Maluku Tengah



Gambar 23. BPOM Ambon Tetap Kawal Keamanan Pangan Desa di Jazirah Leihitu Maluku Tengah

- b. BPOM Di Ambon Berikan Pelatihan Penanganan KLB Keracunan Pangan Untuk Petugas Kesehatan Di Kab. Aru



Gambar 24. BPOM Di Ambon Berikan Pelatihan Penanganan KLB Keracunan Pangan Untuk Petugas Kesehatan Di Kab. Aru

1.4.3.6 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0 Dalam salah satu studinya, the *World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (fusion) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam platform.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya ketersediaan tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat.

Untuk menghadapi perubahan gaya hidup masyarakat, menanggapi perkembangan teknologi yang bisa mengancam keamanan obat dan pangan man, maka sepanjang tahun 2021 BPOM di Ambon melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi :

A. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan, Iklan Dan Recall Di Kab.



Gambar 25. Intensifikasi Pengawasan Pangan Olahan, Iklan Dan Recall Di Kab. SBB

B. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Nataru Di Tual Dan Maluku Tenggara



Gambar 26. Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Nataru Di Tual Dan Maluku Tenggara

1.4.3.7 Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan/pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 57.895.721 dari jumlah total industri 57.900.787 atau sebanyak 99,99 .

Sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJPN 2005-2025 (UU No. 17/2007) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kesenjangan. Dalam mencapai sasaran ini telah teridentifikasi kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang berperan yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Badan Standarisasi Nasional, Badan Ekonomi kreatif, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan , Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Badan POM telah menginisiasi dan menandatangani *MoU* dan PKS dengan beberapa K/L dan Ormas, perlu ditindaklanjuti dengan rencana aksi program/kegiatan yang menysasar pada UMKM. Balai Pengawas Obat dan

Makanan di Ambon sepanjang tahun 2022 telah melakukan kegiatan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM, yaitu :

- A. Sebagai salah satu sektor pendukung ekonomi kerakyatan, UMKM Pangan perlu didorong untuk mendaftarkan izin edar produknya dengan begitu masyarakat atau calon konsumen akan semakin yakin dengan produk tersebut. BPOM di Ambon fasilitasi izin edar PIRT bagi UMKM Pangan gratis tanpa dipungut biaya apapun melalui program inovasi Pesta Kenari atau Pendampingan Penerbitan SPP-IRT bagi UMKM Pangan dalam Sehari.



Gambar 27. Kegiatan peninjauan Sarana Produksi UMKM

- B. Petugas Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon melakukan pendampingan pelaku usaha terkait dokumen dan alur yang dilakukan untuk registrasi izin edar produk Obat Tradisional.



Gambar 28. Kegiatan pendampingan pelaku usaha UMKM

1.4.3.8 Keadaan Wilayah Geografis Provinsi Maluku

Provinsi maluku merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang wilayahnya 90 adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan. Dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau. Maluku sendiri terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota.

Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan Pengawasan terhadap Obat dan Makanan sangat penting, karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi peluang mudahnya pelanggaran-pelangggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan.

1.4.3.9 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan bimtek tenaga kefarmasian, KIE dan pengujian. Sepanjang tahun Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah berkomitmen dan melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

- A. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian produk pangan (uji pihak ketiga)
- B. Mendukung Sosialisasi dan bimtek pelaksanaan program DAK NF (implementasi juknis) regional timur yg dilaksanakan oleh pusat di Ambon untuk menu pangan, maupun secara daring untuk menu obat dan obat tradisional.
- C. Memberikan konsultasi pelaksanaan Bimbingan Teknis peningkatan kompetensi petugas pengelola obat pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (menyiapkan materi dan sebagai narasumber) pada beberapa kabupaten / kota
- D. Memberikan konsultasi pelaksanaan sosialisasi/bimtek bagi pelaku usaha IRTP (menyiapkan materi dan sebagai narasumber) pada beberapa kabupaten / kota
- E. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan PKP dan DFI dgn berkoordinasi dgn BAPELKES setempat sebagai pelaksana pelatihan

- F. Monev oleh pimpinan secara langsung pada beberapa kabupaten / kota dan monev melalui *SMARTPOM* (verifikasi laporan kegiatan DAK)

LAPORAN KINERJA 2022



BAB II PERENCANAAN

BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI AMBON

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

VISI DAN MISI BADAN POM

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek :

Aman	:	Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
Bermutu	:	Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
Berdaya saing	:	Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

BPOM telah menetapkan misi BPOM 2020-2024 yaitu :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

TUJUAN

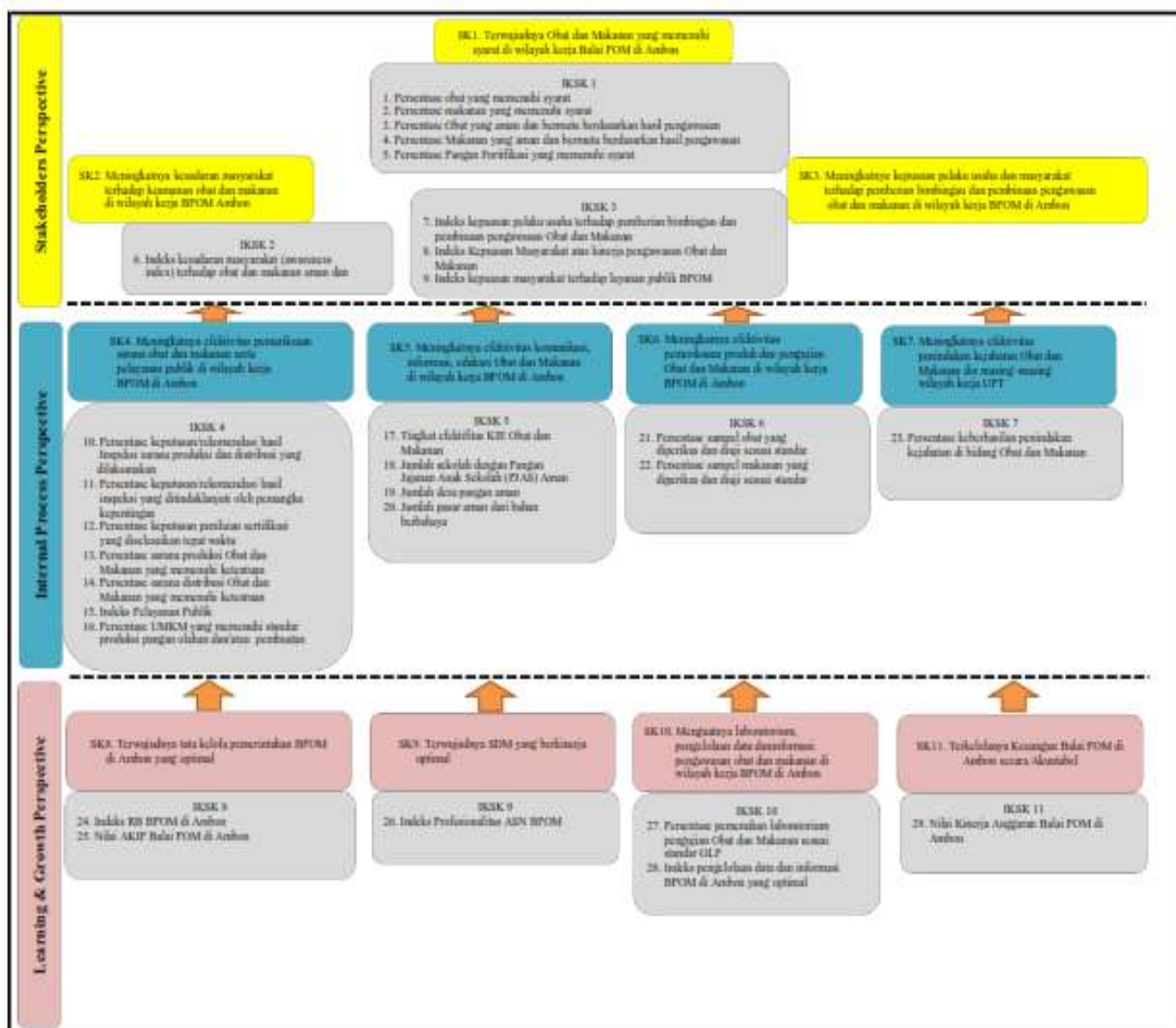
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, selaras dengan tujuan BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai POM Ambon dalam kurun waktu 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi berikut:



Gambar 29. Peta Strategis Level II Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon

ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 2. Perubahan Arah Kebijakan Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon

ARAH KEBIJAKAN (SEMULA)	ARAH KEBIJAKAN (MENJADI)
1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	2. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan post market Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.	4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	4. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
5. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.	6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan

7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan

6. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan

STRATEGI BALAI POM DI AMBON

Terdapat beberapa penyesuaian terhadap Strategi Balai POM di Ambon, antara lain:

- a. Penambahan strategi patrol siber sebagai tindak lanjut terhadap terbitnya Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM dimana terdapat Unit Kerja baru yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang siber Obat dan Makanan.
- b. Melakukan re-grouping strategi sesuai dengan fungsinya. Selain itu, juga dilakukan perubahan tata urutan strategi BPOM sesuai dengan perubahan tata urutan Arah Kebijakan BPOM.

Secara rinci, perubahan Strategi Balai POM di Ambon Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3. Perubahan Strategi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon 2020-2024

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risikotermasuk regulasi, perluasancakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana, prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.	2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing	3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

Strategi (Semula)	Strategi (Menjadi)
4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.	4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.	5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.	6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.	7. Penguatan Pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.	8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
	9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022

Dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon No. HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022. Untuk

mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra 2020-2024 dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2022.

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.55
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96.00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Ambon	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71.58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon	96.00
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98.00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00
		Indeks Pelayanan publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56.00
		Jumlah desa pangan aman	18.00
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6.00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78.00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Balai POM di Ambon yang optimal	Indeks RB di Balai POM di Ambon	86,00
		Nilai AKIP di Balai POM di Ambon	77,40
NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET

9	Terwujudnya SDM di Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Ambon	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75.00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan di Balai POM di Ambon secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Ambon	93,00

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon sebagai unit kerja Eselon III wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 telah ditetapkan Dokumen Perjanjian Kinerja pada tanggal 16 Desember 2021 yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp 24.482.165.000,- (Dua puluh empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah). Namun pada pertengahan tahun terjadi refocusing anggaran yang tersedia menjadi sebesar **Rp. 23.670.173.000,-** (Dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah). Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon ditetapkan pada 16 Desember 2021. Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan Ambon Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.55
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.00
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96.00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60
		8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71.58
		9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96.00
	Sasaran Strategis	Indikator	Target

No				
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,45
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	77.00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,40
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56
		19	Jumlah desa pangan aman	18
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78.00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	86,00
		25	Nilai AKIP UPT	77,40
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75.00
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang digambarkan pada Peta Strategis Level II Balai POM secara umum tidak mengalami perubahan pada Sasaran Strategis, **namun dilakukan penyesuaian target kinerja IKU** dengan menggunakan baseline baru tahun 2020 serta adanya penambahan 2 IKU baru yakni **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat dan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**. Di tahun 2022 IKU Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT tidak dihitung capaiannya; namun IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dihitung capaiannya. Dari 29 (Dua Puluh Sembilan) IKU Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon secara umum target meningkat. Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon selalu dimonitoring setiap triwulan untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 2022

Dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja (PK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022, maka dibuat Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 yang memuat target capaian secara triwulan yang disertai dengan jumlah anggaran yang tersedia. Berikut Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tahun 2022 :

Tabel 6. Rencana Aksi Perjian Kinerja (RAPK) Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Ambon
tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	(RUPIAH)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.55	86.55	86.55	86.55	24.326.259
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91.00	91.00	91.00	91.00	170.023.333
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86.00	86.00	86.00	86.00	122.800.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88.00	88.00	88.00	88.00	163.900.000
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96.00	96.00	96.00	96.00	71.140.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				80.00	122.800.000

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				71.58	182.444.667
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon				96.00	8.100.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98.00	98.00	98.00	98.00	341.235.333
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66.00	66.00	66.00	66.00	171.154.667
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98.00	98.00	98.00	98.00	117.465.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.00	72.00	72.00	72.00	138.290.920
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00	76.00	76.00	76.00	603.985.673
		Indeks Pelayanan Publik				4.45	16.408.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan	77.00	77.00	77.00	77.00	346.493.040

		dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik					
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.40	95.40	95.40	95.40	59.320.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	12	28	40	56	691.166.000
		Jumlah desa pangan aman	4	8	14	18	648.636.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	3	5	6	381.728.667
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	30.00	60.00	85.00	100	205.710.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	28.00	55.00	85.00	100	508.388.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12.00	25.00	50.00	78.00	94.590.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Balai POM di Ambon yang optimal	Indeks RB di Balai POM di Ambon				86.00	387.776.000
		Nilai AKIP di Balai POM di Ambon				77.40	71.919.000

9	Terwujudnya SDM di Balai POM di Ambon yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN di Balai POM di Ambon				82.75	4.870.960.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				75.00	181.366.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25	2.25	2.25	2.25	11.381.741.000
11	Terkelolanya Keuangan di Balai POM di Ambon secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran di Balai POM di Ambon	14.00	37.50	65.50	93.00	118.424.000
Total							22,551,018,000

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan

target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BPOM di Ambon selalu di-monitoring dan dievaluasi setiap bulan melalui rapat internal serta aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi e-performance untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap bulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap bulan pada tahun 2022 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

2.5 Metode Pengukuran

Metode pengukuran dalam perhitungan pencapaian indikator kinerja didasarkan atas definisi operasional yang tertuang dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Gambar 30. Kriteria penilaian capaian kinerja

Penetapan ini bertujuan untuk :

- Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
- Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :



Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam

rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BPOM di Ambon Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 orang penanggungjawab data di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang disahkan oleh SK Kepala BPOM
2. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BPOM di Ambon
3. Penanggung jawab data di setiap bidang menginput data kinerja pada data base online (<https://sites.google.com/view/bpomambon2020/>) secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai
4. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SMART DJA, monev Tepra, monev Bappenas dan setiap triwulan pada aplikasi eperformance.
5. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui system informasi melalui pemanfaatan aplikasi e-performance yang telah dikembangkan dengan menggunakan Balance Score Card (BSC) serta pengukuran kinerja secara cascading dari level eselon 3 hingga eselon 4 untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward dan punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya
6. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.



LAPORAN KINERJA 2022



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI AMBON

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan *Balanced Score Card*. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan terlebih dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Indikator positif/polarisasi *maximize* (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Sebaliknya, indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Unit Kerja : BPOM di Ambon
 Nama Pejabat : Hermanto, S.Si., Apt., MPPM
 Jabatan : Kepala Balai POM di Ambon

IUPSS : 101,39 %
 Pagu : Rp. 22.551,046,000.00
 Realisasi Anggaran : Rp. 22.493,374,379.00
 Realisasi Anggaran (%) : 99,73%

Stakeholder (96,13 %)



Internal Process (103,89 %)



Learning & Growth (103,04 %)

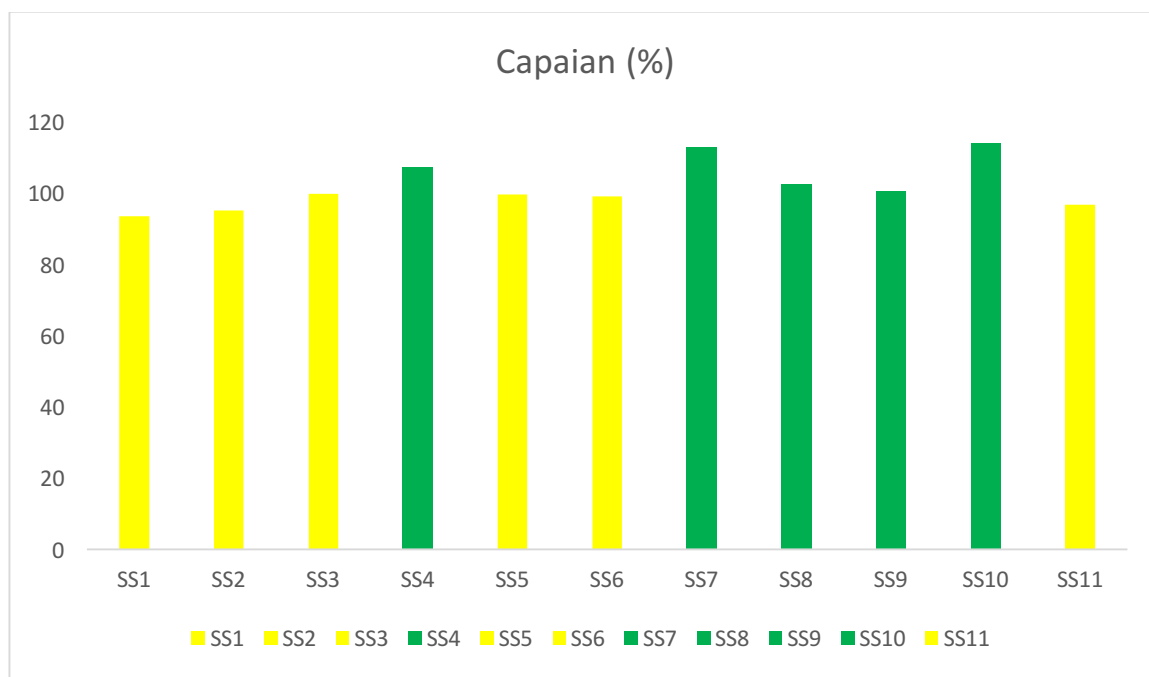


Gambar 31. Capaian Kinerja Balai POM Ambon 2022 pada aplikasi e-Performance

Capaian indikator kinerja/ indikator kinerja utama tersebut merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Balai POM di Ambon. Secara keseluruhan capaian dari total 11 sasaran strategis yang terbagi menjadi 29 indikator kinerja yang juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana capaiannya sasaran strategis 6 masuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan 5 masuk dalam kriteria memenuhi ekspektasi.

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis Balai POM di Ambon Tahun 2022

Kode SS	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Kriteria
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	93.48	Belum Memenuhi Ekspetasi
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	95.15	Belum Memenuhi Ekspetasi
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon	99.77	Belum Memenuhi Ekspetasi
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	107.35	Memenuhi Ekspetasi
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99.57	Belum Memenuhi Ekspetasi
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99.10	Belum Memenuhi Ekspetasi
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	112.82	Memenuhi Ekspetasi
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	102.43	Memenuhi Ekspetasi
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	100.52	Memenuhi Ekspetasi
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	113.72	Memenuhi Ekspetasi
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	96.60	Belum Memenuhi Ekspetasi



Gambar 32. Grafik Capaian Sasaran Strategis BPOM Ambon Tahun 2022

Dari Gambar Grafik atas, dapat disimpulkan bahwa capaian tertinggi berada pada Sasaran Strategis 10, yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon dan terendah Sasaran Strategis ke 1, yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon.

Bila dibandingkan pencapaian kinerja dengan balai lain dalam *Cluster 7*, yaitu BPOM Batam, Gorontalo dan Jambi maka diperoleh seperti tabel berikut.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Cluster 7

Kode SS	Sasaran Strategis	Capaian (%)			
		Ambon	Jambi	Gorontalo	Batam
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	93.48	103.90	103.33	92.71
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	95.15	99.44	98.96	105.52
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon	99.77	105.79	112.23	102.63
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	107.35	108.22	103.67	104.33

	makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon				
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99.57	99.75	99.23	100.39
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99.10	100.00	100	98.60
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	112.82	105.90	136.59	113.70
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	102.43	102.61	105.55	104.28
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	100.52	99.62	96.23	99.98
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	113.72	99.80	106.98	104.08
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	96.60	98.89	100.26	97.89
NPS TOTAL		101.39	102.25	105.66	102.03

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BPOM di Ambon berhasil mencapai 5 sasaran strategis, BPOM di Jambi berhasil mencapai 6 sasaran strategis, BPOM di Gorontalo berhasil mencapai 8 sasaran strategis dan BPOM di Batam berhasil mencapai 7 sasaran strategis. Sesuai perhitungan NPS total diperoleh bahwa NPS tertinggi diraih oleh BPOM di Gorontalo, sedangkan NPS terendah dialami oleh BPOM di Ambon.

Analisis capaian kinerja BPOM di Ambon dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah renstra, membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain 1 kluster, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja, analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal, Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 telah diperjanjikan 11 Sasaran Strategis dan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 9. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPOM Ambon Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	2022				KRITERIA	
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN PENYESUAIAN (%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	Persentase obat yang memenuhi syarat	%	86.55	81.89	94.61	94.61	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	%	91.00	84.96	93.36	93.36	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	86.00	73.40	85.35	85.35	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	88.00	86.67	98.48	98.48	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	%	96.00	91.76	95.59	95.59	Belum Memenuhi Ekspetasi
Capaian SS1					93.48	93.48		
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks	80.00	76.12	95.15	95.15	Belum Memenuhi Ekspetasi
Capaian SS2					95.15	95.15		
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan	Indeks	89.60	92.87	103.65	103.65	Memenuhi Ekspetasi
		Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	71.58	71.15	99.40	99.40	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public BPOM	Indeks	96.00	92.41	96.26	96.26	Belum Memenuhi Ekspetasi
Capaian SS3					99.77	99.77		

SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	Persentase keputusan/rekomen dari hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	98.00	100.00	102.04	102.04	Memenuhi Ekspetas
		Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	66.00	74.55	112.95	112.95	Memenuhi Ekspetas
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	98.00	100.00	102.04	102.04	Memenuhi Ekspetas
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	72.00	78.49	109.02	109.02	Memenuhi Ekspetas
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	76.00	76.01	100.01	100.01	Memenuhi Ekspetas
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.45	4.38	98.43	98.43	Belum Memenuhi Ekspetasi
				Persentase UMKM yang memenuhi standard produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	%	77.00	97.78	126.99
Capaian SS4						107.35	107.35	
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	Nilai	95.40	93.76	98.28	98.28	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	56	56	100.00	100.00	Memenuhi Ekspetas
		Jumlah desa pangan aman	Desa	18	18	100.00	100.00	Memenuhi Ekspetas
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pasar	6	6	100.00	100.00	Memenuhi Ekspetas
Capaian SS5						99.57	99.57	
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100.00	98.19	98.19	98.19	Belum Memenuhi Ekspetasi
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00	Memenuhi Ekspetasi
Capaian SS6						99.10	99.10	



SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	78.00	88.00	112.82	112.82	Memenuhi Ekspetas
Capaian SS7						112.82	112.82	
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	Indeks RB BPOM di Ambon	Indeks	86.00	90.72	105.49	105.49	Memenuhi Ekspetas
		Nilai AKIP Balai POM di Ambon	Nilai	77.40	76.92	99.38	99.38	Belum Memenuhi Ekspetasi
Capaian SS8						102.43	102.43	
SS9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon	Indeks	82.75	83.18	100.52	100.52	Memenuhi Ekspetas
Capaian SS9						100.52	100.52	
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	75.00	78.92	105.23	105.23	Memenuhi Ekspetas
		Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal	Indeks	2.25	2.75	122.22	122.22	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian SS10						113.72	113.72	
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	Nilai	93.00	89.84	96.60	96.60	Belum Memenuhi Ekspetasi
Capaian SS11						96.60	96.60	
NPS TOTAL						101.39	101.39	

Berdasarkan 29 (dua puluh Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, tercapai 14 indikator dengan kategori **Memenuhi Ekspektasi**, 13 indikator dengan kategori **Belum Memenuhi Ekspektasi**, dan 2 indikator dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Kriteria Memenuhi Ekspektasi ini menunjukkan bahwa target tahun 2022 sudah tercapai.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing – masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPOM Ambon, sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat dengan NPS 93.48% (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis I pada tahun 2022 diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Menurut Perpres No. 80 tahun 2017, Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon dapat diketahui dari capaian obat yang memenuhi syarat di Provinsi Maluku, maka dari itu dilakukan sampling dan pengujian.

Metode sampling acak dilakukan untuk mengetahui persentase obat yang memenuhi syarat. Sampling Acak adalah metode penarikan sampel dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih atau terambil. Hal ini dilakukan agar memenuhi keterwakilan terhadap produk yang beredar, sehingga diketahui proporsi produk yang tidak memenuhi syarat. Metode pengambilan sampel obat secara acak/random dilakukan berdasarkan kaidah statistik.

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling yang terbagi atas dua kriteria yaitu obat Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Kriteria Obat TMS, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan dan kesimpulan sampel obat sebagai berikut

- 1) dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan

pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

- 2) Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.
- 3) Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian,
- 4) Apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. J
- 5) Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.
- c. Sampel Obat mencakup sampel balai

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Realisasi persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel acak obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik) yang dilakukan oleh BPOM Ambon. Dimana total sampel obat kategori random/acak yang memenuhi syarat adalah 859 sampel dari total 1049 sampel yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022. Sehingga capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 94,61 %** dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

Tabel 10. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55	86,55	86,55	86,55	86,55	60,32	71,95	79,87	81,89	94,61	Belum memenuhi ekspektasi

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan dari 77,85 % menjadi 66,47 % sehingga nilai capaian

pun menjadi turun dari 91,27% menjadi 77,93% dengan kriteria cukup. Persentase realisasi dan capaian obat di tahun 2022 meningkat menjadi 81,89 % dan capaian 94,61% tetapi kriteria belum mencapai ekspektasi karena standar memenuhi ekspektasi adalah 100%.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020, 2021, dan 2022 BPOM di Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55%	81,89%	94,61%	85,30%	66,47%	77,93%	85,30%	77,85%	91,27%



Gambar 33. Diagram Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022 THD RENSTRA
Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55%	81,89%	94,61%	92,25%	81,89%	88,78%

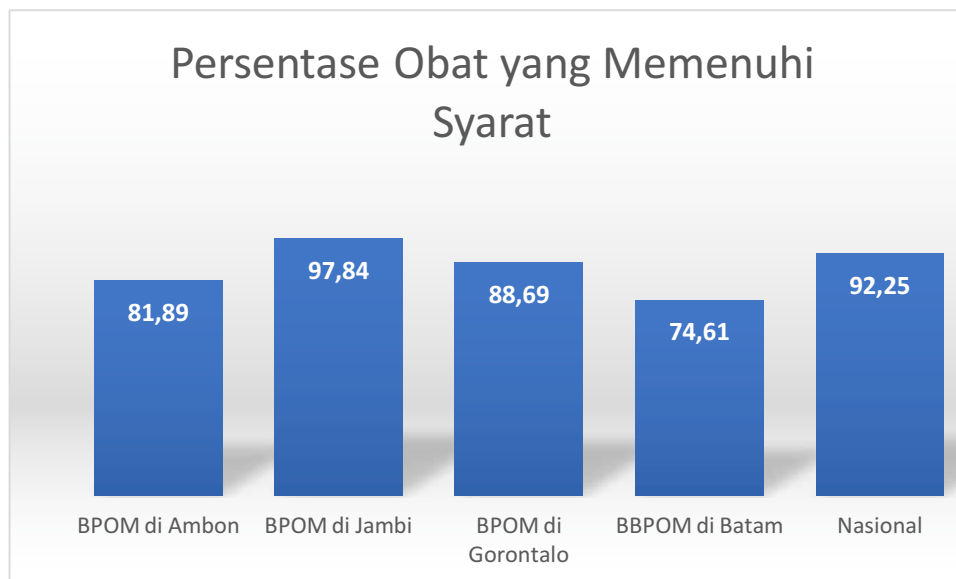
Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, namun capaian yang diperoleh sudah meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 73,45. Namun masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Jika dibandingkan dengan Balai se-cluster, Realisasi Balai POM di Ambon diatas BPOM di Batam, tertinggi ditempati oleh BPOM di Jambi diikuti oleh BPOM di Gorontalo.

Tabel 13. Perbandingan Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase Obat yang memenuhi syarat	81.89	97.84	88.69	74.61
Target Nasional	92.25			



Gambar 34. Diagram Perbandingan Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

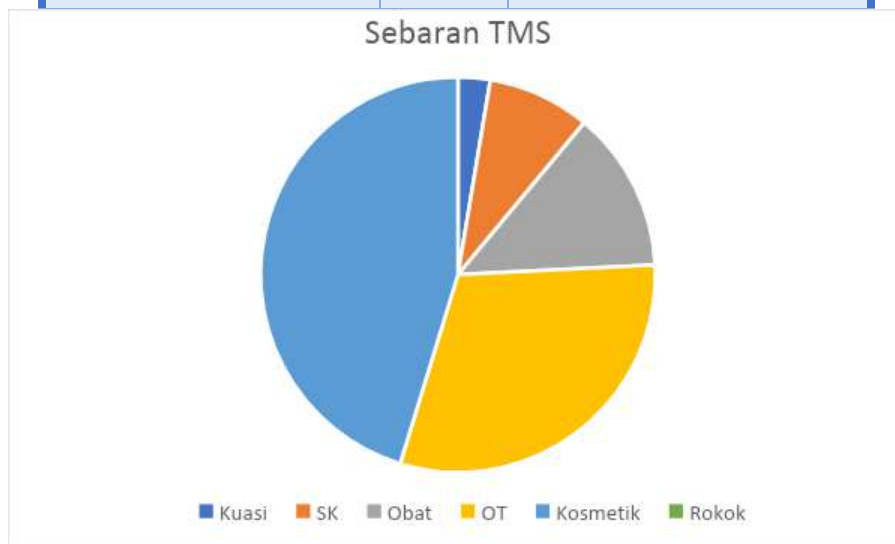
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 1049 sampel dengan rincian 859 sampel memenuhi syarat dan 190 sampel tidak memenuhi syarat. Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat BPOM di Ambon 81,89% dimana target 86,55%, sehingga diperoleh capaian 94,61% dengan kategori belum

memenuhi . Namun capaian tahun 2022 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian dua tahun sebelumnya.

Tabel 14. Data Sampel TMS 1 2022

KOMODITI	JUMLAH	KETERANGAN
Kuasi	5	Penandaan
SK	16	Penandaan
Obat	25	2 (Mutu, 23 (Penandaan)
OT	58	4 (Mutu, 54 (Penandaan)
Kosmetik	86	1 (Mutu,85 (Penandaan)
Rokok		
Total	190	



Gambar 35. Diagram Sampel TMS 1 2022

Adapun penyebab kenaikan capaian kinerja pada indikator ini adalah :

- Sebanyak 190 (18,11) sample disimpulkan TMS. Urutan TMS komoditi terbanyak adalah kosmetik (86 Sampel) , OT (58 Sampel) , Obat (25 Sampel), Suplemen Kesehatan (16 Sampel) dan Kuasi (5 Sample). Tingginya angka TMS untuk sampel kosmetik sebanding dengan dari 18,11 % sampel obat TMS, 8,02 persen merupakan sampel kosmetik. 96,32% TMS dikarenakan TMK Penandaan dan hanya 3,68% merupakan TMS Mutu.
- Keluarnya surat nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022, perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik , dimana sebelum surat tersebut terbit penandaan kosmetik hanya dibagi dua yaitu MK dan TMK, setelah surat ini terbit untuk kategori TMK dibagi 2 yaitu TMK Minor dan TMK Mayor. Jika ditemukan evaluasi penandaan dengan kategori TMK Minor

maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah MK . Sebagian besar evaluasi penandaan sepanjang Januari sampai dengan Mei 2022 TMK disebabkan tidak mencantumkan 2D Barcode, dan hanya sedikit yang terkait pencantuman Halal dan sepanjang tahun 2022, hanya satu sampel kosmetik yang TMS Mutu berupa positif Merah K3. Sehingga setelah pemberlakuan surat ini hanya beberapa sampel kosmetik yang TMK Penandaan. Pencantuman 2D Barcode sebagai TMK Minor telah melalui kajian terkait evaluasi penandaan 2D barcode, pada obat dan makanan.

- Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha dan konsumen terhadap persyaratan pelabelan obat dan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan cara produksi Obat/OT/SK/Kosmetik yang baik

Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah :

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk obat yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi obat khususnya UMKM terkait pemenuhan cara produksi Obat/OT/SK/Kosmetik yang baik, melalui desk CAPA secara online dan offline.
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (website bpom www.bpomambon.com, facebook : [Balai POM di Ambon](#), Instagram : [@balaipomambon](#)) dan media massa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan wartawan. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE secara daring ataupun luring.
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.

- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)/dilarang beredar/ Tidak Memenuhi Syarat.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan yang diadakan Badan POM maupun pelatihan mandiri melalui webinar.
- Meningkatkan sarana pendukung pengujian berupa metode dengan cara terus melakukan monitoring terhadap ketersediaan baku, reagensia, dan penunjang lainnya. Serta terus memonitor kondisi alat dengan cara mengganti alat yang sudah optimal, maintenance alat, kalibrasi, pengecekan antara bahkan dengan membeli alat yang termutakhir saat ini.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk Obat TMK label telah dilaporkan kepada kedeputian I dan II setiap bulannya telah ditindaklanjuti, Pelaporan Evaluasi Penandaan ke Kedeputian II telah dikaji dengan keluarnya surat T.PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022 dan penerapan TMK Minor (tentang 2D Barcode) yang disimpulkan menjadi MK untuk evaluasi penandaannya.
- Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi tentang cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.
- Penyebaran Informasi kepada konsumen terkait pentingnya “CEK KLIK” pada saat membeli produk obat.
- Pemeriksaan dan pembinaan kepada sarana distribusi lebih diperketat dan ditingkatkan dalam pemenuhan ketentuan pemerintah . Hal dilakukan agar pelaku usaha selalu selektif memilih produk yang akan didistribusikan dan menjaga kualitas produk agar tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai menyeleksi terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.
- Pelaksanaan KIE tentang produk Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Ambon (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur,

pameran, talk show di televisi/radio, dan penyuluhan agar diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk tersebut.

- Pemilihan duta kosmetik sebagai bentuk sarana penyebaran informasi kepada kawula muda terkait kosmetik yang aman.
- Penyelenggaraan pendampingan dan sertifikasi pemenuhan Surat Keterangan Penerapan CPOTB Bertahap, fasilitasi bantuan uji UMKM dan pelayanan prima pendaftaran Obat Tradisional untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar.
- Penyelarasan program pengawasan sarana, sampling, pendampingan UMKM dan program edukasi (KIE) dengan terlebih dahulu melakukan kajian terhadap hal-hal yang menjadi prioritas
- Laboratorium mengoptimalkan pelaksanaan regionalisasi laboratorium, melakukan pemutakhiran metode, jaminan mutu hasil pengujian melalui verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi, pemenuhan reagensia, peralatan sesuai standar minimal laboratorium, dan baku pembanding dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Beberapa rekomendasi dari laporan kinerja tahun 2021 dan menunjang keberhasilan pencapaian sehingga realisasi kinerja mengalami peningkatan antara lain:

- Terhadap produk-produk Obat TMK label telah dilaporkan kepada kedeputian I dan II setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing hal ini dapat terlihat dari keluarnya surat No. T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022, perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik, dimana sebelum surat tersebut terbit penandaan kosmetik hanya dibagi dua yaitu MK dan TMK, setelah surat ini terbit untuk kategori TMK dibagi 2 yaitu TMK Minor dan TMK Mayor. Jika ditemukan evaluasi penandaan dengan kategori TMK Minor maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah MK.
- Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga telah mereduksi peredaran produk tersebut.

- Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk obat yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik salah satunya dengan pemilihan duta kosmetik terus ditingkatkan dimassa yang akan datang
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar/ Tidak Memenuhi Syarat) yang telah dilaksanakan lebih ditingkatkan kembali

IKSS 2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

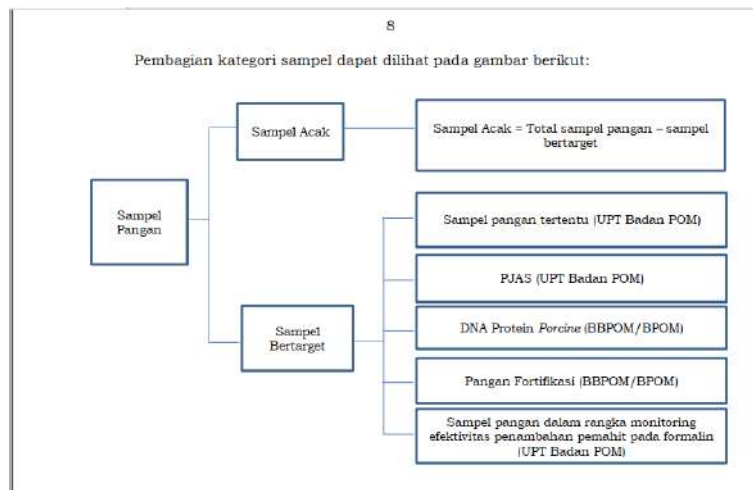
Sampling pangan dilakukan sepanjang tahun dengan sasaran tempat pelaksanaan sampling diprioritaskan pada sarana peredaran pangan meliputi gudang importir, distributor, sarana peredaran daring, hypermarket, supermarket/pasar swalayan, toko, warung, kios, pasar tradisional, dan lain-lain dalam rangka melihat kepatuhan pemenuhan persyaratan (compliance), surveilan, dan penanganan kasus pelanggaran pangan. Namun juga dapat dilakukan sampling pada sarana produksi dalam rangka konfirmasi/verifikasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), melihat kepatuhan pemenuhan persyaratan (compliance), maupun penanganan kasus pelanggaran pangan.

Proporsi jumlah sampel yang disampling dan diuji oleh BPOM di Ambon pada tahun 2022 yaitu 518 sampel dengan rincian 336 diantaranya merupakan sampel acak/random. Setiap jenis pangan diuji terhadap parameter uji yang telah ditetapkan/ PUK yang ditentukan dengan prioritas sebagai berikut:

- Parameter uji bahan berbahaya yang mungkin disalahgunakan pada jenis pangan.
- Parameter uji BTP yang sering ditemukan atau diduga digunakan secara berlebih atau belum diatur/dikaji untuk digunakan pada jenis pangan.
- Cemarkan kimia yang sering ditemukan atau diduga melebihi batas yang diizinkan pada pangan.

- Cemaran mikrobiologi yang bersifat patogen.
- Parameter uji tertentu yang ditetapkan pada SNI wajib dan/atau masuk dalam program nasional, seperti zat gizi yang dipersyaratkan pada produk pangan fortifikasi.
- Parameter uji yang merupakan isu terkini.

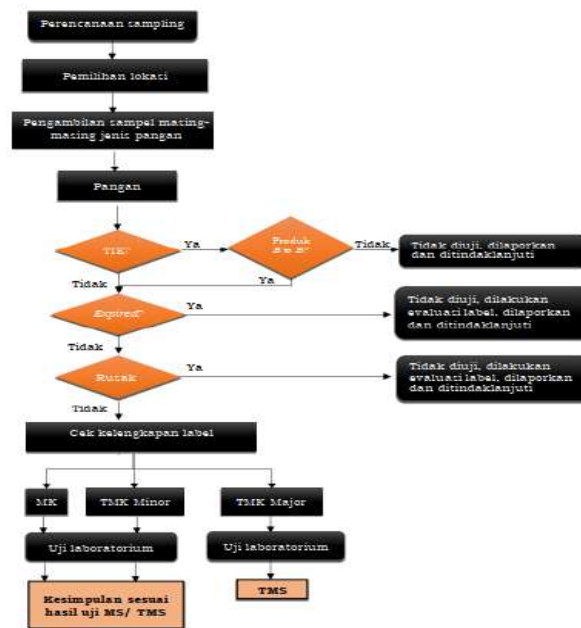
Terdapat 2 (dua) Kategori Sampling Pangan, yaitu Sampling Acak/Random Sampling dan Sampling Bertarget/Targeted Sampling. Pada perhitungan IKSS ini merupakan pengawasan pada sampel dengan sampling acak dengan memotret kondisi pangan olahan di Indonesia berdasarkan jenis pangan yang beredar di masyarakat yang meliputi 16 Kategori Pangan, terdiri dari 3 (tiga) yaitu : Sampling pangan yang dilakukan secara luring/offline; Sampling pangan yang dilakukan secara daring/online oleh UPT dengan penugasan khusus; Sampling pangan Business to Business (B to B) yang dilakukan secara luring/offline oleh UPT dengan penugasan khusus.



TEKNIK SAMPLING SAMPLING ACAK

Pengambilan sampel di peredaran wajib dilakukan secara acak dan tanpa memperhatikan kondisi sampel (produk MD/ML/PIRT/Tanpa Izin Edar (TIE)/rusak/kadaluarsa), kecuali bets produk.

Secara rinci alur pelaksanaan sampling acak dapat dilihat pada skema berikut.



TINDAK LANJUT SAMPLING DAN PENGUJIAN

a. Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan Pangan, sebagai berikut:

- 1) Untuk Produk terdaftar MD/ML akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- 2) Untuk Produk terdaftar P-IRT akan ditindaklanjuti oleh UPT setempat berkoordinasi dengan Dinas terkait.
- 3) Untuk produk tidak terdaftar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada pedagang (penjual) untuk tidak menjual produk pangan yang TMK/TMS dan melakukan penelusuran kepada produsen pangan yang bersangkutan (dilakukan oleh BBPOM/BPOM setempat).

b. Apabila hasil pengujian pangan tidak memenuhi syarat, maka UPT Badan POM dapat memeriksa penerapan CPPOB di sarana produksi sesuai dengan wilayah kerja UPT Badan POM disertai pengambilan sampel untuk diuji.

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pengawasan 339 sampel acak makanan dengan jumlah yang memenuhi syarat 228 sampel, sehingga realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2022 yaitu 84.96% dengan capaian 93.36% dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

Tabel 15. Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	76,67	79,46	80,65	84,96	93,36%	belum memenuhi ekspektasi

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat terhadap target pada tahun 2022 merupakan realisasi terendah dalam 3 tahun. Terjadi peningkatan jumlah TMS : 33 item TMK (33 item TMK label) di tahun 2020 menjadi 13 item TMK (5 item TMK label dan 8 item TMK uji) di tahun 2021 dan 51 item TMK (34 item TMK label dan 17 TMK uji) di tahun 2022.

Tabel 16. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00%	84,96%	93,36%	90,00%	97,55%	108,39%	78,00%	90,35%	115,83%



Gambar 36. Diagram Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

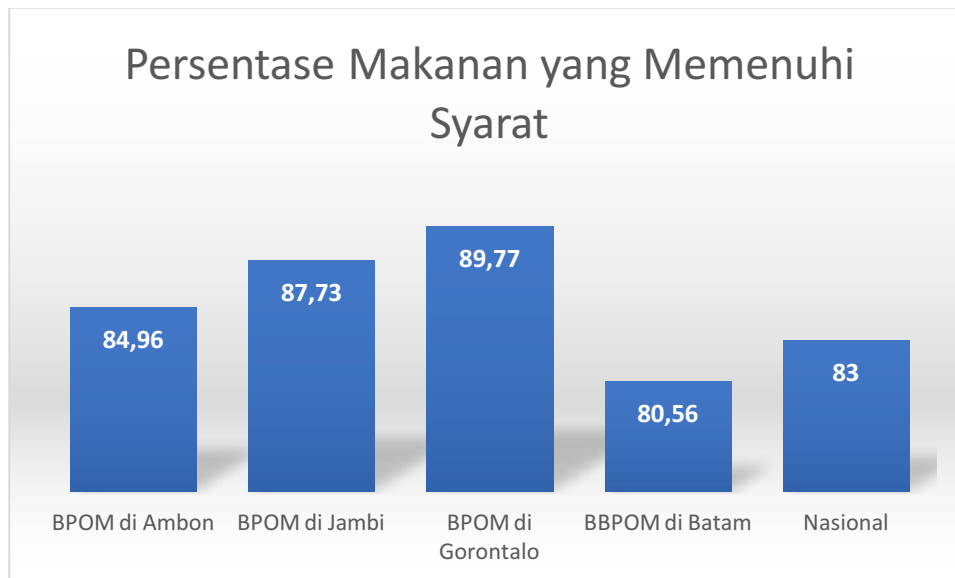
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91,00%	84,96%	93,36%	93,00%	84,96%	91,35%

Realisasi Persentase makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, , masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Tabel 18. Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BBPOM di Batam	Nasional
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	84.96	87.73	89.77	80.56	83



Gambar 37 Perbandingan Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Apabila dibandingkan dengan Balai satu kluster, Realisasi BPOB Ambon adalah paling rendah dan lebih rendah dibandingkan target nasional. Realisasi tertinggi diperoleh BPOB di Kendari.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- Sampel TMK penandaan pada tahun 2022 (perubahan juknis dari tahun 2021) beberapa diantaranya dikarenakan minimal 2 TMK minor akan meningkat menjadi kategori TMK mayor sehingga kesimpulan akhir menjadi TMS tanpa memperhitungkan hasil uji laboratorium.
- Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian untuk Produk terdaftar MD/ML ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.
- Sampel TMS uji merupakan parameter pengawet 1 item, siklamat 5 item, parameter kadar logam berat 5 item, dan kadar HMF 6 item.

Berdasar hasil capaian di tahun 2022, rekomendasi meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

- Berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan terkait hasil TMK penandaan produk MD/ML yang berasal dari produk luar Maluku

- Melaporkan penandaan TMK penandaan kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tembusan UPT Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk menjadi perhatian.
- Memberikan edukasi pada produsen PIRT di Maluku khususnya dengan produk TMS penandaan mengenai pencantuman label yang benar, berkoordinasi dengan Pemda/ Dinkes setempat.
- Berkoordinasi dengan laboratorium spesifik regionalisasi mengenai hasil uji TMS.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan khususnya UMKM terkait pemenuhan CPPOB, melalui desk CAPA secara online dan offline.
- Dilakukan tindak lanjut pembinaan hasil sampling/pengujian produk PIRT dan tidak terdaftar sesuai ketidaksiannya.
- Menyelenggarakan pendampingan dan sertifikasi dan fasilitasi bantuan uji UMKM dalam pemenuhan peranan CPMB untuk percepatan pelaku usaha dalam memperoleh izin edar
- Melakukan KIE meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi secara luring/daring.
- Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Capaian indikator ini pada tahun 2021 108,38%
- Telah dilakukan intervensi pembinaan pada sarana produksi lokal dan sarana distribusi, walaupun capaian akhir belum memenuhi ekspektasi (93.36%) Sampel yang di sampling ditemukan banyak TMS Penandaan dan telah dilaporkan sesuai ketentuan.

**IKSS 3. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN
BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN**

Sesuai Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 untuk memastikan obat yang beredar aman dan bermutu maka BPOM di Ambon telah melakukan sampling dan pengujian. Aman dan mutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan. Metode sampling untuk memastikan bahwa obat yang beredar aman dan bermutu adalah metode sampling targeted. Metode Targeted Sampling/Sampling Tertentu merupakan metode pengambilan sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan dengan maksud tertentu berdasarkan analisis risiko pengawasan. Metode ini dilakukan agar produk yang beredar di peredaran tetap memenuhi persyaratan sebagaimana pada saat didaftarkan. Kriteria Obat MS dan TMS serta alur pemeriksaan dan kesimpulan sampel targeted sama dengan sampel acak

$$\% \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Tabel 19. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

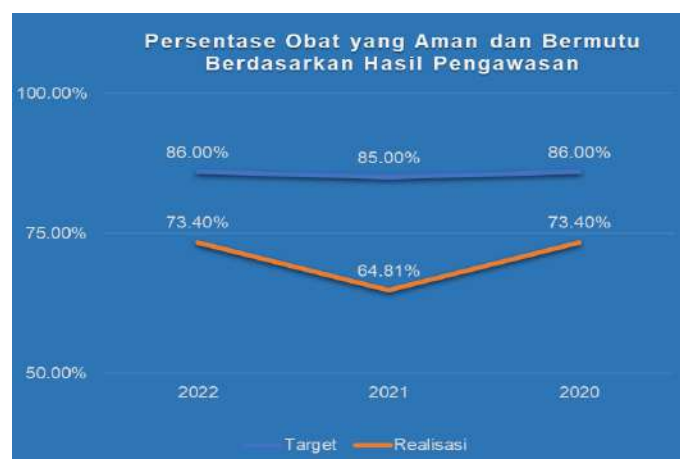
INDIKATOR	TARGET 2021 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	67,12	61,88	71,24	73,4	85,35	belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan sampel targeted obat (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang dilakukan oleh BPOM Ambon. Dimana total sampel obat kategori *Purposive/Targeted* yang memenuhi syarat adalah 287 sampel dari total 391 sampel yang diperiksa dan diuji sepanjang 2022. Sehingga capaian persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 yang **diperoleh adalah sebesar 85.35 %** dengan kriteria **“Belum Memenuhi Ekspektasi”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2022 BPOM di Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	73,4 %	85,35%	85,00%	64,81%	76,25%	85,00%	79,03%	92,98%



Gambar 38. Diagram Persentase obat Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020 sebesar 79.03% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 85.00% namun masih memperoleh capaian 92.98% dengan kriteria baik. Di tahun 2021 juga tidak mencapai target

dimana capaiannya 76.25% dengan kriteria cukup. Di Tahun 2022 terjadi peningkatan dibandingkan 2021, dimana capaian tahun 2022 menjadi 85,35%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

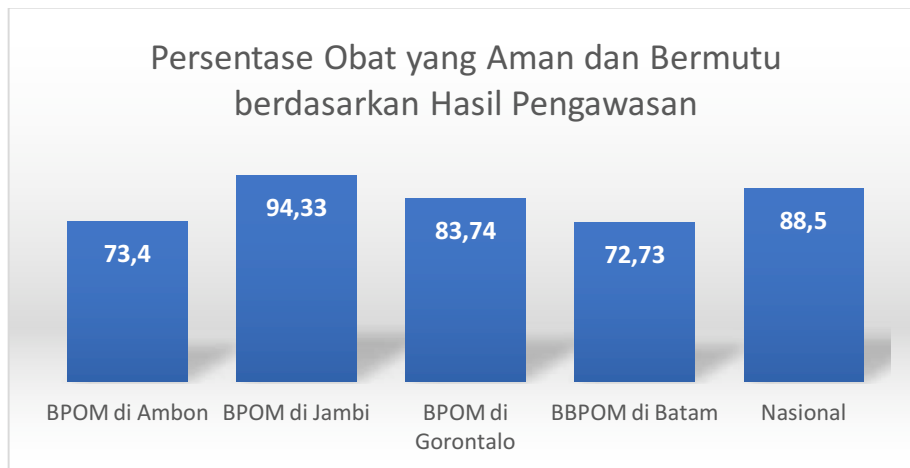
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021 THD RENSTRA
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86,00%	73,40%	85,35%	88,50%	73,40%	82,94%

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, capaian yang diperoleh masuk kategori **belum memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 22. Perbandingan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73,40	94,33	83,74	72,73
Target Nasional	88,50			



Gambar 39. Perbandingan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

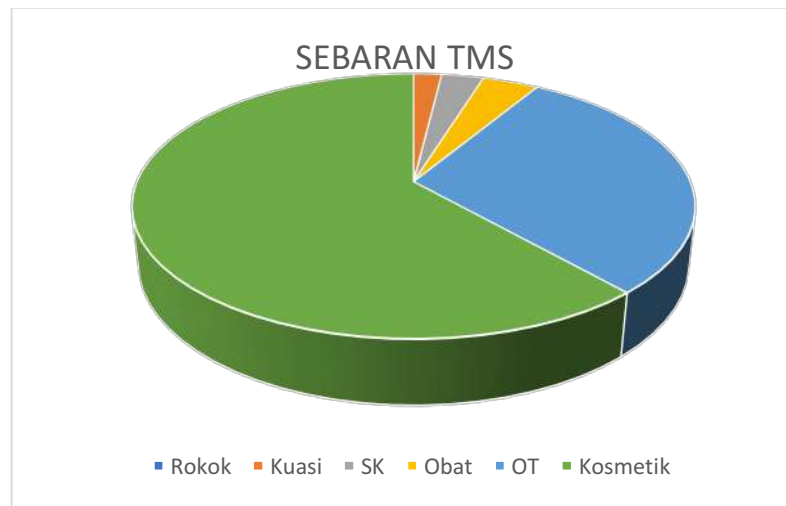
Apabila dibandingkan dengan Balai se-kluster, Balai dengan nilai capaian tertinggi adalah BPOM di Jambi (103,66%), dan Balai dengan nilai capaian terendah adalah BPOM di Ambon (85,35%).

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi tahun 2021 (64,81 %) yang menurun dibandingkan tahun 2020 (79,03%) disebabkan karena kondisi pandemic covid. Sehingga pengawasan, pembinaan dan penyebaran informasi yang dilakukan belum optimal. Dioptimalkan lagi di tahun 2022 sehingga realisasi mengalami peningkatan menjadi 73,4% dengan capaian 85,35%.

Tabel 23. Data Sampel TMS (2) 2022

KOMODITI	TMS	KETERANGAN
Rokok	0	-
Kuasi	2	Penandaan
SK	3	Penandaan
Obat	4	1 Mutu, 3 Penandaan
OT	31	Penandaan
Kosmetik	64	Penandaan
Total	104	1 Mutu, 104 Penandaan



Gambar 40. Diagram Data Sampel TMS (2) 2022

Dari tabel dan grafik diatas berdasarkan komoditi sampel terbanyak yang TMS adalah kosmetik dan dari sisi mutu 99,04% TMS bersumber dari penandaan sampel oleh karena Deputi II Badan POM RI telah melakukan kajian yang ditandai dengan terbit kriteria penandaan menjadi minor dan mayor sesuai dengan surat . Sebagian besar TMS penandaan karena belum dicantumkan 2D Barcode dan data dukung yang kurang lengkap karena kriteria penilaian label tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh pelaku usaha, dan belum ketatnya pengawasan distribusi oleh distributor. Penyesuaian kriteria kesimpulan penilaian label TMK Minor dan mayor cukup membantu meningkatkan Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada tahun 2022 sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari persentase hasil perbandingan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Balai POM Ambon yaitu sebanyak 73 sarana, dan target jumlah sarana obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa di Balai POM Ambon yaitu sebanyak 93 sarana.

Hal-hal penting yang telah dilakukan untuk meningkatkan persentase obat yang memenuhi syarat di kota Ambon

- Penyebaran informasi lebih intens dari tahun sebelumnya kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik bahkan secara langsung dikarenakan kondisi geografis kepulauan Maluku sehingga mendatangi pelaku usaha dan konsumen secara langsung lebih efektif, karena media sosial, media cetak dan media elektronik sulit mencapai tempat tempat terpencil

- Pembinaan kepada sarana distribusi obat/OT/SK/ dan Kosmetik secara intensif telah dilakukan baik berupa pemeriksaan maupun melalui Bimtek secara daring dan luring
- Sarana produksi obat khususnya UMKM telah mendapatkan pembinaan terkait pemenuhan cara produksi Obat/OT/SK/Kosmetik yang baik, melalui desk CAPA secara online dan offline
- Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (website bpom www.bpomambon.com, facebook : [Balai POM di Ambon](https://www.facebook.com/BalaiPOMdiAmbon), Instagram : [@balaipomambon](https://www.instagram.com/balaipomambon)) dan media massa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan wartawan. Bekerjasama dengan stakeholder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE secara daring ataupun luring.
- Pemilihan duta kosmetik untuk meningkatkan peran serta kaum milenial terkait penyebaran informasi produk obat dan makanan khususnya kosmetik.
- Koordinasi dengan stakeholder yang lebih ditingkatkan (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Izin Edar (TIE)/ dilarang beredar/ Tidak Memenuhi Syarat.
- Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan yang diadakan Badan POM.
- Meningkatkan sarana dan prasarana laboratorium pengujian.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi kinerja adalah:

- Terhadap produk-produk Obat TMK label telah dilaporkan kepada ke deputian I dan II setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing.

Pembinaan kepada pelaku usaha distribusi yaitu cara untuk mengetahui produk dengan label yang TMK sehingga kedepannya dapat mereduksi peredaran produk tersebut.

- Pelaksanaan KIE
- Program duta kosmetik
- Memonitor ketersediaan, reagen , baku pembanding dan penunjang lainnya untuk memperlancar proses pengujian.
- Memonitor kondisi alat instrumen dan diiringi dengan pemeliharaan alat yang sudah ada, mengganti alat yang telah rusak dan membeli instrumen baru yang lebih cepat dan lebih sensitif,
- Meningkatkan kompetensi personel dengan melalui pelatihan teknis maupun non teknis baik luring maupun daring.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2021 dan telah berefek menaikkan realisasi kegiatan antara lain:

- Terhadap produk-produk Obat TMK label telah dilaporkan kepada kedeputian I dan II setiap bulannya untuk ditindaklanjuti ke produsennya masing-masing hal ini dapat terlihat dari keluarnya surat No. T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 tanggal 31 Mei 2022, perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik , dimana sebelum surat tersebut terbit penandaan kosmetik hanya dibagi dua yaitu MK dan TMK, setelah surat ini terbit untuk kategori TMK dibagi 2 yaitu TMK Minor dan TMK Mayor. Jika ditemukan evaluasi penandaan dengan kategori TMK Minor maka kesimpulan hasil evaluasi penandaan adalah MK , hal ini sangat membantu karena sebagian besar penyumbang TMS adalah TMK dari produk kosmetik, OT dan suplemen kesehatan, koordinasi antara Balai dan Pusat seperti ini hendaknya lebih ditingkatkan lagi kedepannya
- Kegiatan penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik yang menaikkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk obat yang aman dan bermutu melalui edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (website bpom

www.bpomambon.com, facebook : Balai POM di Ambon, Instagram : @balaipomambon) dan media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan wartawan . Kegiatan - kegiatan seperti ini agar lebih digencarkan kedepannya dengan cara mencari metode yang lebih mudah dimengerti dan menarik untuk pelaku usaha dan konsumen

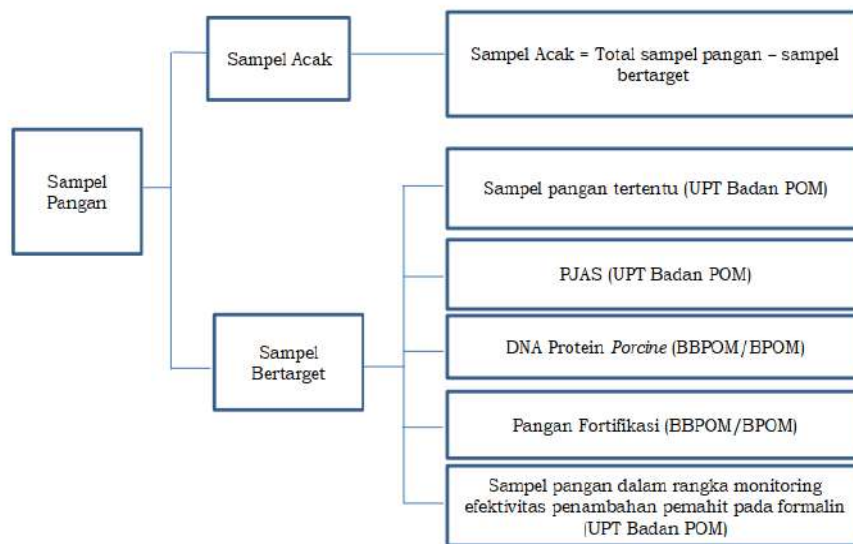
- Pembinaan terhadap sarana produksi obat khususnya UMKM terkait pemenuhan cara produksi Obat/OT/SK/Kosmetik yang baik, melalui desk CAPA secara online dan offline yang telah dilakukan di tahun 2022 agar lebih diintensifkan di masa yang akan datang.
- Rapat koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat yang telah dilakukan lebih ditingkatkan lagi
- Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/dilarang beredar/ Tidak Memenuhi Syarat.

IKSS 4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Strategi sampling dan pengujian yang efektif diperlukan untuk memastikan kualitas pangan beredar selalu memenuhi syarat secara konsisten. Perencanaan hingga pengambilan sampel yang benar akan memberikan hasil yang valid dan representatif untuk mencapai target sasaran indikator kinerja Badan POM.

Dalam upaya sampling dapat mewakili produk beredar sekaligus mengakomodasi pengawasan berbasis risiko, maka sampling dilakukan secara acak dan bertarget.

Pembagian kategori sampel dapat dilihat pada gambar berikut:



Sampling bertarget dilakukan untuk mengakomodasi fungsi pengawasan ataupun ditujukan untuk prioritas khusus. Sampling bertarget merupakan sampling yang dihitung sebagai capaian Indikator Badan POM untuk persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Sampling bertarget terdiri dari:

1. Sampling pangan tertentu: Sampling tindak lanjut kasus pelanggaran/masalah pangan, sampling dalam rangka pendampingan UMKM, sampling pangan spesifik lokal masing-masing daerah, sampling dalam rangka pengembangan laboratorium air, sampling minuman beralkohol lokal, sampling ruang lingkup akreditasi, sampling kemasan pangan.
2. Sampling yang mendukung program nasional: Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Pembagian jumlah sampel PJAS tahun 2022 berdasar lokasi sampling sejumlah 28 sampel dengan rincian 12 sampel berasal dari lokasi sekolah yang telah diintervensi, dan 16 sampel berasal dari lokasi sampling di sekolah diluar kab/kota yang telah diintervensi.
3. Sampling yang mendukung program nasional: Pangan Fortifikasi (khusus sampling ini akan dihitung sebagai capaian Indikator Badan POM untuk IKSS 5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat)
4. Sampling produk Pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine.
5. Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin



Gambar 41. Jumlah sampling bertarget 2022(diluar fortifikasi)

EVALUASI SAMPLING BERTARGET

- Sampel pangan olahan yang terkemas dan/atau berlabel, wajib dilakukan evaluasi label dan dilanjutkan ke pengujian.
- Hasil evaluasi label (MK/TMK Minor/TMK Major) tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel, penentu keputusan kesimpulan akhir sampel sampling bertarget tetap berdasarkan hasil uji : Hasil Uji TMS, maka Kesimpulan Akhir: TMS; Hasil Uji MS, maka Kesimpulan Akhir: MS

TINDAK LANJUT SAMPLING DAN PENGUJIAN

- a. Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan Pangan, sebagai berikut:
 - 1) Untuk Produk terdaftar MD/ML akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
 - 2) Untuk Produk terdaftar P-IRT akan ditindaklanjuti oleh UPT setempat berkoordinasi dengan Dinas terkait.
 - 3) Untuk produk tidak terdaftar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada pedagang (penjual) untuk tidak menjual produk pangan yang TMK/TMS dan melakukan penelusuran kepada produsen pangan yang bersangkutan (dilakukan oleh BBPOM/BPOM setempat).
- b. Apabila hasil pengujian pangan tidak memenuhi syarat, maka UPT Badan POM dapat memeriksa penerapan CPPOB di sarana produksi sesuai dengan wilayah kerja UPT Badan POM disertai pengambilan sampel untuk diuji.
- c. Apabila Berdasarkan hasil pengujian BBPOM/BPOM PJAS ditemukan TMS, maka UPT Badan POM setempat melakukan tindakan intervensi, yaitu:

- Bekerja sama dengan pihak sekolah khususnya tim Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) untuk meningkatkan kesadaran guru, orang tua murid, murid, dan pedagang di sekitar sekolah yang bersangkutan terkait keamanan pangan.
- Bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan pembinaan terhadap pedagang yang bersangkutan.
- Bekerja sama dengan dinas terkait untuk melakukan penelusuran kepada pengolah/pembuat pangan dan selanjutnya melakukan pembinaan kepada pengolah/ pembuat pangan yang bersangkutan.

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari 105 sampel bertarget dengan jumlah yang memenuhi syarat 95 sampel, sehingga realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2022 yaitu 86.67% dengan capaian 98.48% dengan kriteria **“belum memenuhi ekspektasi”**.

Tabel 24. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	60.71	71.79	75.93	86.67	98.48%	belum memenuhi ekspektasi

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap bertarget pada tahun 2022 tidak lebih besar dari tahun 2021 dan 2020, dikarenakan pada tahun 2020 capaian tersebut sudah termasuk sampling fortifikasi di dalamnya, sementara di tahun 2021 dan 2022 telah tersendiri.

Adapun jumlah TMS yang didominasi TMS PJAS di tahun 2020 17 item, tahun 2021 7 item, tahun 2022 14 item.

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00%	86,67%	98,48%	87,00%	91,67%	105,37%	72,00%	87,31%	121,27%



Gambar 42. Diagram Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

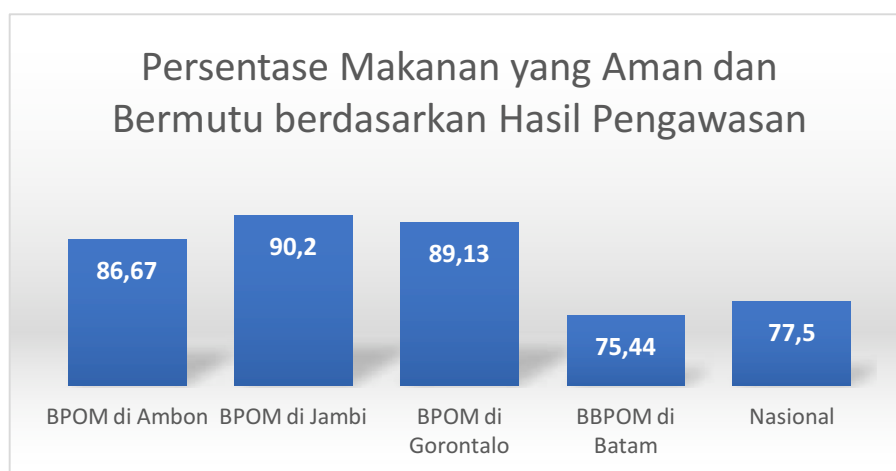
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN TERHADAP RENSTRA
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00%	86,67%	98,48%	90,00%	86,67%	96,30%

Realisasi Persentase makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, , masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Tabel 27. Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BBPOM di Batam	Nasional
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	86.67	90.2	89.13	75.44	77.5



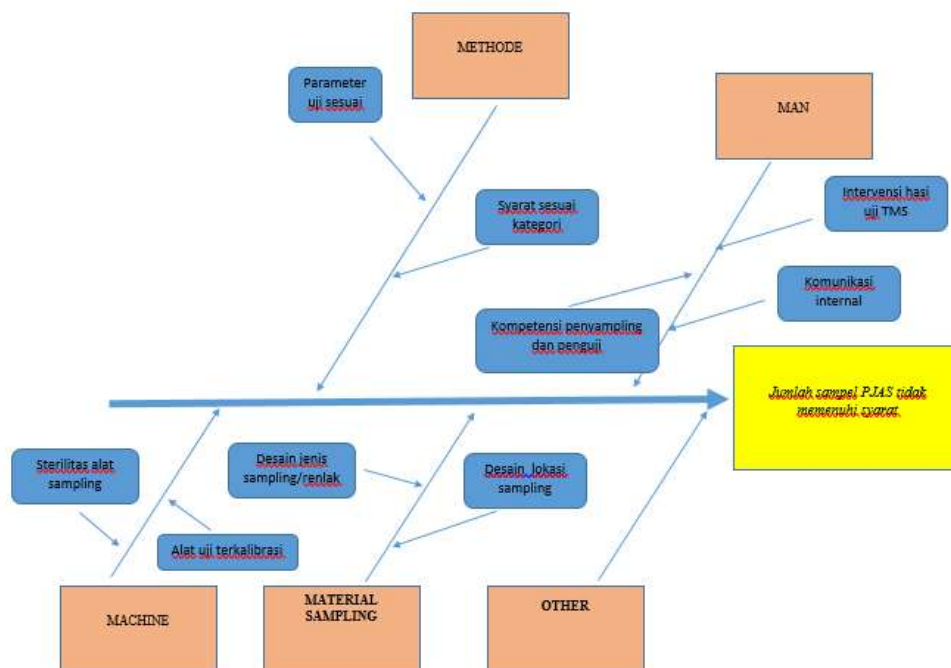
Gambar 43. Perbandingan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Apabila dibandingkan dengan Balai satu kluster, Realisasi BPOM Batam adalah paling rendah dan BPOM Ambon berada di antaranya. Keseluruhan telah melewati target nasional.

5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sejumlah sampel bertarget yang tidak memenuhi syarat menyebabkan target capaian indikator IKSS 4 ini tidak terpenuhi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS SAMPEL	JUMLAH TMS	PARAMETER UJI
1. Sampling pangan tertentu		
Sampling tindak lanjut kasus pelanggaran/masalah pangan, sampling pangan spesifik lokal masing-masing daerah, sampling dalam rangka pengembangan laboratorium air, sampling minuman beralkohol lokal, sampling ruang lingkup akreditasi, sampling kemasan pangan.	0	
Sampling dalam rangka pendampingan UMKM	1	Aflatoksin M1
2. PJAS		
Minuman berwarna tidak/mengandung susu (14 sampel)	7	Siklat (1), MPN E.coli (6)
Jeli, agar agar (0 sampel)	0	
Es (4 sampel)	0	
Bakso, batagor, tahu (10 sampel)	6	MPN E.coli (6)
Saos (0 sampel)	0	
3. Sampling produk Pangan yang diduga mengandung DNA/Protein Porcine.	0	
4. Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin	0	
JUMLAH SAMPEL BERTRAGET TMS		14



Berdasar hasil capaian di tahun 2022, rekomendasi meningkatkan capaian kinerja di atas adalah :

1. Intervensi hasil uji PJAS yang TMS khusus yang terkait hal hal yang mempengaruhi parameter uji yang melebihi ambang persyaratan. agar menerapkan cara pembuatan dan penyajian pangan yang baik khususnya dalam menjaga higienitas.

2. Penentuan persyaratan sesuai kelompok kategori PJAS yang berpengaruh terhadap kesimpulan hasil pengawasan. Beberapa sampel Es misalnya es boba agar tidak dimasukkan ke dalam kategori minuman berwarna yang menyebabkan pengambilan kesimpulan uji.
3. Berdasarkan ketentuan pada Juknis agar melakukan sampling pada 12 sampel berasal dari lokasi sekolah yang telah diintervensi, dan 16 sampel berasal dari lokasi sampling di sekolah diluar kab/kota yang telah diintervensi.
4. Koordinasi internal antara bagian pemeriksaan, Infokom, pengujian dalam mendorong pelaksanaan program keamanan pangan sekolah dengan PJAS yang aman.
5. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, pembina kantin, dan pedagang jajanan PJAS dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Melakukan kegiatan KIE untuk masyarakat dan Pembinaan pada pelaku usaha serta Operasional Laboratorium Keliling dalam rangka pengawasan pangan.
- Terhadap pendampingan sampel UMKM yang TMS dilakukan pendampingan agar memenuhi ketentuan produk yang dipersyaratkan.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

- Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 105,36% sehingga tidak ada rekomendasinya.
- Terhadap hasil PJAS yang tidak memenuhi syarat kimia dan cemaran mikrobiologi telah dilakukan pembinaan terhadap penjaja agar meningkatkan penerapan CPPB, serta dilakukan peningkatan koordinasi dengan dinas kesehatan kota dan pihak sekolah.
- Dilakukan sosialisasi dalam bentuk webinar sesuai issue terkini mengenai jajanan anak sekolah.

IKSS 5. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Pengawasan sampling pangan fortifikasi tahun 2022 meliputi Garam Konsumsi, Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan, dan Minyak Goreng Sawit, dengan proporsi 55% garam konsumsi 15% tepung terigu sebagai bahan makanan dan 30% minyak goreng sawit. Sampling pangan fortifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. di peredaran : untuk garam, minyak goreng sawit dan tepung terigu
- b. di pabrik/pengemas : khusus untuk minyak goreng sawit. Hanya dilakukan oleh UPT yang memiliki industri maupun pengemas ulang minyak goreng sawit.
- c. di gudang importir : khusus untuk tepung terigu. Hanya dilakukan oleh UPT yang memiliki importir yang melakukan impor tepung terigu
- d. Khusus untuk produk tepung terigu dan minyak goreng sawit, perlu dicatat tanggal produksi produk sebagai penentu kesimpulan.
- e. Seluruh sampel pangan fortifikasi diuji (walaupun dalam kondisi TIE, rusak, dan TMK Label).

Kesimpulan fortifikan: yang dilaporkan sebagai indikator Persentase Pangan Fortifikasi Memenuhi

Syarat. Penarikan kesimpulan hanya berdasarkan kadar fortifikan yang ditambahkan, sebagai berikut:

- Garam: Kadar Iodium
- Minyak Goreng Sawit: Kadar Vitamin A (total)
- Tepung terigu: Kadar Fe, Zn, B1, B2, dan B9 (asam folat).

Tindak Lanjut Sampling dan Pengujian Pangan Fortifikasi :

a. Tindak lanjut hasil sampling dan pengujian mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Keamanan Pangan, sebagai berikut :

- 1) Untuk Produk terdaftar MD/ML akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- 2) Untuk Produk terdaftar P-IRT akan ditindaklanjuti oleh UPT setempat berkoordinasi dengan Dinas terkait.

- 3) Untuk produk tidak terdaftar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan kepada pedagang (penjual) untuk tidak menjual produk pangan yang TMK/TMS dan melakukan penelusuran kepada produsen pangan yang bersangkutan (dilakukan oleh BBPOM/BPOM setempat).

b. Apabila hasil pengujian pangan tidak memenuhi syarat, maka UPT Badan POM dapat memeriksa penerapan CPPOB di sarana produksi sesuai dengan wilayah kerja UPT Badan POM disertai pengambilan sampel untuk diuji.

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat :

$$\frac{\text{Jumlah sampel pangan fortifikasi yang Memenuhi syarat}}{\text{Total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Realisasi persentase pangan fortifikasi dari 85 sampel bertarget dengan jumlah yang memenuhi syarat 78 sampel, sehingga Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2022 yaitu 91.76% dengan capaian 95.59% dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

Tabel 28. Realisasi Persentase Makanan **yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2022**

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	REALISASI CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	96,00%	84.44	90.00	91.76	91.76	95.59%	belum memenuhi capaian

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun-tahun sebelumnya

Capaian persentase pangan fortifikasi pada tahun 2022 tidak lebih besar dari tahun 2021, sedangkan indikator ini belum dimasukkan sebagai indikator capaian pada tahun 2020.

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96.00%	91.76%	95.59%	95.00%	95.00%	100.00%	-	-	-



Gambar 44. Diagram Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2020-2022

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Persentase **Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat** Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

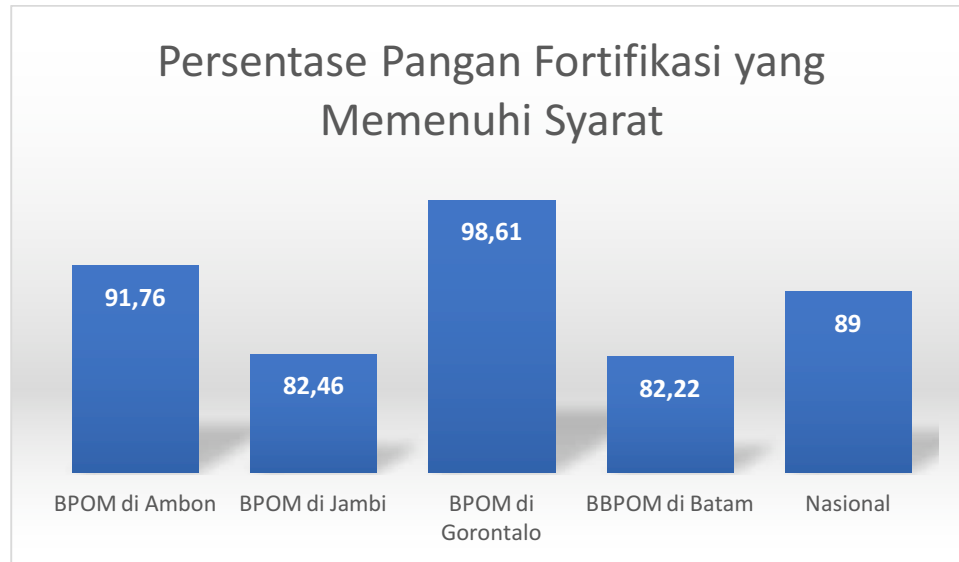
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	96.00%	91.76%	95.59%	99.0%	91.76%	92.69%

Realisasi Persentase makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, , masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Tabel 31. Perbandingan Persentase **Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat** tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	B POM di Ambon	B POM di Jambi	B POM di Gorontalo	B POM di Batam
Persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	91.76	82.46	98.61	82.22
Target Nasional	89			



Gambar 45. Diagram Perbandingan Persentase **Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat** tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

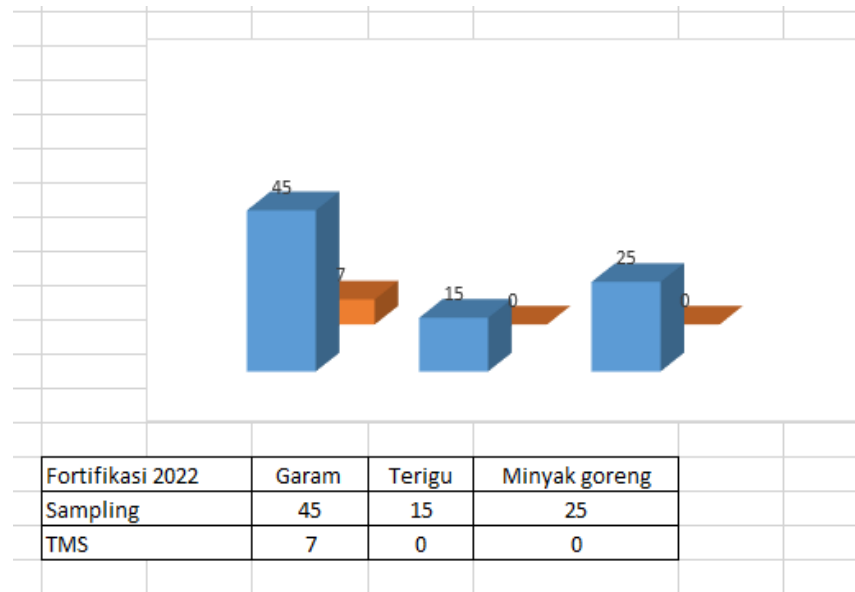
Apabila dibandingkan dengan Balai satu kluster, Realisasi B POM Ambon berada di tengah kisaran dan telah berada di atas target nasional.

5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- Sejalan dengan tingkat stunting Maluku yang cukup tinggi dengan daerah sampling Seram Bagian Timur sebagai lokus sampling, table berikut memberikan gambaran pengawasan fortifikasi tahun 2022 :

Tabel 32. Sampel fortifikasi yang tidak memenuhi syarat

Jenis Produk	Jumlah Sampling	MS	TMS	Uraian TMS
Garam konsumsi	45	33	7	Kadar air + Kadar KIO3
Tepung terigu sebagai bahan makanan	15	10	0	
Minyak goreng sawit.	25	25	0	



Gambar 46. Diagram sampel fortifikasi yang tidak memenuhi syarat

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja ini adalah :

Strength (kekuatan)

- Maluku tidak memiliki industri / pengemas ulang minyak goreng sawit dan gudang importir tepung terigu sehingga hanya dilakukan sampling pangan fortifikasi di peredaran (100%). Sesuai juknis sampling dan pengujian Pangan TA 2021 parameter Vitamin A dan bilangan Peroksida yang diatur di SNI hanya terhadap sampel yang diambil di pabrik, sehingga apabila sampel yang diambil di peredaran dinyatakan TMS Vitamin A (total), disimpulkan sebagai Memenuhi Syarat (MS). Sehingga dapat disimpulkan pola pengetahuan sarana distribusi terhadap persyaratan pangan fortifikasi tepung terigu, minyak goreng di Maluku telah baik.
- Garam konsumsi yang digunakan dalam beberapa tahun merupakan beberapa merek tertentu saja, sehingga pola hasil uji untuk yang memenuhi syarat akan sama.

, Weakness (Kelemahan)

- Garam konsumsi yang diuji merupakan garam kasar yang dikonsumsi dan diproduksi secara turun temurun di kawasan kepulauan Maluku dimana kesadaran petani garam dan masyarakat sebagai konsumen di Maluku masih rendah terhadap pentingnya fortifikasi KIO3 dalam menghindari gangguan akibat

kekurangan yodium (GAKY) . Maluku mempunyai angka stunting relatif tinggi di Indonesia yaitu 28.70% atau 11 terbesar angka stunting di Indonesia.

- Garam kasar yang diproduksi dikemas dalam plastik kresek terbuka, dan karena sifat yodium yang mudah teroksidasi oleh cahaya terbuka, dan penurunan kadar yodium akibat sifat higroskopis garam mengakibatkan turunnya kadar yodium.

Opportunities (Peluang)

Target yang ditetapkan pada indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 sangat tinggi yaitu 96%, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam pengentasan angka stunting, walau pada implementasinya fortifikasi garam beryodium masih belum memenuhi target tersebut.

Threats (Ancaman)

Target yang ditetapkan pada indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2022 tidak memenuhi ekspektasi.

Rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain :

- dilakukan kajian/ evaluasi jumlah sampel garam kasar atau garam krosok yang menjadi target sampling, apakah penggunaan sebagai garam konsumsi atau tidak, dikarenakan garam krosok merupakan garam dalam pembuatan ikan asin dan pakan ternak.
- Koordinasi antara BPOM di Ambon dengan Pemda dalam tindak lanjut penggunaan sampel fortifikasi yang tidak memenuhi syarat dengan pembinaan terhadap petani garam lokal dan menekan penggunaan garam yang tidak memenuhi standar SNI, dengan melakukan :
- Memberikan KIE kepada masyarakat khususnya pada lokus stunting tentang pentingnya zat gizi mikro yodium untuk perkembangan kecerdasan anak dan menghindari gangguan pertumbuhan janin pada wanita hamil, serta tentang tips cara memilih garam yang baik.
- Memberikan KIE tentang penanganan garam konsumsi yang baik dalam mengurangi laju oksidasi dan kerusakan yodium akibat pengemasan dan penyimpanan yang kurang baik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah Koordinasi yang baik antara bagian pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan setiap bulan dan melalui WA grup mengenai rencana, pelaksanaan dan evaluasi sampling dan pengujian. Dilakukan sampling dan pengujian sesuai juknis sampling dan pengujian tahun 2022. Koordinasi yang baik antara Dinas kesehatan provinsi Maluku dalam penanganan masalah GAKY, dinas perindustrian menjadi bagian dalam upaya peningkatan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022

Dari pola hasil pengawasan sampel fortifikasi di Maluku, selalu ditemukan TMS uji garam konsumsi yaitu tidak mengandung KIO₃ dan tidak memenuhi kualitas mutu dan telah ditindaklanjuti.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan dengan NPS 95,15% (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis II pada tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 6. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM. Indeks Kesadaran Masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku dimana variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa.

Desain metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah multistage random sampling dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 10%, dan pemilihan sampel/responden adalah secara acak (random). Penetapan populasi/responden adalah berdasarkan Data Sampel Rumah Tangga/DSRT yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari yang tersebar di 34 provinsi dan 506 kabupaten/kota terdiri dari 1.822 blok sensus dengan 18.220 jumlah sampel rumah tangga. Kriteria inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 tahun. Metode pengumpulan data secara kuantitatif melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Provinsi dengan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis offline dan online. Total responden di Propinsi Maluku sebanyak 520 responden.

Interpretasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori yang ditentukan sesuai dengan Tabel 33.

Tabel 33. Kategori Indeks Kesadaran Masyarakat

Nilai	Kategori
≤ 45.00	Tidak baik
45.01 – 60.00	Kurang baik
60.01 – 75.00	Cukup baik
75.01 – 90.00	Baik
≥ 90.01	Sangat baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 34. Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s/d Triwulan				Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria Capaian
		I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	80	-	-	-	80	-	-	-	76,12	76,12	95,15	Baik

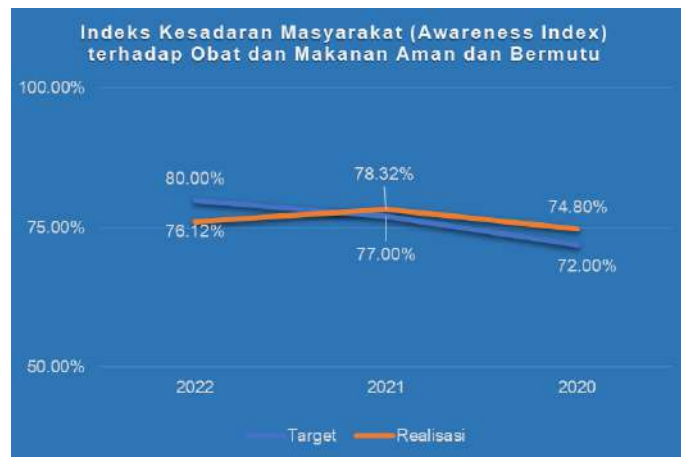
Persentase capaian indeks di masih banyak yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan dalam dokumen reuiu rencana strategis BPOM tahun 2022. Sehingga perlu upaya untuk meningkatkan program pengawasan Obat dan Makanan serta KIE kepada masyarakat, agar kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan dapat meningkat di masa yang akan datang.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2020 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2022 dengan Tahun 2020-2021.

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indek Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	80,00%	76,12%	95,15%	77,00%	78,32%	101,71%	72,00%	74,80%	103,89%

Gambar 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu Tahun 2022 dengan Tahun 2020-2021.



Gambar 47. menunjukkan **penurunan** Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 namun masih pada kategori **baik**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat Tahun 2022 Terhadap Target renstra 2024

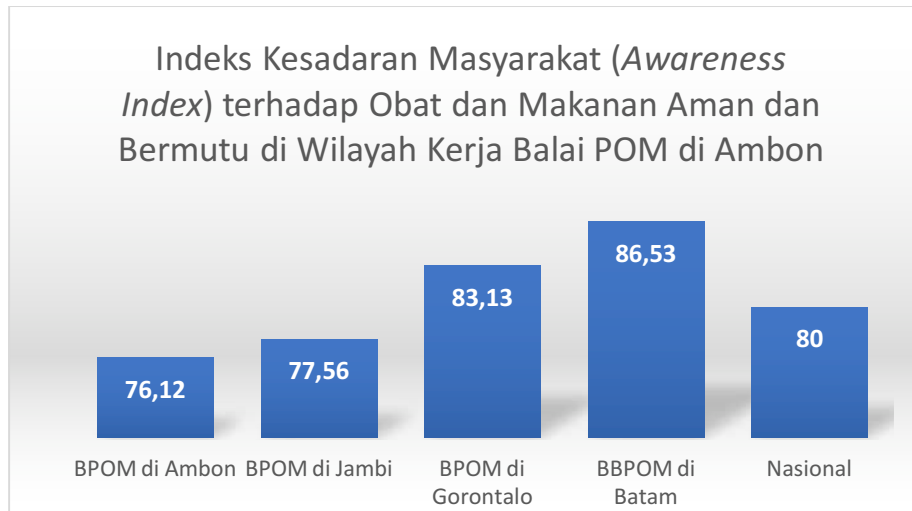
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	85	76,12	89,55

Realisasi Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu tahun 2022 **belum mencapai** target renstra tahun 2020-2024 sebesar 85. Agar dapat memenuhi target renstra tahun 2024 perlu mengoptimalkan kinerja pada tahun berikutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 37. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon			BPOM di Jambi			BPOM di Batam			BBPOM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu	80	76,12	95,15	78	77,56	99,44	82	86,53	105,53	84	83,12	98,96
Target Nasional	80											



Gambar 48. Diagram Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon tahun 2022 (76,12) **lebih rendah** dibandingkan dengan BPOM/BBPOM lain yang sejenis/setara dan **dibawah** target nasional.

5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan hasil survey didapatkan indeks pengetahuan adalah 77,41 (Baik), indeks sikap 80,72 (Baik) dan indeks perilaku adalah 70,24 (Cukup Baik). Indeks kesadaran masyarakat meliputi pengetahuan, sikap dan perilaku diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

Tabel 38. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BPOM di Ambon berdasarkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku.

Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu berdasarkan Pengetahuan, Sikap dan Perilaku



Pengetahuan dan sikap masyarakat dalam kategori Baik dalam memilih produk, namun belum diikuti dengan perilaku (cukup baik) yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama penyimpanan sesuai informasi pada label, membaca informasi produk pada Label/Kemasan. Oleh karena itu harus menjadi bahan pertimbangan BPOM di Ambon dalam melakukan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat.

Berberapa hal yang mempengaruhi penurunan indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu antara lain:

1. Penggunaan website resmi (www.bpomambon.com) dengan total 176 berita dan media sosial (Instagram/ facebook/ twitter) dengan total 713 postingan sepanjang tahun 2022 masih kurang efektif bagi beberapa segmen masyarakat di Maluku yang merupakan daerah kepulauan dengan keterbatasan akses teknologi informasi utamanya di daerah yang jauh dari ibukota kabupaten. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi lebih intensif terhadap akun-akun medsos Balai POM di Ambon untuk meningkatkan jumlah *follower* sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi penting terkini terkait obat dan makanan.
2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait Cek KLIK dengan bermacam-macam metode dan dilakukan secara kontinyu merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Sosialisasi dengan media luar ruang (spanduk, banner, leaflet dan brosur) dirasa perlu dilakukan lebih optimal untuk mencapai kalangan masyarakat tertentu.
3. Kegiatan KIE dengan metode luring dan daring belum menjangkau kalangan masyarakat tertentu. Kegiatan KIE yang telah dilakukan dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk tokoh agama melalui KIE di tempat ibadah,

pelibatan LSM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, Dinas Koperasi, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

4. BPOM di Ambon memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu melalui berbagai komunitas misalnya Pramuka, PKK, Dharma Wanita, IAI, Kader Keamanan Pangan Desa, Petugas Pasar Aman

Semua upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Dari hasil evaluasi Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan aman dan bermutu, maka rekomendasi yang dapat dilakukan agar indeks dapat meningkat di tahun berikutnya sebagai berikut.

1. Meningkatkan intensitas program KIE dengan mengencarkan penggunaan *tagline* cek KLIK, cek BPOM dan BPOM Mobile melalui berbagai media yang banyak diakses oleh masyarakat.
2. Menyusun konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pesan utama yang perlu disampaikan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor ijin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan.
3. Telah dilakukan program KIE yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kelompok masyarakat, misal pemberdayaan duta kosmetika untuk mengedukasi kelompok milenial yang lebih antusias dan tertarik dengan topik kosmetik. KIE tatap muka bagi kelompok pedesaan tentang keamanan pangan yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan sulit internet. Telah dilakukan KIE secara tatap muka yang melibatkan tokoh agama.
4. Meningkatkan sinergi dengan Kementerian/lembaga/stakeholders dan melakukan kolaborasi dalam upaya meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat sebagai perpanjangan tangan dalam menjamin keamanan dan mutu obat melalui kegiatan GKPD, PJAS dan Pasar Aman dari bahan Berbahaya.

6. Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui berbagai media, baik cetak, elektronik, maupun online. Media sosial yang merupakan sarana edukasi yang relatif murah namun efektif tetap akan menjadi prioritas untuk memberikan layanan informasi dan peningkatan pengetahuan masyarakat.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemberian layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan melalui berbagai media, baik secara langsung, media sosial ataupun telepon dan email sebanyak 155 layanan.
2. Penyebaran informasi melalui media sosial pada tahun 2022 dengan total 173 dalam bentuk berita aktual dan infografis tentang obat dan makanan sebanyak 713 konten.
3. Tayangan berbagai informasi tentang obat dan makanan dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui media elektronik radio dan televisi sebanyak 34 layanan.
4. Terlaksananya Program Prioritas Nasional seperti Gerakan Keamanan pangan Desa (GKPD), Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) yang langsung menyentuh komunitas desa, sekolah dan pasar
5. Pemanfaatan subsite ambon.pom.go.id, website “Panorama Lain” www.bpomambon.com serta Whatsapp Bisnis di Kontak Layanan 0811-4800-222 yang dilengkapi dengan berbagai katalog informasi obat dan makanan sebagai media KIE kepada masyarakat

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi telah dilaksanakan

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai POM di Ambon
Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 99,77% (Belum Memenuhi Ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis III pada tahun 2022 diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 7. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha. Tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas layanan Balai POM di Ambon kepada pelaku usaha adalah melalui survey kepuasan penggunaan layanan.

Pada tahun 2022 survey dilakukan secara *online* pada laman surveyprkom.go.id pada saat pelaksanaan kegiatan sampai dengan pelaporan. Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha merupakan layanan yang diberikan Balai POM di Ambon dalam rangka pemenuhan regulasi (*regulatory assistance*). Jenis KBP yang dilakukan meliputi pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi. Ruang lingkup KBP ini menggunakan pengukuran kepuasan mengacu pada konsep Service Quality (ServQual) yaitu aspek: Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, & Responsiveness yang diterjemahkan dalam 10 pertanyaan mewakili tiap aspek menggunakan skala Likert 1-4 mengacu pada rekomendasi PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei. Target IKU Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan sebesar 89,60 persen. Adapun capaian tahun 2022 sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 39. Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN 2022	REALISAS CAPAIAN
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60	92,87	103,65	memenuhi ekspektasi

Hasil survey tahun 2022 diperoleh berdasarkan data yang diolah dari jawaban 106 pelaku usaha yang berpartisipasi sebagai responden. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari peran serta dari segenap pegawai Balai POM di Ambon dalam pemberian layanan prima kepada para pengguna layanan. Capaian yang dihasilkan sejalan dengan target dalam rencana strategis Balai POM di Ambon 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan POM RI No. HK.02.02.1.2.21.467 tahun 2021 tentang reviu rencana strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan Balai POM di Ambon dalam memenuhi ekspektasi para pelaku usaha. Dengan survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kondisi pelayanan serta harapan para pelaku usaha sebagai dasar pengambilan kebijakan peningkatan kualitas layanan ke depan.

Tabel 40. Capaian Survey Index Kepuasan Pelaku Usaha tahun 2022

No.	Nama Kegiatan	Nilai Survey
1	Desk	84.75
2	Pendampingan	95.75
3	Bimtek	98.52
4	Sosialisasi	94.54

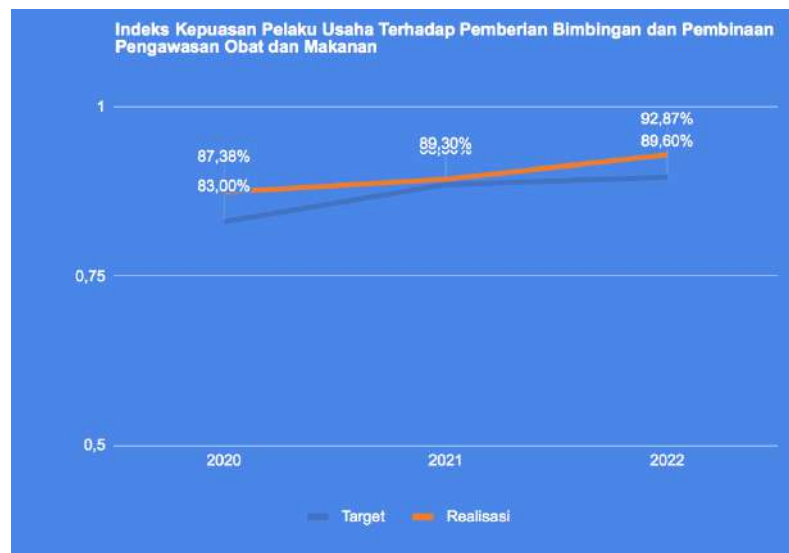
Impak dari kegiatan bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha meningkatkan jumlah sarana produksi yang memenuhi persyaratan. Tahun 2022 sarana produksi UKOT/UMOT memenuhi syarat 90.47%, produksi pangan 74.60%. Sarana produksi pangan memperoleh sertifikat cara produksi pangan olahan yang baik sebanyak 10 sarana dan 1 sarana UMOT memperoleh sertifikat cara produksi obat tradisional tahap I.

Realisasi survey indeks kepuasan pelaku usaha tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2020 dan tahun 2021. Hal tersebut menandakan kegiatan bimbingan dan pendampingan telah memenuhi ekspektasi pelaku usaha sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2020, 2021 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
	TARGET	REALISASI 2020	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2021	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,0%	87,38%	105,28%	88,50%	89,30%	100,90%	89,60%	92,87%	103,65%



Gambar 49. Diagram Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Tren realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha semakin meningkat dari tahun 2020 hingga 2022 dengan diikuti target yang juga meningkat. Hal ini menunjukkan ekspektasi pelaku usaha terhadap layanan bimbingan yang diberikan oleh Balai POM di Ambon telah terpenuhi.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon

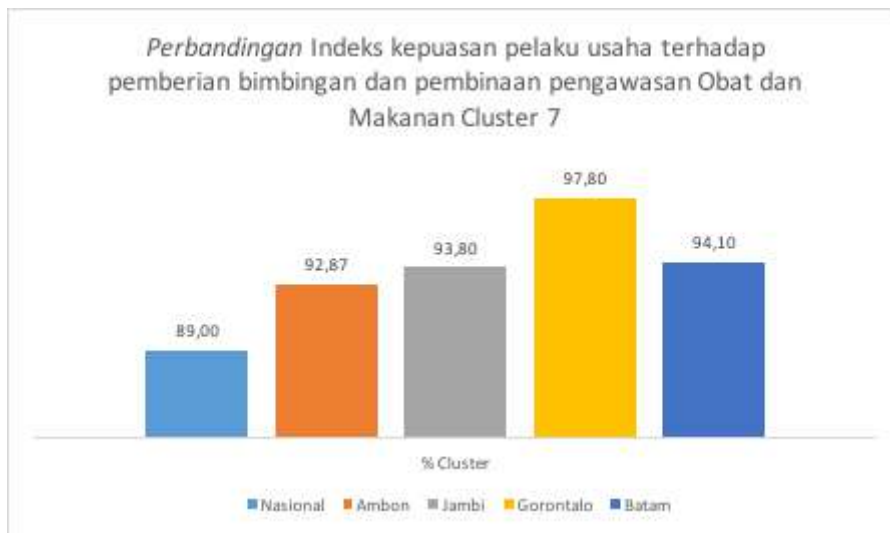
INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2022	PERKIRAAN CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2022	PERKIRAAN CAPAIAN 2024
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,60%	92,87%	103,65%	90,70%	92,87%	102,39%	91,80%	92,87%	101,17%

Jika dibandingkan dengan target renstra 2023 dan 2024, realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan indeks tahun 2022 adalah 102.39% dan 101.17% dibandingkan target (Baik).

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 43. Perbandingan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BBPOM di Batam
Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	92.87	93.8	97.8	94.1
Nasional	89			



Gambar 50. Diagram Perbandingan Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

Realisasi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 terendah adalah BPOM di Ambon, namun jika amati target lebih tinggi dibandingkan Balai sejenis dan pencapaian BPOM di Ambon melampaui target Nasional.

Kegiatan Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha yang telah dilakukan oleh Balai POM di Ambon antara lain :

- Pesta kenari Pendampingan penerbitan SPP-IRT se Provinsi Maluku dalam sehari
- Desk perbaikan CAPA pengelolaan obat di Apotek dan PBF wilayah kerja Balai POM di Ambon
- Bimtek penggunaan Aplikasi SPPIRT di Balai POM Ambon
- Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Asrot untuk pelaku usaha obat tradisional di Balai POM Ambon
- Sosialisasi dan Desk Registrasi Jemput Bola Pangan Olahan, bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM RI

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Badan POM, dari 9 kegiatan Pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon selama tahun 2022, dari 106 responden pelaku usaha diperoleh indeks kepuasan sebesar 92.87%.

5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis pendukung Keberhasilan :

1. Pemberian bimbingan oleh fasilitator Balai dalam mendampingi pelaku usaha, mulai dari perizinan berusaha, penyiapan sarana dan prasarana, dokumentasi, pengajuan layout, pendampingan onsite sampai mendapatkan izin penerapan CPPOB dan CPOTB bertahap.
2. Pengajuan berbasis Aplikasi mempercepat proses sertifikasi hingga memperoleh izin penerapan CPPOB dan CPOTB bertahap.
3. Pengajuan Izin penerapan CPPOB dengan kategori produk *low risk* dan *medium risk* menggunakan surat komitmen.
4. Adanya bantuan pengujian produk dengan berdasarkan parameter registrasi serta pengajuan diskon 50% PNBP kepada pelaku usaha skala UKM.
5. Kegiatan bimbingan dan pendampingan bagi pelaku usaha meningkatkan pemahaman dan pemenuhan regulasi di bidang obat dan makanan.
6. Peningkatan frekuensi bimbingan teknis yang terkait sertifikasi dan pendaftaran produk baik secara luring maupun daring
7. Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya saing UMKM di wilayah Maluku dan mempercepat dalam pemulihan di sektor ekonomi.
8. Peningkatan upaya tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan agar tetap ada monitoring kemajuan proses pendaftaran pangan, obat tradisional, dan kosmetik pasca bimbingan.

BPOM di Ambon senantiasa melakukan kegiatan pendampingan, Desk, Bimtek, dan sosialisasi yang berkualitas agar pelaku usaha dapat melakukan perbaikan sarana berkesinambungan melalui daring maupun luring sehingga tujuan/ target pelaku usaha dapat tercapai.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha baik secara luring maupun daring dalam hal pemenuhan CPPOB dan CPOTB serta registrasi produk
2. Pelaksanaan sosialisasi dan desk dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM Ambon yang bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang registrasi pangan olahan. Materi yang disampaikan mengenai e-registrasi pangan olahan, label pangan serta uji coba pendaftaran akun dan produk oleh Dit Reg Pangan Olahan Badan POM secara hybrid (luring dan daring) dan OSS berbasis risiko oleh Dinas PMPTSP Provinsi Maluku dan sertifikasi CPPOB.
3. Pelaksanaan pendampingan penerbitan izin edar PIRT se provinsi Maluku dengan slogan “Pesta kenari”
4. Melakukan pendampingan dan meninjau langsung ke sarana produksi ke salah satu UMKM Pangan yang memproduksi AMDK di Kota Tual, UMKM Pangan yang memproduksi bakery olahan sagu di Saparua, Kabupaten Maluku Tengah; UMKM Pangan yang memproduksi produk olahan ikan seperti nugget dan bakso; serta usaha minyak kayu putih di Namlea, Kabupaten Buru.
5. Pelatihan dan peningkatan kompetensi petugas sertifikasi dalam proses perizinan berusaha berbasis OSS RBA

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi telah dilakukan yaitu peningkatan pendampingan UMKM, sinergitas stakeholder, kemudahan dalam pengujian sampel UKM dalam rangka registrasi

IKSS 8. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam penyelenggara pengawasan Obat dan Makanan dengan membandingkan antara harapan/ekspektasi dan kenyataannya. Indeks kepuasan masyarakat juga ditujukan sebagai penataan sistem, mekanisme dan prosedur kerja sehingga kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna.

Metode pengukuran kepuasan pelanggan menggunakan pendekatan pengukuran kepuasan masyarakat dengan metode Survei Kepuasan Pelanggan yang mengandung 5 dimensi kualitas jasa yaitu berwujud (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), respon ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) dan *empathy*.

Interpretasi indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan mengacu pada skala 0-100 dengan kategori yang ditentukan sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 44. Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat

Skor/ Nilai	Kategori
≤ 45,00	Tidak Puas
45,01 – 60,00	Kurang Puas
60,01 – 75,00	Cukup Puas
75,01 – 90,00	Puas
≥ 90,01	Sangat Puas

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 45. Target dan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s/d Triwulan				Realisasi 2022	Kategori	Capaian 2022 (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58	-	-	-	71,58	-	-	-	71,15	71,15	Cukup Puas	99,40

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan sesuai dengan hasil survey yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan tahun 2022 sebesar **71,58 (Cukup Puas)** dan **belum mencapai target** yang ditetapkan 71,58 dengan selisih 0,43. Capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan tahun 2022 sebesar **99,40%** dengan kriteria **Baik**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 46. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
2020	71	68,15	95,99	Baik
2021	69,86	68,02	97,37	Baik
2022	71,58	71,15	99,40	Baik

Realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3,13 dari tahun 2021 namun tidak cukup mencapai target tahun 2022 yang juga meningkat sebesar 1,72. Persentase capaian indikator mengalami **peningkatan** dari tahun sebelumnya dengan kategori capaian **Baik** seperti yang tampak pada gambar di bawah ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Tahun 2020 – 2022



Gambar 51. Perbandingan Capaian Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2022

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 47. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 terhadap Target Renstra 2020-2024

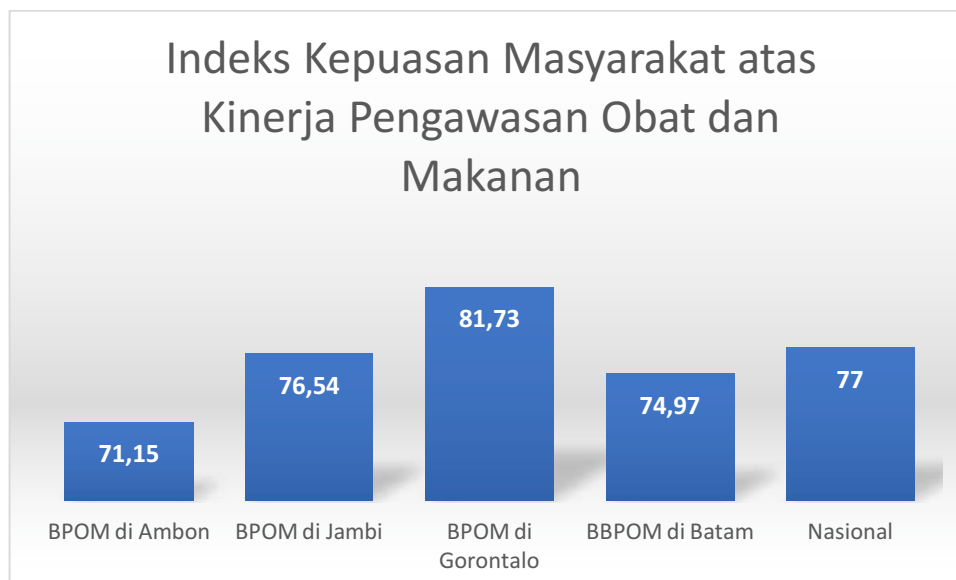
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	91,80	71,15	77,51

Realisasi Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 **belum mencapai** target renstra tahun 2020-2024 sebesar 91,80. Jika realisasi kinerja pada tahun 2022 dihitung terhadap target renstra tersebut, maka capaian kinerjanya sebesar **77,51%** dengan kriteria **Baik**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target akhir Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 48. Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon			BPOM di Jambi			BPOM di Batam			BBPOM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58	71,15	99,40	71,92	76,54	106,43	71,85	74,97	104,34	66,35	81,72	123,17
Target Nasional	77,0											



Berdasarkan tabel dan gambar di atas, realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM di Gorontalo dengan indeks sebesar 81,72 (capaian 123,17 % dari target) dan yang terendah adalah BPOM di Ambon dengan indeks 71,15 (capaian 99,40% dari target) namun masih dalam kriteria **Baik**. Realisasi semua Balai/Balai Besar yang ada di kluster 7 berada di bawah target nasional 77,00 kecuali BPOM di Gorontalo.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Rekomendasi

Indeks Kepuasan masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon pada tahun 2022 sebesar 71,15 termasuk dalam kategori **Cukup Puas** dan belum mencapai target yang ditentukan. Faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator ini antara lain:

1. Belum intensifnya KIE dengan bentuk sosialisasi yang mudah diterima oleh masyarakat

2. Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BPOM Ambon harus ringkas dan menarik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Masih belum optimal dalam publikasi (liputan media massa) terhadap berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pengawasan pengelolaan obat dan makanan (produk kedaluwarsa, tanpa izin edar dan produk ilegal)
4. Konsistensi memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya.

Alternatif solusi telah dilakukan oleh BPOM di Ambon antara lain:

1. Melakukan KIE secara tatap muka kepada masyarakat ke pulau-pulau terluar dengan keterbatasan akses sehingga informasi terkait pengawasan BPOM bisa tersosialisasikan.



Gambar 52. KIE di Desa Tungwatu, Kec, Pulau-Pulau Aru, Kab. Kep. Aru

2. Publikasi berupa konferensi pers hasil pengawasan dan penindakan oleh BPOM di Ambon kepada masyarakat dengan melibatkan media nasional dan lokal baik cetak maupun elektronik melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Maluku.



Gambar 53. Konferensi pers hasil pengawasan BPOM di Ambon

3. Publikasi hasil pengawasan obat dan makanan melalui talkshow di media televisi lokal bersama stakeholder terkait.



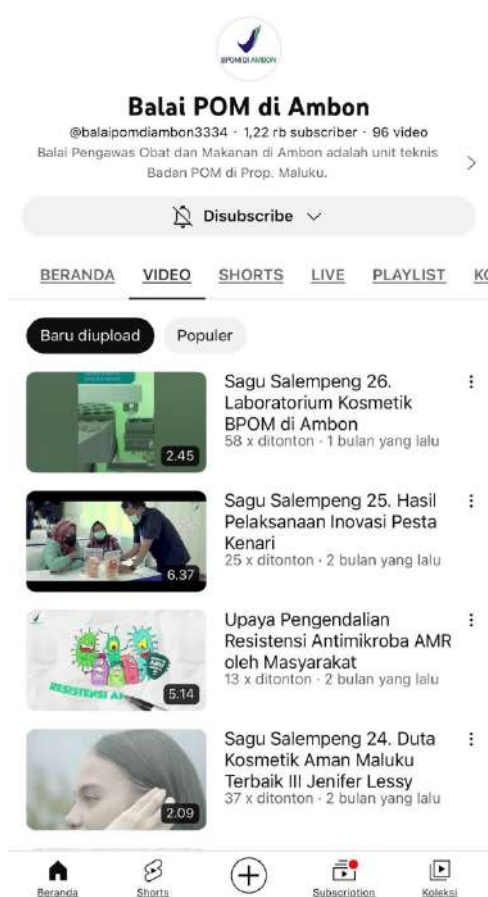
Gambar 54. Talkshow Hasil Pengawasan di TVRI Maluku

4. Aktif melibatkan berbagai stakeholder meliputi dinas terkait, LSM, akademisi, organisasi profesi, LSM, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dalam memberikan masukan terhadap hasil pengawasan obat dan makanan.



Gambar 55. Sosialisasi hasil pengawasan dan menerima masukan stakeholder dalam forum konsultasi public

5. Inovasi Sagu Salempeng yang memberikan informasi secara rutin setiap bulan melalui video edukasi di kanal-kanal resmi BPOM di Ambon (youtube, Instagram, facebook).



Gambar 56. Sosialisasi video edukasi dari inovasi Sagu Salempeng di akun youtube Balai POM di Ambon

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Hal-hal ini kemungkinan mengakibatkan belum optimalnya realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan:

1. Belum optimalnya pelibatan media secara aktif dalam publikasi hasil pengawasan.
2. Intensifikasi KIE dengan bentuk sosialisasi yang mudah diterima oleh masyarakat
3. Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BPOM Ambon harus ringkas dan menarik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Konsistensi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

BPOM di Ambon harus meningkatkan strategi komunikasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan diantaranya melalui:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) harus terus dilakukan baik melalui tatap muka, media ruang, cetak maupun elektronik sehingga informasi dapat menjangkau seluruh masyarakat.
2. Mengkomunikasikan langkah pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui publikasi dan kerjasama dengan media agar masyarakat lebih terinformasi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat.

IKSS 9. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Ambon dilakukan terhadap penerima layanan informasi dan pengaduan serta penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga yang dilakukan oleh Inspektorat Utama. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 49. Nilai Konversi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 50. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM target dan realisasi tahun 2022

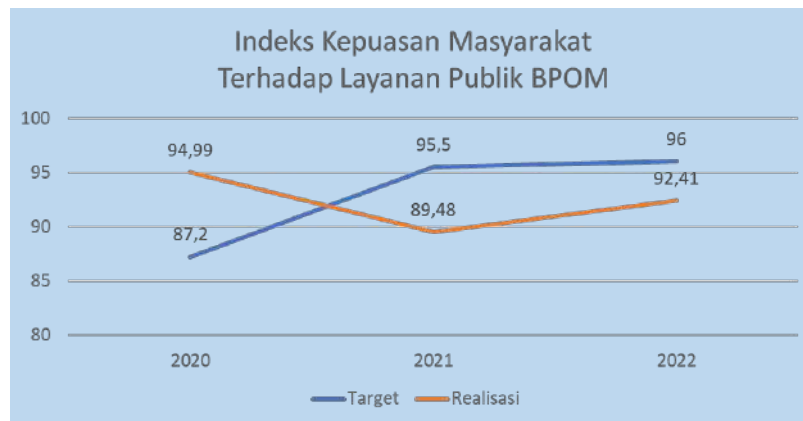
Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s/d Triwulan				Realisasi 2022	Kinerja unit pelayanan	Capaian 2022 (%)	Kriteria Capaian
		I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	-	-	-	96,00	-	-	-	92,41	92,41	A (Sangat Baik)	96,26	Baik

Berdasarkan Tabel 50. diatas, Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 sebesar **92,41** dengan mutu pelayanan **A** “**Sangat Baik**”. Nilai IKM tahun 2022 **naik sebesar 2,93** namun masih dibawah target yang sudah ditentukan sebesar 96,00. Persentase capaian kinerja untuk indikator ini sebesar **96,26 %** dengan kriteria **Baik**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 51. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BPOM	96,00%	92,41%	96,26%	95,50%	89,48%	93,70%	87,20%	94,99%	108,93%



Berdasarkan tabel di atas, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 sebesar 92,41 mengalami kenaikan 2,93 dibandingkan tahun 2021 sebesar 89,48. Namun demikian, indeks kepuasan masyarakat tahun 2022 masih dalam kategori **Sangat Baik**.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024

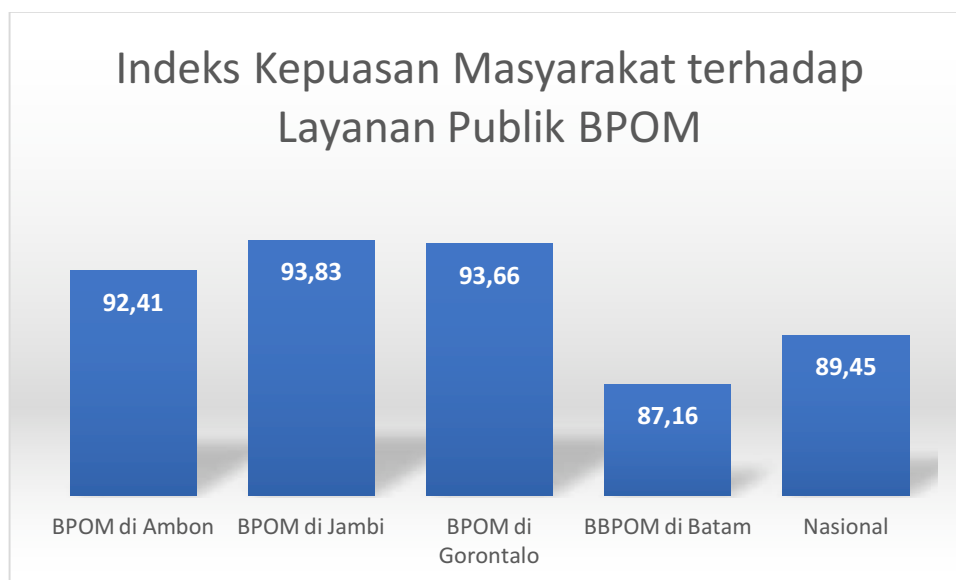
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	97	92,41	96,26

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2022 **belum mencapai** target renstra tahun 2020-2024 sebesar 97. Jika realisasi kinerja pada tahun 2022 dihitung terhadap target renstra tersebut, maka capaian kerjanya sebesar **95,27%** dengan kriteria **Baik**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 53. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BBPOM di Batam	Nasional
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.41	93.83	93.66	87.16	89.45



Berdasarkan tabel di atas BPOM di Jambi memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tertinggi tahun 2022 pada kluster 7. Sedangkan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Ambon **pada posisi di tengah** kisaran realisasi BPOM pada kluster 7. Namun BPOM di Ambon memiliki realisasi **di atas target nasional**.

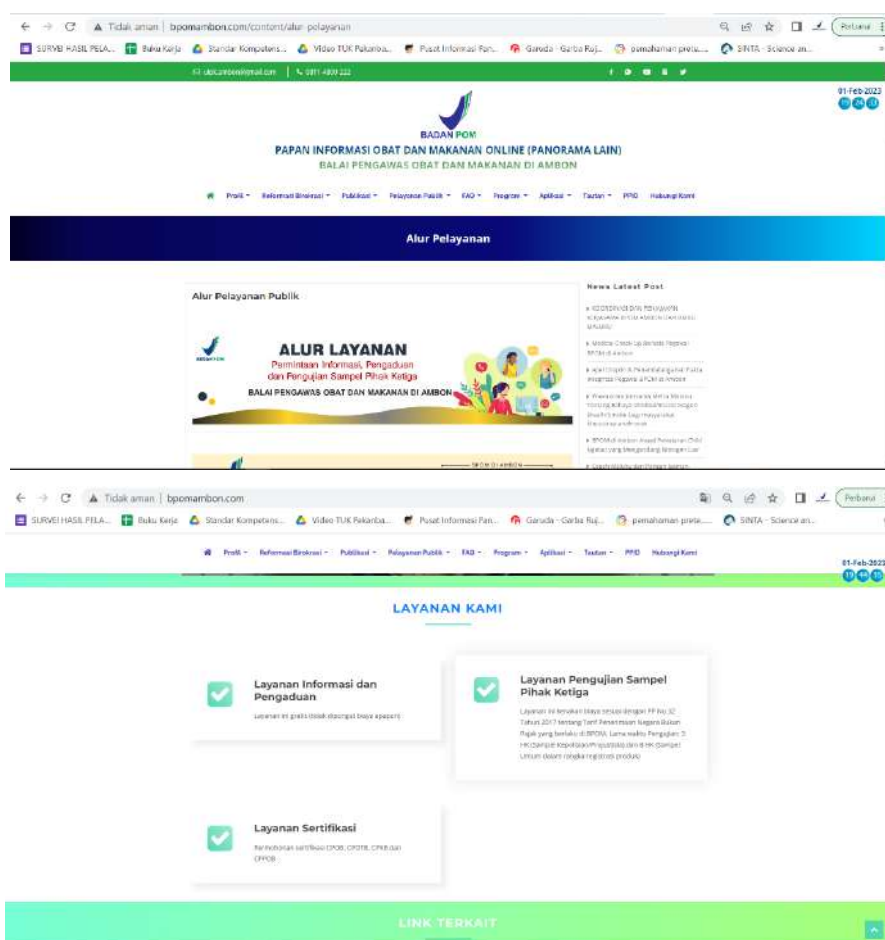
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM di wilayah kerja BPOM di Ambon pada tahun 2022 sebesar **92,41**. Walaupun masih dibawah target yang ditetapkan, namun nilai tersebut termasuk dalam kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**.

Faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator ini adalah terkait pemenuhan sarana dan prasarana layanan sesuai harapan pelanggan serta kesesuaian jasa layanan.

Alternatif solusi telah dilakukan oleh BPOM di Ambon antara lain:

1. Mempublikasikan jenis layanan (Informasi pengaduan dan pengujian) pada leaflet, website dan profil WA bisnis layanan publik mengacu kepada standar pelayanan.



Gambar 57. Informasi jenis dan alur layanan pada website



Gambar 58. Informasi jenis dan alur layanan pada profil WA layanan public

2. Melengkapi sarana prasarana dengan: leaflet informasi, informasi pada Tablet, informasi pada LED/TV, mesin antrian elektronik terintegrasi buku tamu, fasilitas disabilitas, fasilitas anak dan ibu menyusui, fasilitas free wifi, free charging, free minuman/snack
 3. Mempublikasikan bahwa layanan informasi dan pengaduan di BPOM Ambon tidak dipungut biaya (free), baik di leaflet standard layanan, media sosial dan website.
 4. Mempublikasikan biaya pengujian sesuai dengan PP 32 tahun 2017 tentang PNPB di Badan POM baik di leaflet standard layanan, media sosial dan website.
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
1. Inovasi pelayanan publik yang dapat diakses secara online diantaranya Hape Beta (Perkiraan harga pengujian sampel pihak ketiga) dan Lacak POM (Lacak status pengujian sampel pihak ketiga) untuk memudahkan konsumen

mendapatkan informasi tanpa harus datang secara langsung tatap muka dengan petugas.



Gambar 59. Inovasi Hape Beta dan Lacak POM

2. Melaksanakan forum komunikasi publik dalam rangka pelibatan berbagai unsur dalam penyusunan standar layanan dan menampung saran dan masukan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik.



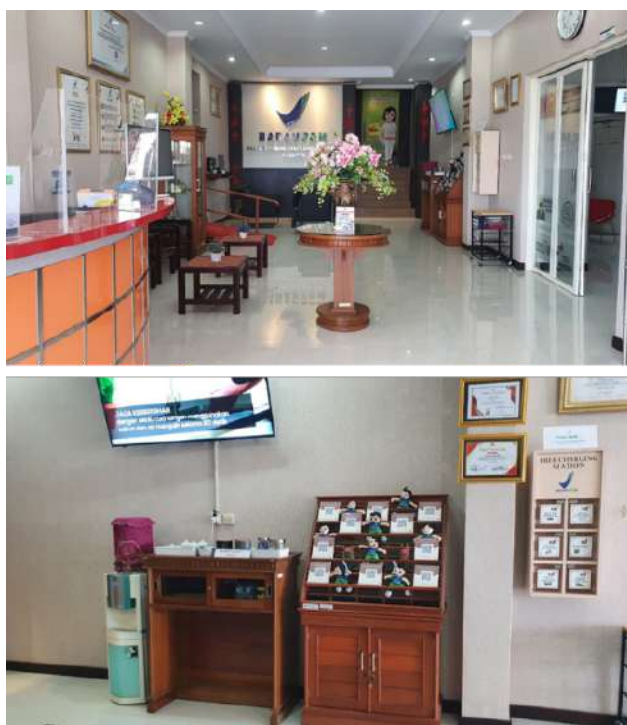
Gambar 60. Forum Konsultasi Publik BPOM di Ambon mengundang lintas sektor terkait pada tanggal 23 Juni 2022

3. BPOM di Ambon telah melaksanakan pelatihan internal petugas pelayanan publik sampai dengan resepsionis, satpam, cleaning service dan supir.



Gambar 61. Pelatihan Internal Service Excellence pada 11 Februari 2022

4. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik BPOM di Ambon, seperti menyediakan ruang pelayanan yang nyaman



Gambar 62. Ruang pelayanan publik yang dilengkapi dengan AC, wifi, snack, minuman gratis dan free charging

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Dari hasil evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM, rekomendasi yang dapat dilakukan agar indeks dapat meningkat di tahun berikutnya sebagai berikut.

1. Rutin melakukan *customer gathering* dengan melibatkan pelanggan pada forum konsultasi publik untuk memberikan masukan bagi perbaikan layanan.
2. Melakukan penyebarluasan informasi non elektronik lebih intensif agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan IT. Salah satunya dengan membagikan brosur, leaflet terkait layanan kepada kantor-kantor pelayanan publik agar mudah diakses masyarakat seperti perpustakaan daerah, kantor pemerintahan dan ritel.



Gambar 63. Penyebaran standing banner Cek KLIK ke kantor pelayanan PTSP Provinsi Maluku dan Ombudsman Perwakilan Maluku

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai POM di Ambon

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik dengan NPS 107,35% (Memenuhi Ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 10. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN DI WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan di Wilayah Kerja BPOM di Ambon = rata2 (persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti / dilaksanakan oleh Balai + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai + % rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / Balai + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai di tahun 2022.

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Tabel 54. Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,04%	Memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari hasil rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat, dan persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Sehingga capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana

produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 telah mencapai 102,04 % dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 55. Perbandingan Realisasi keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM di Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98%	100,00%	102,04%	97,00%	100,00%	103,09%	87,00%	99,63%	114,52%



Gambar 64. Diagram perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian tahun 2020 - 2022

Realisasi pada tahun 2022 dan 2021 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan walaupun mengalami penurunan namun tetap mencapai target dengan kategori “memenuhi ekspektasi”.

3. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM di Ambon

Tabel 56. Perbandingan **Realisasi** Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM di Ambon

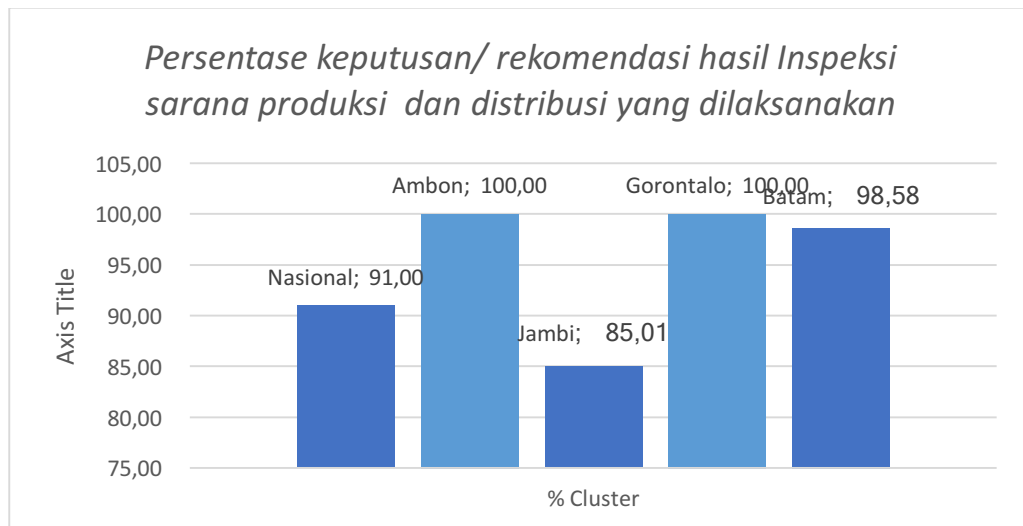
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98,00%	100,0%	102,04%	100%	100,0%	100,0%

Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 dengan kriteria **memenuhi ekspektasi**. Masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tidak mengalami penurunan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Tabel 57. Perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BBPOM di Batam
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	85,01	100,00	98,58
Target Nasional	91,00			



Gambar 65. Diagram Perbandingan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 BPOM di Ambon dan 2 (dua) BPOM cluster telah melewati target Nasional. BPOM di Batam dan BPOM di Jambi masih belum mencapai target Nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu monitoring dan evaluasi yang diperketat setiap minggu.

Capaian indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu **102,04 %** dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”.

Rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang yang dapat dilakukan :

Timeline penyusunan tindak lanjut setelah hasil pengawasan disetujui cukup singkat, sedangkan jumlah fasilitas yang harus melakukan perbaikan dan yang dipantau proses perbaikannya cukup banyak, sehingga perlu mereview kembali prosedur khususnya timeline tindak lanjut hasil pengawasan disesuaikan dengan kondisi dan jumlah fasilitas yang diawasi, dengan mengacu pada pedoman/ aturan yang berlaku.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini adalah mengintensifkan monitoring/follow up terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan yang disusun sesuai dengan timeline

IKSS 11. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Pada tahun 2022 BPOM di Ambon telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 500 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, terdapat 346 sarana/ pelaku usaha/ instansi terkait yang telah memberikan tindak lanjut/feedback. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan **telah berhasil mencapai melebihi target** yang ditetapkan dengan capaian 112,95% dengan **Kategori “ sangat baik ”**.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor)

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Table 58. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022

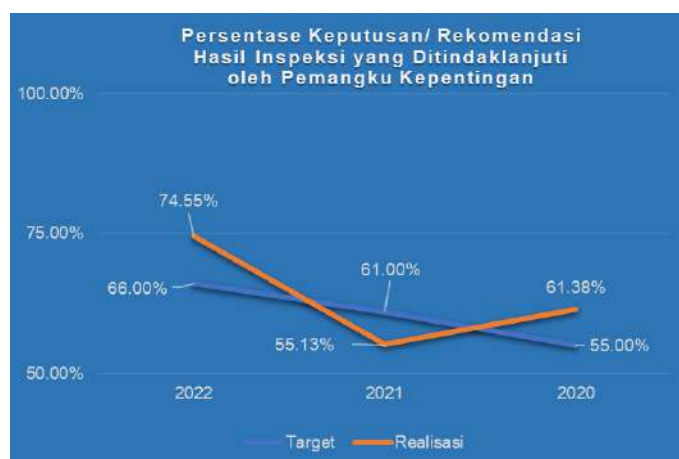
INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	35,96	48,88	69,56	74,55	112,95	memenuhi ekspektasi

Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2022 **telah mencapai 112,95 %** dengan kriteria **“memenuhi ekspektasi”**.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 59. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM di Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00%	74,55%	112,95%	61,00%	55,13%	90,38%	55,00%	61,38%	111,60%



Gambar 66. Diagram perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian tahun 2022, 2021 dan 2020

Realisasi pada tahun 2022 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yang dilaksanakan telah mencapai target dengan kategori “memenuhi ekspektasi” dan mengalami peningkatan dari tahun 2021.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM di Ambon

Tabel 60. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM di Ambon

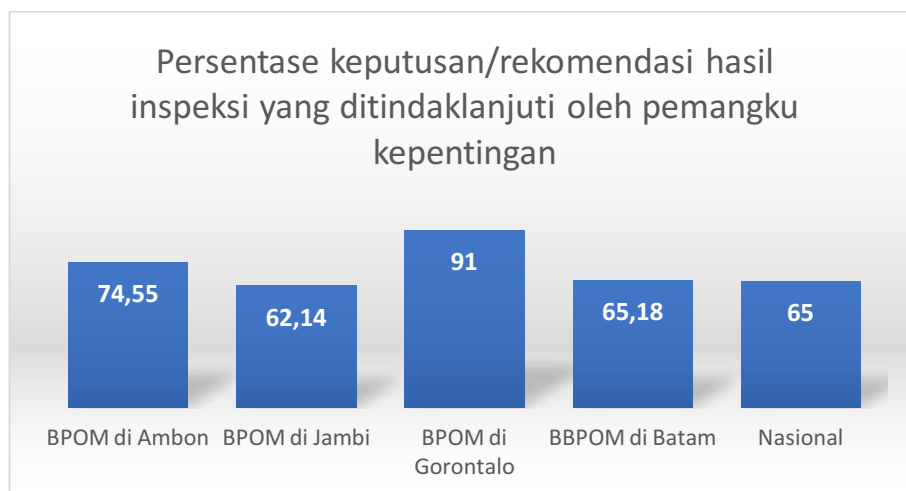
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00%	74,55%	112,95%	75,00%	74,55%	99,4%

Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 **belum memenuhi target** Renstra tahun 2024 karenanya perlu terus dilakukan peningkatan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Tabel 61. Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	74,55	62,14	91,00	65,18
Target Nasional	65,00			



Gambar 67. Diagram Perbandingan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan target BPOM di Ambon telah melebihi target nasional.

Perbandingan dengan balai cluster BPOM di Ambon lebih tinggi kedua setelah BPOM di Gorontalo.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Analisis penyebab keberhasilan indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebagai berikut :

- Perbaikan – perbaikan berdasarkan temuan pada saat pemeriksaan, sebagian besar pelaku usaha sudah patuh mengikuti instruksi dalam merespon surat tindak lanjut yang dikirimkan BPOM di Ambon
- Respon/tindak lanjut dari lintas sektor terhadap surat dari BPOM di Ambon sudah cukup memadai.
- Kendala dari pencapaian target indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha dan lintas sektor tidak adanya peraturan atau sanksi yang mewajibkan setiap sarana obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas BPOM di Ambon.

Rekomendasi perbaikan kinerja untuk peningkatan di tahun depan yaitu peningkatan komunikasi dengan PIC terkait, serta intervensi melalui desk CAPA .

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adapun tindak lanjut yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini adalah mengintensifkan monitoring/follow up terkait rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan Peningkatan komunikasi dengan PIC terkait, serta intervensi melalui desk CAPA.

**IKSS 12. PERSENTASE KEPUTUSAN
PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT
WAKTU DI WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON**

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
4. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK dan
8. Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) / Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya)

1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 62. Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,04%	memenuhi ekspektasi

Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 180 keputusan diperoleh persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah 102.04 % dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 63. Perbandingan Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	96,91%	114,02%	97,00%	90,82%	93,63%	98,00%	100,00%	102,04%



Gambar 68 Diagram Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang diperoleh di tahun 2021 tidak lebih tinggi dari tahun 2020 karena revisi target tahun 2021 yang semula 88% menjadi 97%, namun tahun 2022 tidak ada perubahan target sehingga pengawalan pencapaian indikator lebih terarah dengan capaian 102.04%

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon

Tabel 64. Perbandingan **Realisasi** Kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon

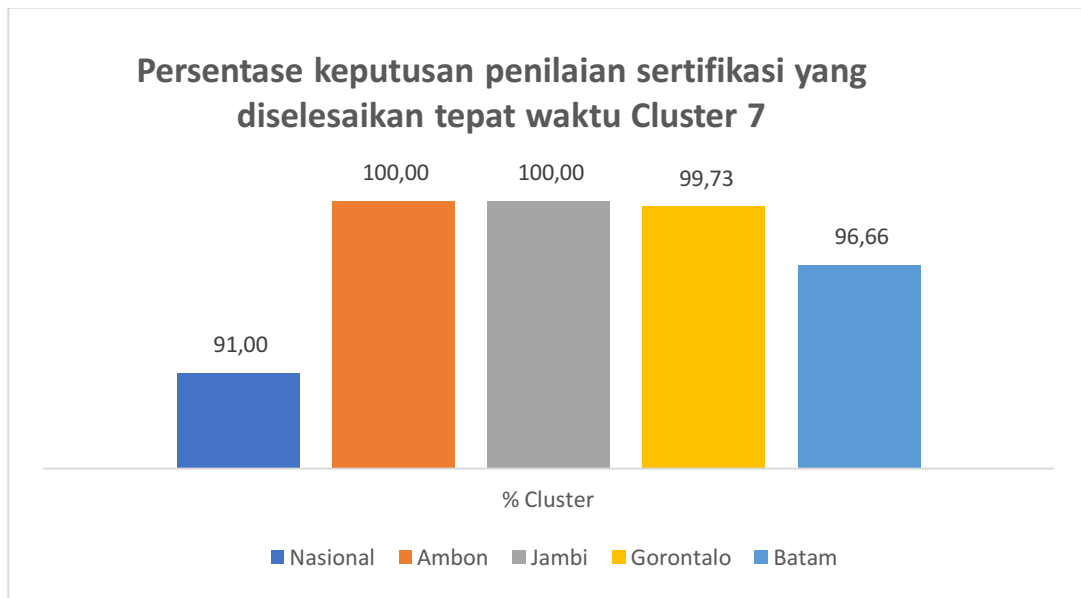
INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET 2024	REALISASI 2022	PERKIRAAN CAPAIAN 2024
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98,00%	100,00%	102,04%	97,00%	100,00%	103,09%

Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2024 yaitu 97.00%. Jika capaian kinerja pada tahun 2022 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kerjanya sebesar 103.09% (memenuhi ekspektasi) dan perlu dipertahankan dengan strategi yang sudah dilakukan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 65. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	99,73	96,66
Target Nasional	91,00			



Gambar 69. Diagram Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang tertinggi adalah BPOM Ambon dan Jambi. Keempat balai sekluster di atas telah mencapai target IKU nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Tabel 66. Hasil Penilaian Sertifikasi Tahun 2022

No.	Sertifikat/ Rekomendasi	Satuan	Jumlah Permohonan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan tepat waktu	% sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu
1.	Rekomendasi/ Sertifikasi CPPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi/ Sertifikat	8	8	100.00
2.	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	172	172	100.00
TOTAL			180	180	100.00

Capaian indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 113.33% dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”. Hasil ini diperoleh dari perbandingan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

sebanyak 8 dari 8 jumlah permohonan penilaian sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB, dan Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 172 dari 172 pengujian.

Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan berusaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission (OSS)
2. Penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB
3. PerBPOM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, merupakan perubahan atas penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan sarana produksi pangan menjadi ijin penerapan CPPOB yang memudahkan pelaku UMKM pangan dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan ijin penerapan CPPOB untuk sarana produksinya sehingga UMKM Pangan tersebut dapat melanjutkan proses registrasi pangan
4. Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai POM di Ambon
5. Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/Desk yang dilakukan secara *onsite* kepada pelaku usaha berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
6. Kredibilitas dan Komitmen SDM Balai POM di Ambon dalam kegiatan kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan di masa mendatang yaitu :

Proses sertifikasi dan registrasi masih dibackup secara menyeluruh oleh petugas Balai, sehingga alokasi waktu untuk pendampingan dan sertifikasi sangat tinggi

Optimalkan peran pemda melalui instansi terkait, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pertemuan/seminar yang diselenggarakan UPT / pusat / lintas sektor

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan indicator kinerja ini :

- a. Selalu melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi capaian pemenuhan timeline pada bulan berjalan. Misalnya untuk pengujian waktu masuk sampel disesuaikan dengan ritme/ flow sampel atau beban bulan berjalan.
- b. Secara berkala melakukan pengecekan terhadap sistem e-sertifikasi.pom.go.id terkait pengajuan sertifikasi CPOTB sehingga jika ada pengajuan akan dapat langsung ditindaklanjuti.
- c. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang belum siap diaudit sejak awal tahun 2022 dan menjadi mitra yang baik untuk konsultasi serta memberi masukan saat ada kesulitan/hambatan dari pelaku usaha tersebut
- d. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Melaksanakan pemeriksaan daring maupun luring dengan waktu yang efektif namun tetap komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk yang didaftarkan.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tindak lanjut berupa optimalkan peran Pemda melalui instansi terkait, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui instansi terkait, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui berbagai pertemuan/ seminar yang diselenggarakan UPT/Pusat/lintas sektor.

**IKSS 13. PERSENTASE SARANA PRODUKSI
OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN DI
WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON**

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjutnya berupa Perbaikan.

2. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- a. Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.
- b. Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major.

3. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

4. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

- ✓ Sarana Produksi Pangan
- ✓ Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- a. Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- b. Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan) / Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Tabel 67. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022

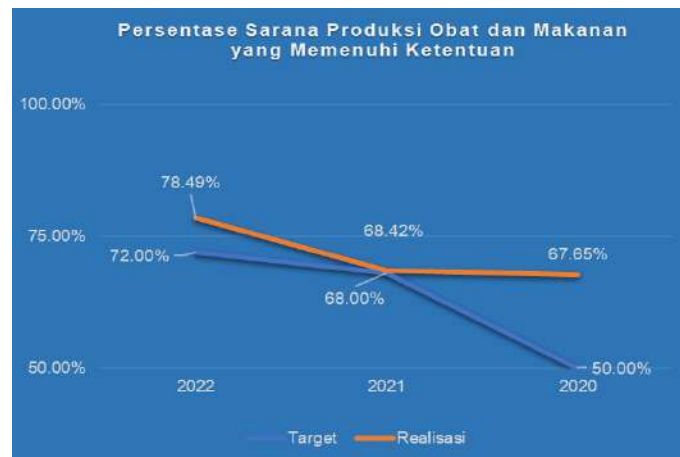
INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	61,90	75,0	77,22	78,49	109,01	memenuhi ekspektasi

Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari persentase hasil perbandingan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di BPOM Ambon yaitu sebanyak 73 sarana, dan target jumlah sarana obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa di Balai POM Ambon yaitu sebanyak 93 sarana. Sehingga capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 telah mencapai **109,01%** dengan kategori “memenuhi ekspektasi”.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 68. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00%	78,49%	109,01%	68,0%	68,42%	100,62%	50,00 %	67,65%	135,30%



Gambar 70. Diagram perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian tahun 2022 tahun 2021 dan tahun 2020

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang diperoleh di tahun 2022 mencapai target dalam Kategori “**memenuhi ekspektasi**” dan mengalami peningkatan dari tahun 2020.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM di Ambon

Tabel 69. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM di Ambon

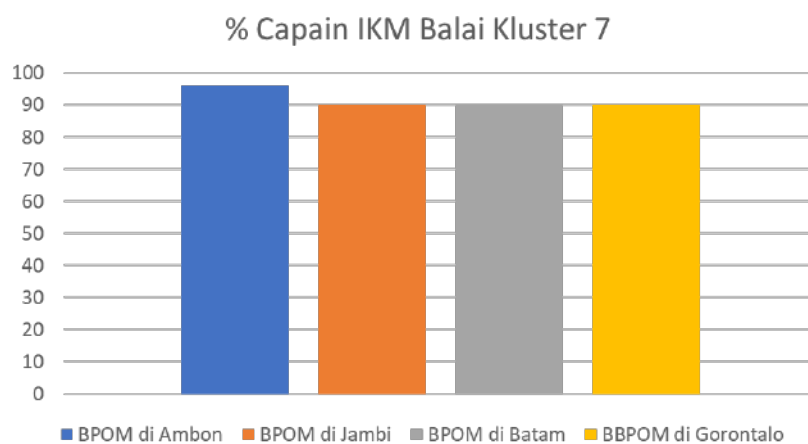
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00%	78,49%	109,01%	80,00%	72,00%	90,00%

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dengan kategori “**belum memenuhi ekspektasi**” sehingga masih diperlukan peningkatan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 70. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan realisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	78,49	63,27	60,42	63,75
Target Nasional	60,00			



Gambar 71. Diagram Persentase capaian IKM Balai Kluster 7

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 cluster yang tertinggi adalah BPOM di Ambon dan melebihi target nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Mikro Obat tradisional, Industri pangan, dan Industri rumah tangga pangan. Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan yaitu 109,01% (capaian penyesuaian 109,01%) dengan kategori “memenuhi ekspektasi”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 71. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

No	Sarana Produksi	Jumlah sarana yang diperiksa	Hasil Pemeriksaan	
			MK	TMK
1	Usaha Mikro Obat Tradisional	20	18	2
2	Usaha Kecil Obat Tradisional	1	1	0
3	Industri rumah tangga pangan	50	39	11
4	Industri pangan	21	14	7
	Total	93	73	20

Rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan :

Sebagian fasilitas produksi pangan olahan (UMKM Pangan) belum menerapkan CPOB sesuai ketentuan dan belum menerapkan pelabelan sesuai ketentuan karenanya diperlukan program peningkatan pemahaman, pembinaan, pendampingan bagi fasilitas produksi pangan (UMKM pangan) dalam pemenuhan persyaratan CPPOB

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

- Tindak lanjut hasil evaluasi akan tetap dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja dengan melakukan KIE kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait Cara Produksi yang Baik
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) harus tetap dilaksanakan secara berkala, sehingga memudahkan koordinasi dengan lintas sektor yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perikanan, dan DPMPTSP di Provinsi Maluku. Kegiatan ini diharapkan akan tetap mempertahankan kinerja yang telah dicapai karena sudah terjadi upaya sinkronisasi kinerja antar lintas sektor sehingga pengawasan obat dan makanan di Maluku lebih intensif dan komprehensif.
- Pelaku usaha sudah mendapat pendampingan/binaan dari regulator terkait aspek cara produksi yang baik dan implementasinya

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan peningkatan pemahaman, pembinaan, pendampingan bagi fasilitas produksi pangan (khususnya UMKM Pangan) dalam pemenuhan persyaratan CPPOB

**IKSS 14. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI
OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN**

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebagai berikut :

1. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).
2. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:
 - 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
 - 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
 - 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
 - 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat dan makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa) x 100%.

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Tabel 72. Realisasi Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022(%)	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	75,33	77,98	73,93	76,01	100,01	memenuhi ekspektasi

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Balai POM Ambon yaitu sebanyak 792 sarana, dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa di Balai POM Ambon yaitu sebanyak 1042 sarana. Sehingga capaian Persentase sarana

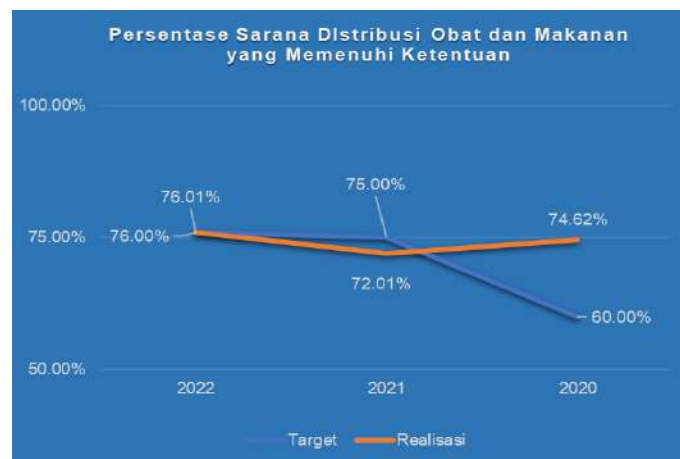
distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2022 telah mencapai 100,01%.

2. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

Tabel 73. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022, 2021 dan 2020

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2020	CAPAIAN
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	76,01%	100,01%	75,00%	72,01%	96,01%	60,00%	74,62%	124,37%

Realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diperoleh di tahun 2022 yaitu 100,01% mengalami kenaikan dibanding dengan realisasi di tahun 2021 dan 2020 dan menunjukkan tren kenaikan dengan capaian yang diperoleh pada tahun 2022 termasuk dalam kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”.



Gambar 72. Grafik Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 74. Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

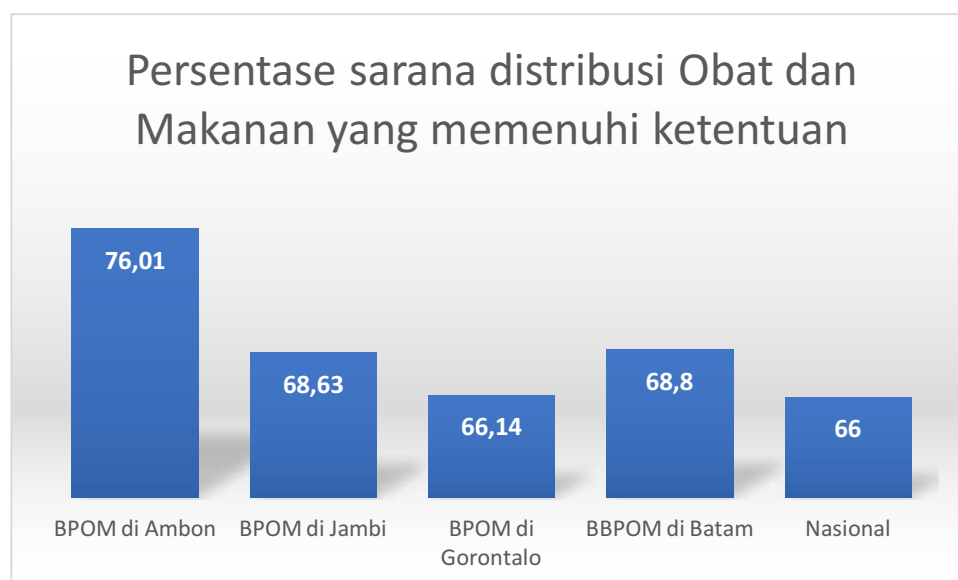
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022 THD RENSTRA
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76,01	100,01%	80,00	76,01	95,01%

Realisasi Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2022 **masih belum mencapai** target Renstra tahun 2024 sehingga dengan demikian masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 dapat tercapai dan tidak mengalami penurunan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 75. Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan realisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BBPOM di Batam
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,01	68,63	66,14	68,00
Target Nasional	66,00			



Gambar 73. Diagram Perbandingan Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 dengan realisasi Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Realisasi kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2022 BPOM Ambon merupakan unit dengan realisasi tertinggi dan keempat Balai telah melampaui target nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Keberhasilan capaian kinerja sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan kriteria Memenuhi Ekspektasi didukung oleh antara lain :

- a) Konsistensi penerapan aturan dan standar khususnya pada fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang, sehingga cukup banyak temuan/pelanggaran, khususnya terkait perizinan, ketenagaan, dan komoditi tertentu yang pengelolaannya khusus seperti NPP dan antibiotik
- b) Peningkatan pendampingan, pembinaan, dan kompetensi bagi penanggungjawab, serta koordinasi secara kontinyu dengan instansi terkait, dan pelaksanaan kolaborasi pengawasan
- c) Tindak lanjut terhadap masih terdapatnya fasilitas distribusi yang belum konsisten menerapkan aturan dan standar, sehingga terjadi potensi keberulangan temuan, khususnya mengenai pelayanan obat keras termasuk antibiotika tanpa resep, dan pemenuhan legalitas sarana dan PJ melalui perizinan
- d) Keberhasilan inspektur melakukan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan, juga pendampingan bagi pelaku usaha dalam melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan pemeriksaan, sehingga pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan obat dan makanan semakin meningkat.
- e) Pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian terhadap PBF, Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Klinik dan Toko Obat dalam rangka pemantauan pengelolaan obat, melalui pendampingan dan pembinaan maka sebagian besar hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan.

- f) Pemeriksaan terhadap sarana peredaran produk pangan olahan dalam rangka memastikan cara peredaran pangan olahan yang baik Sebagian besar hasil pemeriksaan memenuhi ketentuan.
- g) Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Dinas Kesehatan dan organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia, Persatuan Ahli Farmasi Indonesia, stake holder lainnya) sehingga pengawasan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian lebih optimal.

Rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan antara lain :

Mengoptimalkan intervensi tindakan pencegahan melalui CAPA, sehingga meminimalkan potensi keberulangan temuan, mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan, serta peningkatan advokasi dan koordinasi pada tahun 2023 untuk meminimalkan pelayanan obat keras dan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan capaian indicator ini adalah :

- a. Memberikan pembinaan dan pendampingan intensif saat pemeriksaan dan saat penyerahan CAPA terhadap pelaku usaha apotek dan tenaga kefarmasiannya untuk mematuhi peraturan pelayanan kefarmasian di apotek dari mulai aspek pengadaan, penyimpanan, penerimaan, penyerahan, pelaporan dan dokumentasi.
- b. Kolaborasi pengawasan yang dilakukan serta komitmen tindak lanjut hasil pengawasan bersama pemangku kepentingan
- c. Bimtek pengelolaan ONPP sesuai SPK dan Desk CAPA secara kontinyu
- d. KIE keamanan dan mutu obat dan makanan dilakukan dengan menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang belum terpapar.
- e. Melayani konsultasi/pemberian informasi terkait produk obat dan makanan beserta peraturannya via whatsapp/email untuk mempermudah akses pelaku usaha dalam mendapatkan informasi/ketentuan dalam peredaran obat dan makanan

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tindak lanjut yaitu mengoptimalkan intervensi tindakan pencegahan melalui CAPA, sehingga meminimalkan potensi keberulangan temuan, mengoptimalkan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai ketentuan, serta peningkatan advokasi dan koordinasi pada tahun 2023 untuk meminimalkan pelayanan obat keras dan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan.

IKSS 15. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan 6 Aspek yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan; (2) Profesionalisme SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); (5) Konsultasi dan Pengaduan dan (6) Inovasi Pelayanan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM Tahun 2022. Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik seperti pada tabel berikut.

Tabel 76. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik

Rentang Nilai	Kategori	Makna
0 - 1,00	F	Gagal (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
1,51 – 2,00	D	Buruk (<i>Proses Pembinaan</i>)
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 77. Target dan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s/d Triwulan				Realisasi 2022	Kinerja unit pelayanan	Capaian 2022 (%)	Kriteria Capaian
		I	II	III	IV	I	II	III	IV				
Indeks Pelayanan Publik	4,45	-	-	-	4,45	-	-	-	4,38	4,38	A (Sangat Baik)	98,43	Baik

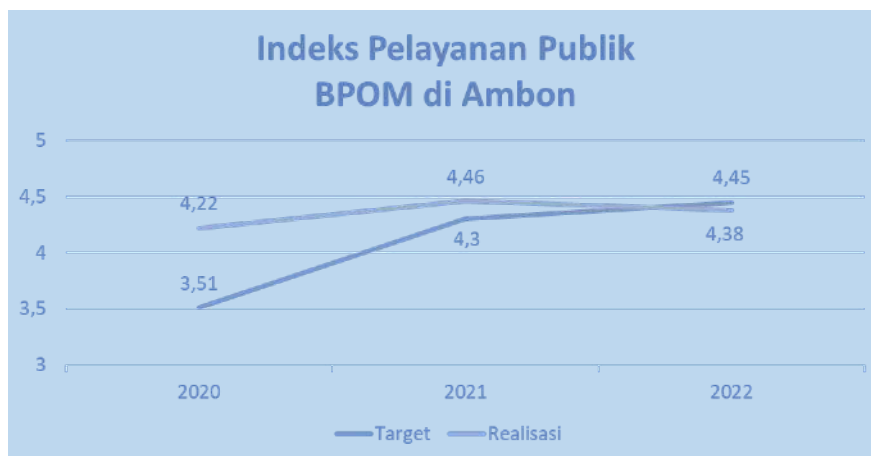
Berdasarkan diatas, Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon tahun 2022 sebesar **4,38** dengan kategori **“Sangat Baik”**. Nilai tersebut **dibawah target** tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,45. Atas perolehan nilai tersebut, capaian indikator pelayanan publik sebesar **98,43%** dengan kategori **“Baik”**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 78. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
2020	3,51	4,22	120,23	Tidak dapat disimpulkan
2021	4,30	4,46	103,72	Baik
2022	4,45	4,38	98,43	Baik

Berdasarkan tabel di atas, Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon pada tahun 2022 adalah 4,38 **menurun** dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan sebesar 0,08 tampak pada gambar di bawah ini.



Gambar 74.. Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022 dan 2020-2021

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020-2024

Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Indeks Pelayanan publik	4,55	4,38	96,26

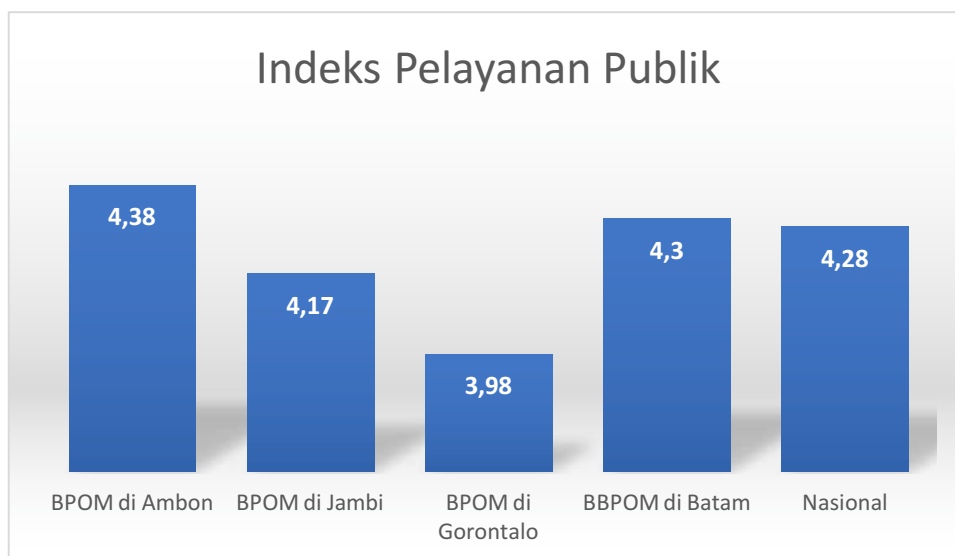
Realisasi Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2020-2024 sebesar 4,55 namun terus meningkat setiap tahunnya.

Jika dihitung dari target renstra tersebut maka capaian kinerja tahun 2022 sebesar 96,26% dengan kriteria Baik. Agar dapat memenuhi target renstra tahun 2024 perlu mengoptimalkan kinerja pada tahun berikutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Tabel 80. Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon			BPOM di Jambi			BPOM di Batam			BBPOM di Gorontalo		
	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian
Indeks Pelayanan Publik	4,45	4,38	98,43	4,01	4,17	103,99	4,30	4,30	100,00	4,30	3,98	92,56
Target Nasional	4,28											



Gambar 75. Diagram Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon tahun 2022 **tertinggi** dibandingkan dengan BPOM/BBPOM lain yang sejenis/setara pada kluster 7. BPOM di Ambon juga memiliki realisasi Indeks Pelayanan Publik **diatas target nasional**.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Rekomendasi

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini adalah dengan menggunakan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM, diantaranya:

1. Penyusunan standar pelayanan publik mengikutsertakan masyarakat yang mewakili berbagai unsur dan profesi: (a) tokoh masyarakat; (b) akademisi; (c) dunia usaha; (d) LSM serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.



Gambar 76. Forum Konsultasi Publik

2. Inovasi Pesta Kenari (Pendampingan Penerbitan SPP-IRT dalam waktu sehari) berkontribusi terhadap peningkatan indeks pelayanan publik yang telah berhasil melakukan pendampingan terhadap 122 IRTP dan menerbitkan 395 nomor PIRT di 9 kabupaten/ kota di Provinsi Maluku sesuai wilayah pengawasan BPOM di Ambon.



Gambar 77. Pelaksanaan Inovasi Pesta Kenari di Kab. Buru

3. Sarana dan prasarana pelayanan publik telah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan seperti tersedianya tempat parkir yang dilengkapi dengan CCTV dan ada perlakuan khusus bagi kelompok rentan, sistem antrian secara elektronik yang dibagi setiap jenis layanan dan dipandu melalui pengeras suara.
 4. Pengelolaan, penyimpanan dan penyampaian informasi dari petugas layanan kepada masyarakat dalam bentuk lisan, tulisan, gambar sudah disajikan secara manual maupun elektronik.
 5. Adanya maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BPOM di Ambon yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat
 6. Melakukan survey kepuasan atas pelayanan publik yang diterima sebagai masukan peningkatan kualitas layanan publik BPOM Ambon. Hasil ini juga dijadikan dasar dalam menentukan reward and punishment untuk SDM. Hasil survey digunakan sebagai salah satu penilaian untuk penentuan program inovasi pegawai manise/maniso.
- 6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**
1. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik dan ruang layanan publik untuk menyediakan ruang pelayanan publik yang nyaman.



Gambar 78. Ruang pelayanan publik

2. BPOM di Ambon telah melakukan sosialisasi standar pelayanan publik dengan berbagai bentuk media seperti cetak, online maupun media luar ruang



Gambar 79. Sosialisasi maklumat dan standar pelayanan melalui media luar ruang

3. Informasi non elektronik berupa poster/leaflet/bahan cetak lain yang berisi profil penyelenggara didokumentasikan dan dipublikasikan di area ruang

pelayanan, perpustakaan daerah dan kantor pemerintahan yang lain dan didistribusikan ke stakeholder.



Gambar 80. Pendistribusian informasi non elektronik berupa leaflet produk layanan, standar pelayanan publik BPOM di Ambon kepada stakeholder

- BPOM di Ambon telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik untuk menampung saran dan masukan dari masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha LSM dan Dinas terkait.



Gambar 81. Forum Konsultasi Publik Tahun 2022

- Inovasi BPOM di Ambon yang terkait langsung dengan pelayanan masyarakat diantaranya Hape Beta untuk mengetahui harga pengujian sampel dan persyaratan sampelnya. Inovasi Lacak POM untuk melakukan pengecekan status pengujian sampel yang diujikan ke BPOM di Ambon.



Gambar 82. Inovasi Hape Beta dan Lacak POM

- BPOM Ambon menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk SDM pemberi layanan publik. Dengan survey dan tindak lanjut reward and punishment yang diberikan diharapkan SDM pemberi layanan publik dapat berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Dari hasil evaluasi terhadap Indeks Pelayanan Publik BPOM di Ambon, rekomendasi yang dapat dilakukan agar indeks dapat meningkat di tahun berikutnya sebagai berikut

- Prosedur pelayanan dapat ditampilkan dalam bentuk infografis agar pelanggan dapat memahami dengan jelas
- Perlu publikasi standar pelayanan melalui media elektronik dan non elektronik.
- Membuat inovasi terkait pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat/pelanggan dilengkapi laporan pelaksanaan inovasi.

**IKSS 16. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI
STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU
PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK**

Skala UMKM adalah usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal lima miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha UMKM di wilayah kerja Balai POM di Ambon banyak bergerak pada komoditi pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik. UMKM pada bidang obat tradisional mencakup Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yaitu sarana yang belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I maupun yang sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II. Sementara itu UMKM kosmetik yang tersedia saat ini yaitu sarana kosmetik golongan B

Kriteria UMKM untuk dilakukan pendampingan yaitu

- a. UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- b. UMKM OT yaitu UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, UMKM memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (startup), UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap dan UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- c. UMKM Kosmetik yaitu Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha dan Industri kosmetik yang belum memiliki sertifikasi CPKB dan notifikasi kosmetik

1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 81. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00%	97.78%	126.99%

Realisasi yang tinggi sebesar 97.78% menyebabkan capaian terhadap target menjadi tidak dapat disimpulkan. Antusias pelaku usaha untuk memperoleh legalitas usaha menyebabkan tingginya realisasi yang diperoleh Indikator ini, sementara itu BPOM di Ambon sangat berkomitmen mendukung dan memberikan pendampingan kepada pelaku usaha.

INDIKATOR	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	IKSS ini menjad indikator SSI mulai tahun 2022	IKSS ini menjjadi indikator SSI mulai tahun 2022	77%	97,78%	126,99%

Tabel 82. Perbandingan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2020 dengan tahun 2021 dan 2022 BPOM Ambon

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator ini tidak tersedia di tahun 2020 dan 2021, indikator ini tersedia pada tahun 2022. Komitmen petugas BPOM di Ambon dan kepatuhan pelaku usaha dalam memperoleh legalitas usaha berdampak pada tingginya realisasi yang diperoleh yaitu sebesar 126.99%

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon

Tabel 83. Perbandingan **Realisasi** Kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2023 dan 2024 BPOM Ambon

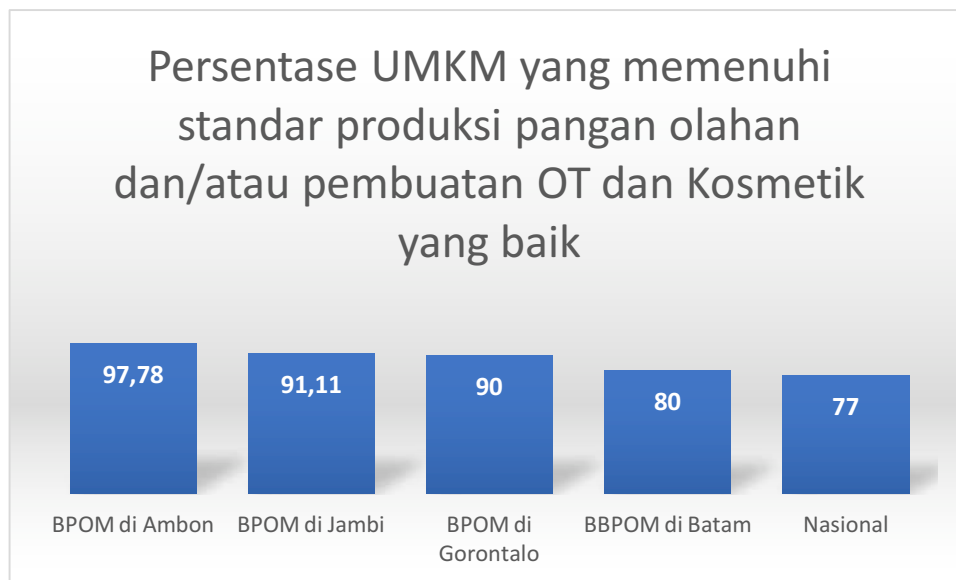
INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023			TAHUN 2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGE T 2023	REALISASI 2022	PERKIRAAN CAPAIAN 2023	TARGET 2024	REALISASI 2022	PERKIRAAN CAPAIAN 2024
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	97,78%	126,99%	79,00%	97,78%	123,77%	81,00%	97,78%	120,72%

Tabel diatas menunjukkan realisasi pada tahun 2023 dan 2024 berada pada capaian 123,77% dan 120,72%. Peningkatan target yang kurang signifikan menyebabkan capaian masuk kategori tidak dapat disimpulkan.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 84. Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	97,78	91,11	90,00	80,00
	77,00			



Gambar 83. Diagram Perbandingan Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan capaian nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sangat tinggi di setiap Balai dengan capaian **tertinggi adalah BPOM di Ambon** kemudian diikuti oleh BPOM Jambi, BPOM di Batam dan BPOM di Gorontalo. Keempat Balai sekluster di atas telah melampaui capaian target IKU nasional.

5. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 126.99% dengan kriteria **“Tidak dapat disimpulkan”**.

Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja ini.

1. Komitmen tinggi dari para pelaku UMK pangan olahan yang menjadi target pendampingan dalam upaya memenuhi persyaratan CPPOB.
2. Seleksi awal dalam penetapan target UMK pangan olahan yang didampingi diperketat dengan memilih yang memiliki komitmen tinggi baik dari sisi pembiayaan sarana produksi dan progres untuk naik kelas.
3. Penekanan parameter pemeriksaan sarana lebih menitikberatkan pada aspek hygiene sanitasi dan kritis terhadap keamanan pangan
4. Kredibilitas dan Komitmen SDM Balai POM di Ambon dalam kegiatan pendampingan sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini :

- a. Monitoring dan evaluasi terhadap progress UMKM yang didampingi secara berkala
- b. Pendampingan dan pengawalan bagi UMKM yang sedang menindaklanjuti CAPA dan persiapan menuju e-sertifikasi
- c. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang belum siap diaudit sejak awal tahun 2022 dan menjadi mitra yang baik untuk konsultasi serta memberi masukan saat ada kesulitan/hambatan dari pelaku usaha tersebut
- d. Melakukan follow up terhadap pelaku usaha yang dalam jangka waktu lama belum memberikan feedback CAPA dan memberikan ruang untuk berkonsultasi terhadap kesulitan/kendala yang dihadapi.
- e. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada UMKM dengan layanan konsultasi yang intensif secara langsung maupun tidak langsung.

- f. Melaksanakan pemeriksaan daring maupun luring dengan waktu yang efektif namun tetap komprehensif dengan mempertimbangkan tingkat risiko produk yang didaftarkan.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya yaitu: Peningkatan komitmen pelaku usaha dalam pendampingan proses perizinan

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas KIE Obat dan makanan dengan NPS 99.57% (Belum memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis V pada tahun 2022 diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 17. TINGKAT EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) OBAT DAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE

- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Bobot indikator tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan ditetapkan seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 85. Bobot Indikator Efektivitas KIE Obat dan Makanan

No	Kriteria	Keterangan	Bobot
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM.

Kategori penilaian yang digunakan mulai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 86. Interpretasi Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65.00	Kurang Efektif
65.01 – 75.00	Cukup Efektif
75.01 – 85.00	Efektif
85.01 – 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 1000	Sangat Efektif Sekali

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 87. Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2022

INDIKATOR	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Kategori Indeks Efektivitas KIE	capaian
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,40	93,76	98,28	Sangat Efektif	belum memenuhi ekspektasi

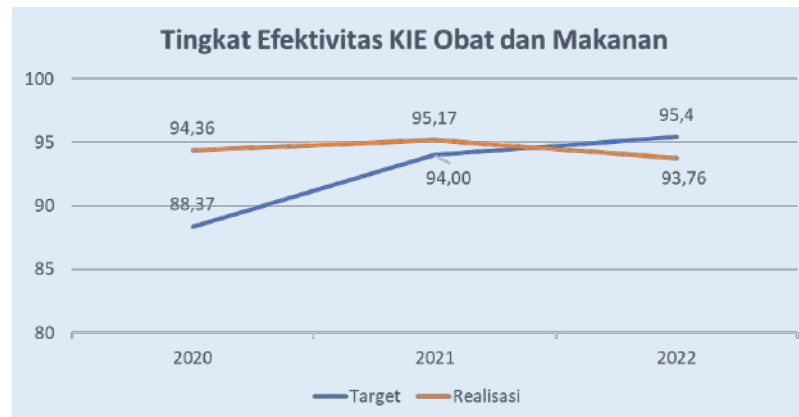
Berdasarkan tabel diatas, Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 sebesar **93,76 dibawah target** yang telah ditetapkan yaitu sebesar 95,40. Nilai efektivitas tersebut dapat diinterpretasikan bahwa KIE yang dilakukan “**Sangat Efektif**”. Atas perolehan nilai tersebut, capaian indikator pelayanan publik sebesar **98,28 %** dengan kategori “**belum memenuhi ekspektasi**”.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 88. Perbandingan Indeks Efektivitas KIE BPOM di Ambon Tahun 2022 dengan Tahun 2020-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
2020	88,37	94,36	106,78	Baik
2021	94,00	95,17	101,24	Baik
2022	95,40	93,76	98,28	belum memenuhi ekpektasi

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2022 **lebih rendah** dibandingkan tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 1,41 seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar 84. Tingkat efektivitas KIE BPOM di Ambon Tahun 2020-2022

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 89. Perbandingan Realisasi Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Terhadap Target renstra 2020-2024

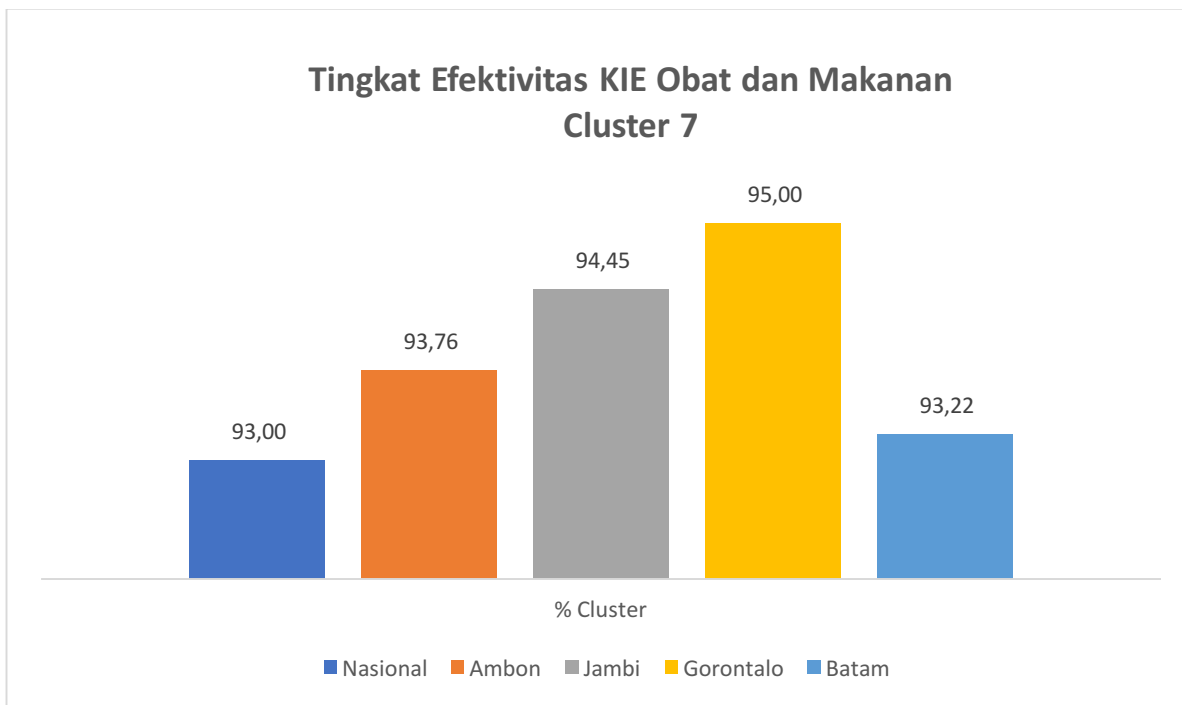
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	98,3	93,76	95,38

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan **belum mencapai** target Renstra tahun 2020-2024 sebesar 98,3. Jika dihitung dari target renstra tersebut, maka capaian tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2022 sebesar **95,38%** dengan kriteria **Baik**. Agar dapat memenuhi target renstra tahun 2024 perlu mengoptimalkan kinerja pada tahun berikutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 90. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Batam	BBPOM di Gorontalo
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,76	94,45	93,22	95
Target Nasional				93



Gambar 85. Diagram Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan Kluster 7

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon tahun 2022 masih kalah dibandingkan dengan BPOM/BBPOM lain yang sejenis/setara pada kluster 7. Namun, realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BPOM di Ambon diatas target nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Rekomendasi

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini yaitu:

1. KIE menggunakan media elektronik berupa Iklan Layanan Masyarakat (ILM) di media televisi dan radio dengan mengangkat isu-isu terkini diantaranya Sirup aman EG/DEG, ILM penarikan mie instan Indonesia di Hongkong, ILM OT BKO, ILM bahaya kosmetika, ILM Chikibul dan lain-lain.
2. Optimalisasi KIE bersama SAKA POM diantaranya pelibatan pramuka dalam pendampingan pelaku usaha UMKM



Gambar 86. Keterlibatan Pramuka dalam kegiatan KIE BPOM di Ambon

3. Bekerja sama dengan media atau paguyuban yang memiliki jangkauan luas untuk meningkatkan amplifikasi penyebaran informasi tentang obat dan makanan.



Gambar 87. Pelibatan media untuk menyebarkan informasi dalam bentuk konferensi pers.



Gambar 88. KIE bersama Dharma Wanita Kab. Buru

4. Pengembangan kompetensi petugas dalam kegiatan KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh komunitas dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

1. Optimalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama Lain (papan Informasi Obat dan Makanan Online) sebagai media informasi dan publikasi.



Gambar 89. Tampilan Panorama Lain

2. KIE obat dan makanan melalui media elektronik seperti radio dan televisi untuk menjangkau masyarakat di luar daerah ibu kota provinsi.



Gambar 90. KIE dalam bentuk Talkshow Televisi bersama lintas sektor terkait di TVRI Maluku

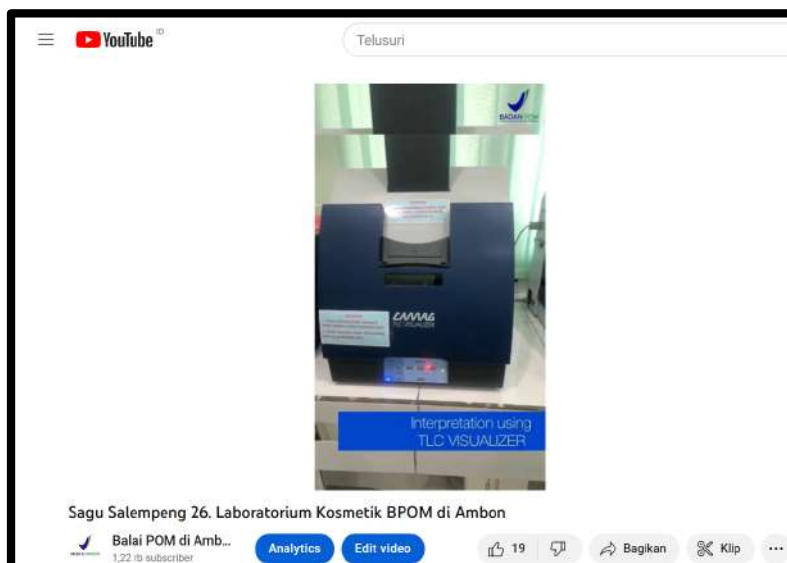
3. Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan KIE daring dan luring yang menjangkau 1612 peserta dari target 1600 peserta..



Gambar 91. Kegiatan KIE bersama organisasi kemasyarakatan

4. KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube, salah satunya dengan Inovasi program AoC Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu Sharing Pengalaman dan Pengetahuan). Tahun 2022, BPOM di Ambon telah melaksanakan penyebaran informasi

obat dan makanan melalui media sosial sebanyak 713 konten, 39 layanan media cetak dan elektronik. Untuk inovasi Sagu Salempeng telah memproduksi 14 video sepanjang tahun 2022.



Gambar 92. Inovasi Sagu Salempeng yang dapat diakses melalui Kanal Youtube dan media sosial lainnya

5. KIE yang dilakukan sesuai dengan kondisi/musim, misalnya pada saat bulan ramadhan dilakukan KIE tips memilih takjil yang aman kepada penjual dan pembeli takjil di lokasi-lokasi spot penjualan takjil.



Gambar 93. KIE Keamanan Pangan di bulan Ramadhan Tahun 2022

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Dari hasil evaluasi terhadap Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, dimana nilai terendah pada minat masyarakat dengan nilai 86,05. Sehingga rekomendasi yang dapat dilakukan agar indeks dapat meningkat di tahun berikutnya adalah memahami minat masyarakat menangkap isu terkini di masyarakat.

IKSS 18. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK USIA SEKOLAH (PJAS) AMAN

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan pengelola kantin sekolah sebagai kader keamanan pangan sekolah. Selain itu dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

Tahapan intervensi keamanan PJAS yaitu (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, (3) Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, (4) Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah, dan (5) Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 91. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2022

INDIKATOR	TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN (%)	capaian
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	56	56	100	memenuhi ekpektasi

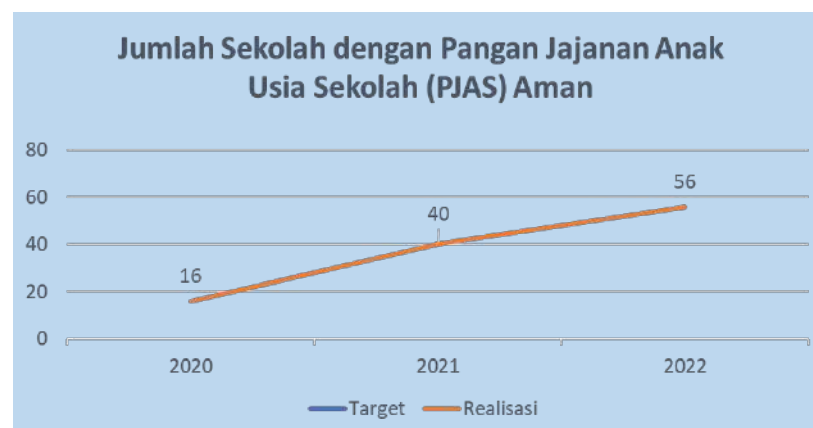
Sesuai dengan tabel di atas, target yang ditetapkan pada indikator Jumlah sekolah dengan PJAS aman kumulatif sampai tahun 2022 sebanyak 56 sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman tahun 2022 sebanyak 16 sekolah **telah berhasil mencapai target** dengan persentase capaian kinerja **100%** kriteria **memenuhi ekspektasi**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 92. Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
2020	16	16	100	Baik
2021	40	40	100	Baik
2022	56	56	100	Baik

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2022 maupun tahun sebelumnya mencapai target 100% dengan kriteria Baik.



Gambar 94. Grafik Realisasi PJAS Aman BPOM di Ambon Tahun 2020-2022

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Jumlah Sekolah dengan PJAS Aman Terhadap Target renstra 2020-2024

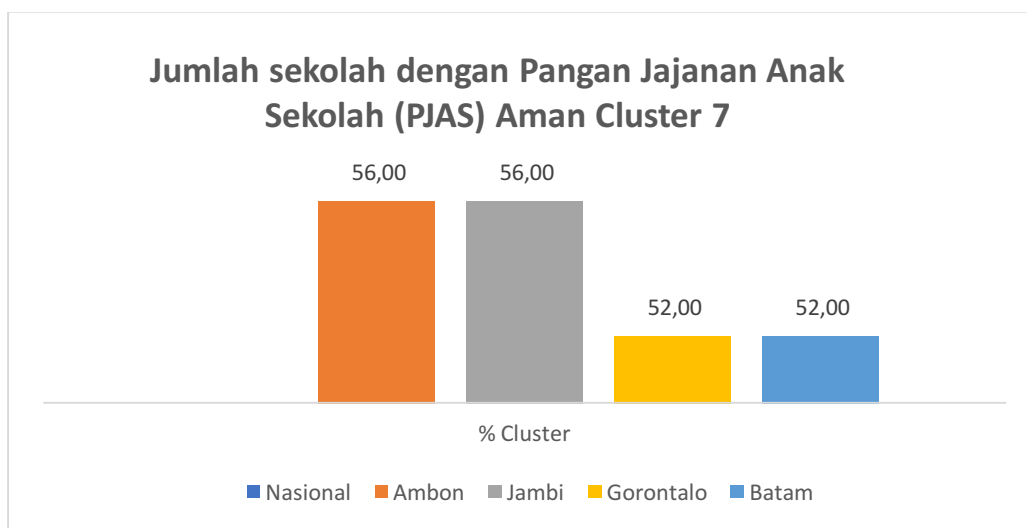
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	88	56	63,64

Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman **belum mencapai** target Renstra tahun 2020-2024 sebesar 88 sekolah namun terus meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2020 s/d 2022. Jika dihitung dari target renstra tersebut maka capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman tahun 2022 sebesar **63,64%** dengan kriteria **Kurang**. Agar dapat memenuhi target renstra tahun 2024 perlu mengoptimalkan jumlah sekolah pada tahun berikutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Capaian Nasional

Tabel 93. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Batam	BBPOM di Gorontalo
Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman	56	56	52	52
Capaian Kinerja (%)	100	100	100	100
Target Nasional				2010



Gambar 95. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah Sekolah dengan PJAS aman BPOM di Ambon sama dengan BPOM lain dengan persentase capaian kinerjanya 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Rekomendasi

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu

1. Komitmen yang tinggi dari kepala sekolah beserta jajarannya setelah dilakukan audiensi dan advokasi PJAS
2. Peran serta lintas sektor yang mendukung penuh program Intervensi Keamanan PJAS



Gambar 96. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam kesuksesan intervensi PJAS Aman tahun 2022

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

1. Pelaksanaan Advokasi Lintas Sektor Program Intervensi Keamanan PJAS



Gambar 97. Advokasi program nasional di Kabupaten Buru

2. Pelaksanaan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan



Gambar 98. Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Buru Selatan

3. Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah



Gambar 99. Monev Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

4. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman mulai dari intervensi audit sarana dan prasarana kantin sekolah, *self assessment* yang dilakukan secara mandiri oleh pihak sekolah dan diverifikasi oleh petugas BPOM di Ambon terlaksana



Gambar 100. Audit kantin sekolah dalam rangka sertifikasi Keamanan pangan Sekolah

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi yang dapat dilakukan agar kegiatan Intervensi Keamanan PJAS dapat berjalan optimal di tahun berikutnya dengan menumbuhkan komitmen komunitas sekolah dalam penerapan keamanan pangan di sekolah. BPOM di Ambon akan senantiasa melakukan pendampingan dan pengawalan kepada sekolah dalam memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

IKSS 18. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan \leq 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan \leq 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Melalui intervensi keamanan pangan yang dilakukan pada program Desa Pangan Aman ini diharapkan semakin banyak desa yang mandiri dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan yang dimasukkan dan diintegrasikan dalam program desa sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terlindungi dari pangan yang tidak aman dan tidak bermutu.

Tahapan program desa pangan aman yaitu (1) Advokasi Kelembagaan Desa, (2) Pengadaan gimmick, rapid test kit, (3) Pengawasan Desa, (4) Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), (5) Bimtek Komunitas Desa, (6) Fasilitasi Keamanan Pangan, (7) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, (8) Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor), dan (9) Lomba Desa Pangan Aman

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tahun 2022, seluruh tahapan kegiatan desa pangan aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap monitoring dan evaluasi.

Tabel 94. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	18	18	100	Baik

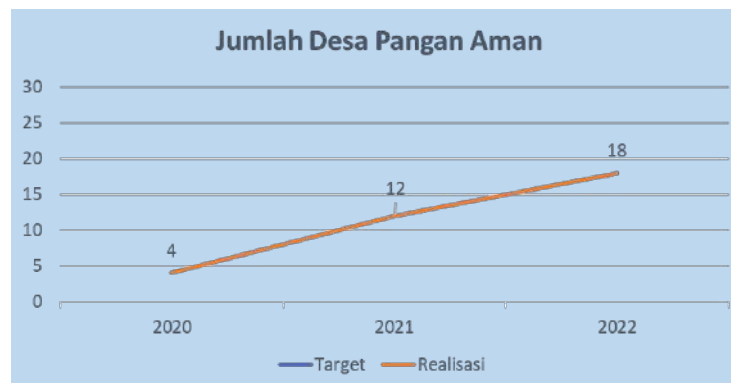
Sesuai dengan tabel di atas, realisasi jumlah Desa Pangan Aman pada tahun 2022 mencapai target sebanyak 18 desa, maka persentase capaian realisasi kinerjanya mencapai 100% dengan kriteria **Baik**.

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 95. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
2020	4	4	100	Baik
2021	12	12	100	Baik
2022	18	18	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas, target jumlah desa pangan aman tahun 2022 sebanyak 18 desa yang merupakan jumlah kumulatif dari intervensi desa pangan aman pada tahun 2020 - 2022. Tahun 2020 dilakukan intervensi terhadap 4 desa, tahun 2021 terhadap 8 desa dan tahun 2022 dilakukan intervensi terhadap 6 desa di Kab Buru dan Buru Selatan. Persentase capaian kinerja tahun 2020 – 2022 mencapai target 100% dengan kriteria Baik.



Gambar 101. Grafik Realisasi Desa Pangan Aman Tahun 2020-2022

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 96. Perbandingan Realisasi Jumlah Desa Pangan Aman Terhadap Target renstra 2020-2024

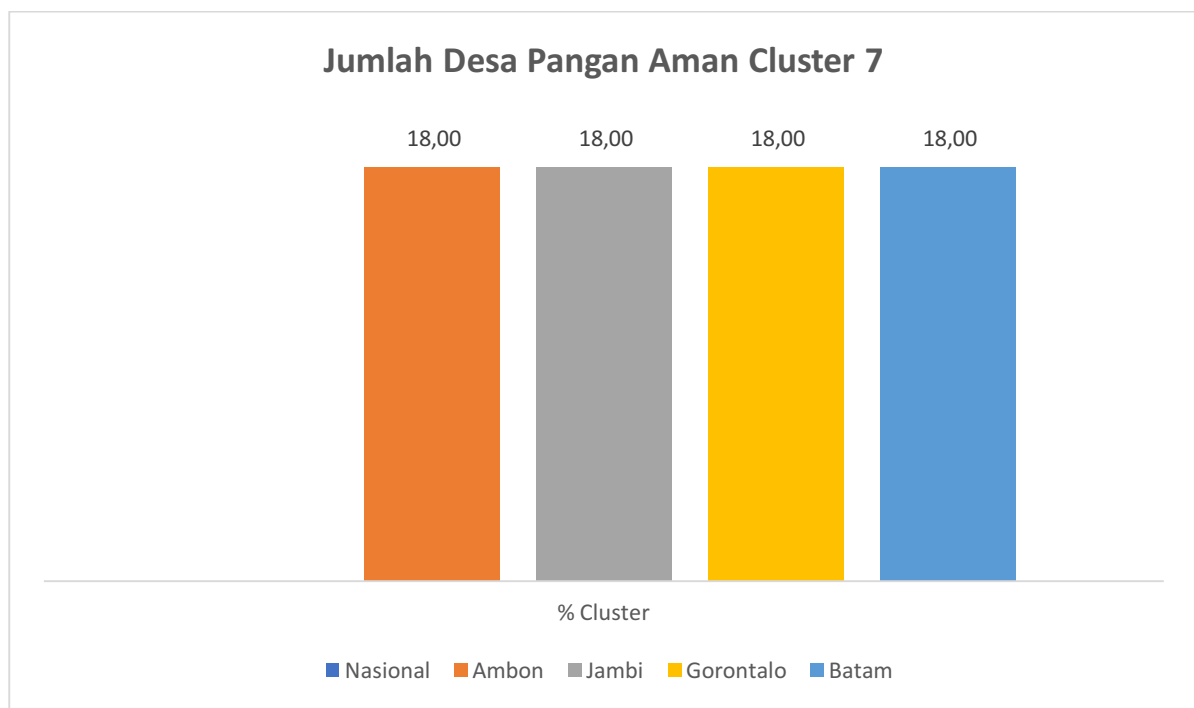
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Jumlah Desa Pangan Aman	31	18	58,06

Realisasi jumlah Desa Pangan Aman **belum mencapai** target Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 31 Desa. Jika dihitung dari target renstra tersebut maka capaian jumlah Desa Pangan Aman tahun 2022 sebesar **58,06%** karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif yang baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024. Untuk dapat memenuhi target renstra tahun 2024 maka perlu mengoptimalkan jumlah desa yang akan diintervensi pada tahun berikutnya.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 97. Jumlah Desa Pangan Aman BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional Tahun 2022

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Batam	BBPOM di Gorontalo
Jumlah Desa Pangan Aman	18	18	18	18
Capaian Kinerja (%)	100	100	100	100
Target Nasional				221

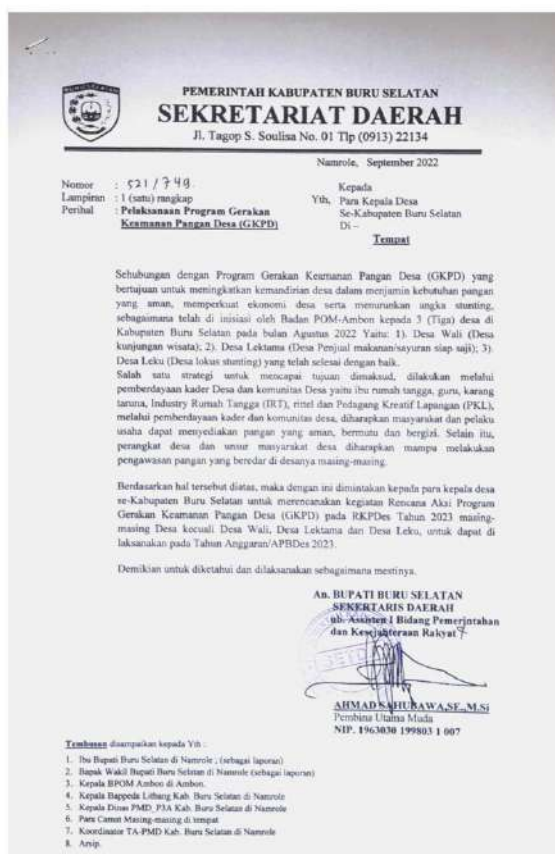


Gambar 102. Grafik Perbandingan Jumlah Desa Pangan Aman BPOM di Ambon dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Capaian Nasional Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah Desa Pangan Aman BPOM di Ambon tahun 2022 **sama dengan** seluruh BPOM/BBPOM yang setara di Kluster 7 yakni sebanyak 12 Desa dengan capaian kinerjanya 100% kategori Baik.

5) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan rekomendasi

Faktor yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator ini yaitu Komitmen yang tinggi dari pemerintah kabupaten setempat dan juga Kepala Desa/Lurah dan perangkatnya setelah dilakukan audiensi dan advokasi kelembagaan desa. Perlunya keberlanjutan program yang dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan melalui Sekretaris Daerah menerbitkan surat edaran kepada seluruh desa di Kab. Buru Selatan untuk merencanakan kegiatan GKPD di desa masing-masing.



Gambar 103. Surat edaran Sekda Buru Selatan untuk tiap desa merencanakan kegiatan GKPD

6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- 1) Pelaksanaan Advokasi Kelembagaan Desa menghadirkan instansi lintas sektor terkait dan perangkat desa



Gambar 104. Advokasi Terpadu Program Nasional di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2022

- 2) Terlaksananya seluruh kegiatan pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa, Fasilitasi I dan II, Intensifikasi pengawasan keamanan pangan, Pengawasan desa terintervensi tahun sebelumnya dan yang terakhir Monitoring dan Evaluasi.



Gambar 105. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa Namsina (kiri) dan Bimtek Komunitas Keamanan Pangan Desa Fatmite (kanan)



Gambar 106. Intensifikasi pengawasan keamanan pangan Desa Namsina (kiri) dan fasilitasi keamanan pangan oleh Kader Keamanan Pangan Desa Leku (kanan)

7) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi yang dapat dilakukan agar kegiatan Desa Pangan Aman dapat berjalan optimal di tahun berikutnya sebagai berikut:

1. Diperlukan komitmen lebih lanjut dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
2. Advokasi kepada Pemerintah Daerah harus terus dilakukan secara intensif sehingga program Desa Pangan Aman yang telah dilakukan di 1 desa dapat direplikasi ke desa desa lainnya.

IKSS 19. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya.

Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev PPABK, serta pelatihan fasilitator PPABK. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Tahapan PPABK yaitu: (1) Advokasi Lintas Sektor, (2) Pelatihan Petugas Pasar, (3) Penyuluhan Komunitas Pasar, (4) Monitoring dan Evaluasi dan (5) Lomba Pasar PPABK.

1). Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 98. Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah PPABK Tahun 2022

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	6	6	100	Baik

Sesuai tabel di atas, realisasi jumlah PPABK pada tahun 2022 sesuai dengan target yakni 4 Pasar. Persentase realisasi capaian jumlah PPABK **telah berhasil mencapai target** yaitu 100% dengan kriteria **Baik**.

2). Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 99. Perbandingan Realisasi dan Capaian Jumlah PPABK Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria Capaian
2020	2	2	100	Baik
2021	4	4	100	Baik
2022	6	6	100	Baik

Berdasarkan tabel di atas, target dan realisasi jumlah PPABK tahun 2022 merupakan kumulatif dari masing - masing 2 Pasar yang diintervensi tahun 2020 sampai tahun 2022. 2 pasar yang diintervensi tahun 2022 yaitu Pasar Mako (Kab. Buru) dan Pasar Namrole (Kab. Buru Selatan).



Gambar 107. Capaian PPABK BPOM di Ambon Tahun 2020-2022

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 100. Perbandingan Realisasi Jumlah PPABK Terhadap Target renstra 2020-2024

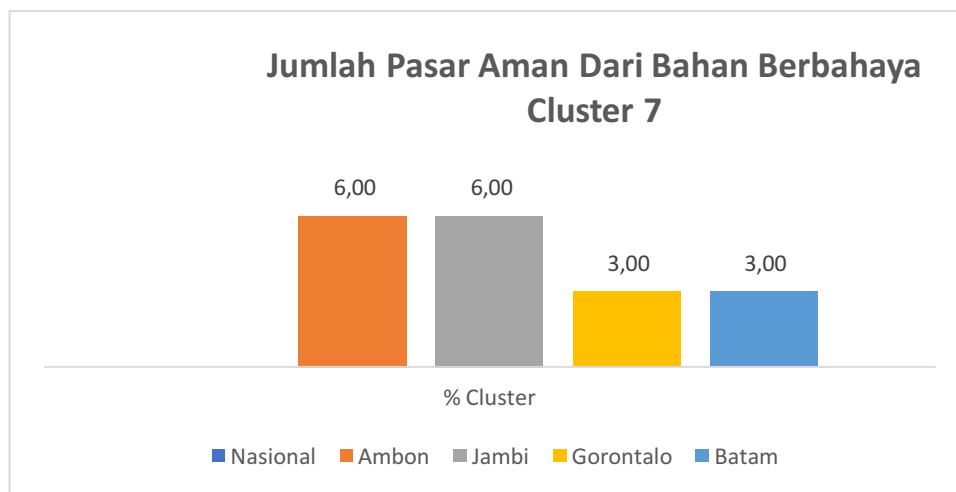
Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	10	6	60

Realisasi jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas **belum mencapai** target Renstra tahun 2020-2024 sebanyak 10 Pasar. Jika dihitung dari target renstra tersebut maka capaian jumlah PPABK tahun 2022 sebesar **60%**. Hal ini disebabkan karena target indikator ini bersifat jumlah kumulatif yang baru dapat tercapai di akhir periode renstra tahun 2024. Untuk dapat memenuhi target renstra tahun 2024 maka perlu mengoptimalkan jumlah pasar yang akan diintervensi pada tahun berikutnya.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 101. Jumlah PPABK dibandingkan dengan BPOM/BBPOM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional Tahun 2022

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Batam	BBPOM di Gorontalo
Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	6	6	3	3
Capaian Kinerja (%)	100	100	100	100
Target Nasional				263



Berdasarkan tabel di atas, realisasi jumlah PPABK pada Kluster 7 tahun 2022 dengan capaian kinerja 100% kategori Baik.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan dan Rekomendasi

BPOM di Ambon berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah diintervensi tetap konsisten melaksanakan program PPABK.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu tahapan kegiatan PPABK yang sudah dilaksanakan tahun 2022 meliputi survei pasar, bimbingan teknis bagi pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I dan tahap II, penyuluhan dan kampanye pasar pangan aman berbasis komunitas bagi komunitas pasar di Pasar Mako, Kab. Buru dan Pasar Namrole, Kab. Buru Selatan dengan progress 100%



Gambar 108. Tahapan kegiatan program PPABK 2022

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Rekomendasi yang dapat dilakukan agar kegiatan Desa Pangan Aman dapat berjalan optimal di tahun berikutnya diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait program PPABK yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dengan NPS 99.10% (Belum memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis VI pada tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 21. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR DI WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

- Sampel Obat meliputi sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik.
- Sesuai standar adalah pengujian sesuai standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,

Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar} + \text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}) / (\text{Jumlah target sampel obat yang diperiksa} + \text{Jumlah target sampel obat yang diuji}) \times 100\%$

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Tabel 102. Realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

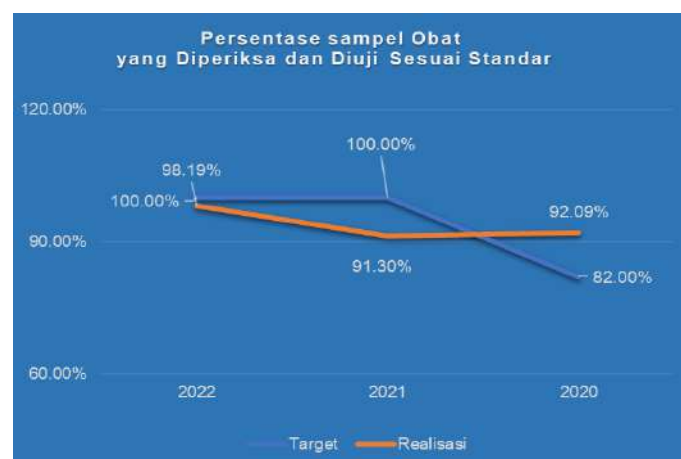
INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	46,50%	64,89%	82,96%	98,19%	98,19%	belum memenuhi ekspektasi

Jumlah sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Balai POM Ambon yaitu sebesar 2929 item, dibagi dengan Jumlah target sampel obat yang diperiksa + Jumlah target sampel obat yang diuji di Balai POM Ambon yaitu sebesar 2985 item. Sehingga capaian Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 **mencapai 98.19%** dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi”.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 103. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00 %	98,19%	98,19%	100,00 %	91,30%	91,30%	82,00%	92,09%	112,30 %



Gambar 109. Diagram Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Capaian Tahun 2020-2022

Capaian Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan tahun 2021,

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 104. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2021	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	98,19%	98,19%	100,00%	98,19%	98,19%

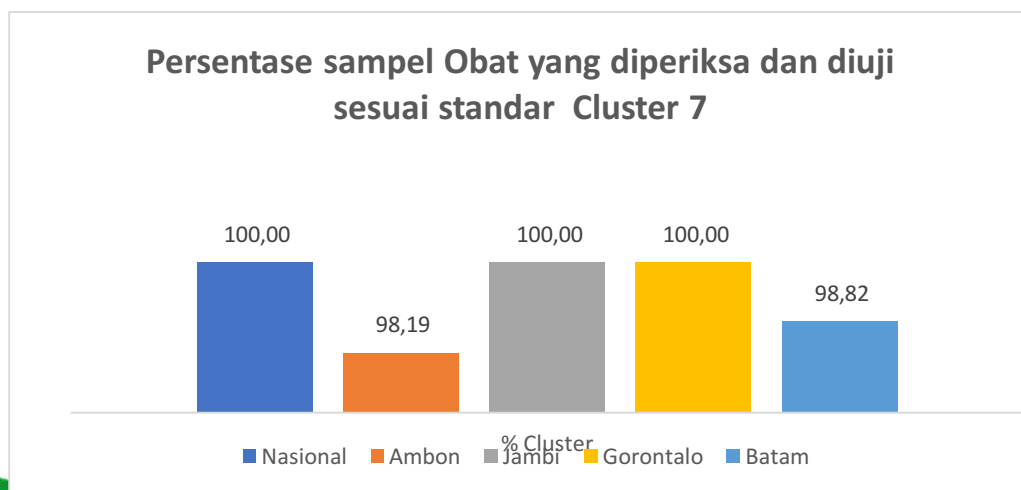
Realisasi Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024 karenanya diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 105. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain (KLaster 7) sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batama
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	98,19	100	100	98,82
Target Nasional	100			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 yang tertinggi adalah BPOM Jambi dan Gorontalo dan yang terendah adalah BPOM Ambon.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Ambon 98.19 % dimana target 100,00%, sehingga diperoleh capaian 98.19% dengan kategori Baik.

- Persentase sampel obat yang diperiksa sesuai standar sudah dilakukan secara keseluruhan sampel (1545 sampel).
- Persentase sampel obat yang diuji sesuai standar (sesuai Parameter uji kritis PUK dan timeline) :

Tabel 106. Parameter uji kritis PUK dan timeline

Produk	Sampel	MS PUK + Timeline	Persentase MS	Justifikasi
Obat	452	412	93.42	TMS timeline : Proses pengiriman sampel membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga terjadi penumpukkan sampel di lab, sampel yang masuk kategorinya bervariasi dimana metode uji yang digunakan bermacam-macam, dan SDM yang terbatas. TMS PUK : Tidak ada TMK PUK
Obat tradisional	330	321	97.27	TMS timeline : Sampel uji rujuk dihitung dari awal sampel diterima sampai selesai uji rujuk pada balai yang dirujuk. TMS PUK : AMK Madu Tonik Cap Kuda, Stamina Pria, TMS Kadar Metanol 3.0% (Syarat : 1.0%)
Suplemen Kos	82 681	82 674	100.0 97.47	- TMS timeline : Sering terjadi pemadaman listrik di kota Ambon, genset yang ada memberikan pasokan listrik ke masing-masing lab secara bergantian sehingga alat/ instrument tidak dapat difungsikan secara maksimal untuk pengujian sampel. TMS PUK : Tidak ada TMK PUK
Jumlah	1545	1489	-	

Untuk itu diperlukan :

- Koordinasi yang baik dan komunikasi efektif antara laboratorium uji BPOM Ambon dengan laboratorium satu region 6 (BBPOM Manado) terkait sampling, pengiriman dan pengujian sampel parameter regionalisasi.
- Perencanaan kebutuhan perawatan alat / instrument laboratorium (HPLC, GC, AAS dan GC MS) untuk mencegah resiko kerusakan alat karena beban sampel yang tinggi.

- Lebih intensif dalam monitoring penanganan flow sampel agar tidak menumpuk di akhir tahun.
- Diperlukannya dukungan penuh dari ketersediaan sarana dan prasarana, peralatan/ pendukung, metoda uji, reagen/media, kompetensi penguji (pelatihan teknis pengujian) dalam mencapai target pemeriksaan dan pengujian.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Realisasi Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

- Meningkatkan komunikasi efektif dengan balai 1 region, berkomitmen bersama untuk melakukan pelaporan hasil uji pada bitly yang sudah disepakati dan meneruskan melalui aplikasi sipt, proses sampling sesuai dengan renlak sampling yang sudah dibuat oleh region. Meminimalkan resiko sampel tertinggal untuk diuji. Melakukan kebijakan cut-off waktu pengujian saat instrumen rusak, atau ada kejadian pemadaman listrik yang tidak dapat dihindarkan. Sehingga yang dihitung betul waktu kinerja dari penguji, bukan waktu tunggu untuk faktor2 eksternal yang tidak dapat dikendalikan.
- Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan peralatan, sarana prasarana dalam pemenuhan pengujian sesuai juknis pelaksanaan sampling dan pengujian 2022.
- Melakukan rapat evaluasi sampling terjadwal setiap bulan berjalan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian.
- Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapabilitas petugas sampling dan pengujian diantaranya Pertemuan teknis workshop pengujian, monev regionalisasi region 6 di Manado, Pelatihan PK Aflatoksin Total dalam Kacang/MA PPOMN No. 28/2014), Pelatihan Identifikasi Barbitol, Fenobarbitol, Parasetamol dan Zoplicon dalam OTSK secara GC-MS, Pelatihan Dioksan di BBPOM Mataram, Pelatihan DNA konsentrasi Rendah di BBPOM di Medan, serta pendampingan pengujian terhadap PFM yang lebih rendah kompetensinya.

- Mengupayakan Bimtek/zoom webinar dari supplier alat, melakukan pemeliharaan alat, pengadaan reagen media suku cadang yang urgent, diskusi dengan PPPOMN dan pihak akademisi dalam menyelesaikan permasalahan terkait pengujian.
- Menyusun dan mengevaluasi parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai yang telah ditetapkan BPOM Ambon secara berkala(dijadikan target SKP personil laboratorium).
- Konsisten dalam melakukan pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label sebagai langkah awal sampling sebelum lanjut ke pengujian

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai*	Belum selesai**	
			Rencana aksi	Timeline
1.	Meningkatkan komunikasi efektif dengan balai 1 region, berkomitmen bersama untuk melakukan pelaporan hasil uji dan proses sampling sesuai dengan renlak	v		
2.	Meminimalkan resiko sampel tertinggal untuk diuji. Melakukan kebijakan cut-off waktu pengujian saat instrumen rusak, atau ada kejadian pemadaman listrik yang tidak dapat terhindarkan	v		
3.	Optimalisasi pelaksanaan sampling sesuai target sehingga target sampling tercapai khususnya perhatian untuk produk Kosmetik.	v		

**IKSS 22. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN
YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR
DI WILAYAH KERJA BPOM DI AMBON**

Yang dimaksud dengan Indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah sebagai berikut :

- Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.
- Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
- Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar + Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar)/(Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel makanan yang diuji) x 100%

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Tabel 107. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2021 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2021	kriteria CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	44,77	66,94	85,70	100,00	100,00%	MEMENUHI EKSPEKTASI

Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar di Balai POM Ambon yaitu sebesar 615 item, dibagi dengan Jumlah target sampel Makanan yang diperiksa + Jumlah target sampel Makanan yang diuji di Balai POM Ambon yaitu yaitu sebesar 615 item. Sehingga capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 **telah mencapai 100.00%** dengan kriteria “MEMENUHI EKSPEKTASI”.

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun tahun sebelumnya

Tabel 108. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020
BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	75,00 %	94,74%	126,32%



Gambar 110 . Diagram Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar perbandingan capaian tahun 2020-2022

Pada tahun 2020, realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian 126,36 %. Sehingga pada saat rewiu Renstra 2020-2024 dilakukan penyesuaian target untuk tahun 2021 dan 2022, sehingga diperoleh capaian 100%.

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 109. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

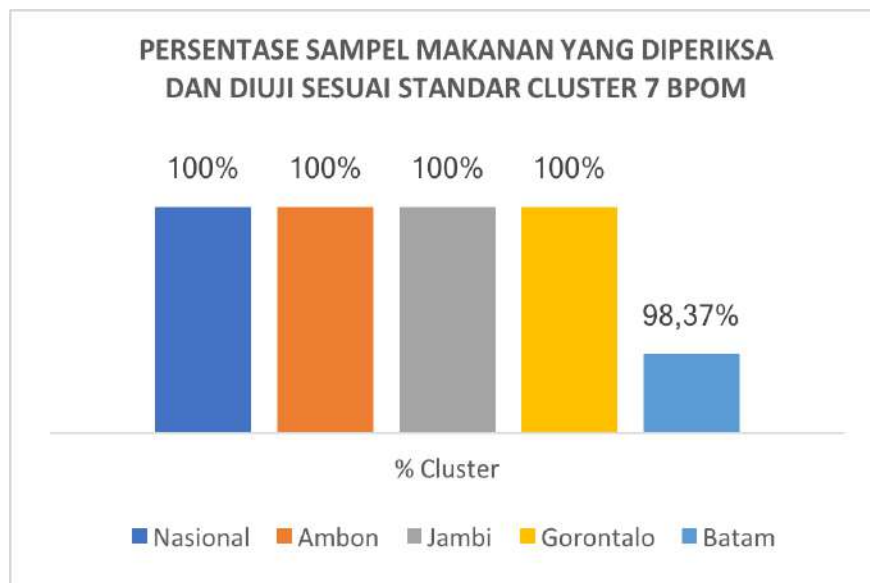
Realisasi Persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2022 **telah mencapai** target Renstra tahun 2024 namun tetap diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 senantiasa tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 110. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	100,09	100,00	98,37
Target Nasional	100,00			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM Ambon, Jambi, dan Gorontalo dan telah berhasil mencapai target IKU BPOM 2022.



Gambar 111. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada cluster 7

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BPOM di Ambon 100.00 % dimana target 100,00%, sehingga diperoleh capaian 100.00% dengan kategori Baik.

Keberhasilan pencapaian pada tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- Adanya sistem regionalisasi sangat membantu dalam berkomunikasi antar balai seregional maupun antar region, jika teridentifikasi faktor-faktor penghambat teknis pengujian. Sehingga dapat meminimalisir resiko target tidak tercapai.
- Monitoring (penanganan flow) sampel dan evaluasi berkala yang baik dalam sampling, pengujian dan pelaporan yang baik, baik untuk sampel internal dan eksternal. Monitoring jg dilakukan terhadap sampel eksternal pihak ketiga / swasta agar seluruh target waktu penyelesaian tercapai.
- Dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana (peralatan/ pendukung, metoda dan kemampuan uji, regaen/media) dalam mencapai target pemeriksaan dan pengujian sangat diperhatikan oleh pimpinan.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut yaitu komunikasi efektif yang bersinergi dengan lab satu region 6 jika terdapat kendala teknis pengujian, pembuatan tim tim kecil dalam melakukan pengujian. Dalam penanganan sampel untuk jenis dan parameter yang sama dilakukan oleh beberapa orang agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Setiap permasalahan dapat diidentifikasi dan diperbaiki oleh tim kecil tersebut.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah:

- Melakukan rapat evaluasi sampling terjadwal setiap bulan berjalan dalam melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian.
- Kegiatan peningkatan kompetensi diantaranya Pertemuan teknis Regionalisasi, serta pendampingan pengujian terhadap PFM yang lebih rendah kompetensinya.
- Menyusun dan mengevaluasi parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai yang telah ditetapkan BPOM Ambon secara berkala

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai*	Belum selesai**	
			Rencana aksi	Timeline
1.	Optimalisasi pelaksanaan sampling sesuai target bulanan/tri wulan sehingga target sampling tercapai. optimalisasi kegiatan pengujian, komunikasi antara penguji, verifikator, evaluator, koordinator, PPK dan Kepala Balai dalam hal kebutuhan sarana prasarana dalam pemenuhan sampling dan pengujian tahun 2022.	v		

SASARAN STRATEGIS 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan dengan NPS 112,82% (Memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 23. PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM Ambon diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tingkat Keberhasilan} = \{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- Tahap II sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Capaian Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya).

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan = Perhitungan capaian s.d bulan n berdasarkan template perkara terlampir, Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over,

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahunan dan perkara carry over.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 111. Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00	12,00	25,00	50,00	78,00	10,63	10,63	49,69	88,00	112,82	memenuhi ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Balai POM di Ambon adalah 88.00% dengan capaian 112.82% (Baik).

Target perkara tahun 2022 sebanyak 3 perkara. Pada tahun 2022, realisasi perkara SPDP sebanyak 3 perkara, tahap 1 sebanyak 3 perkara dan tahap 2 sebanyak 2 perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over sebanyak 1 perkara yaitu dengan pelaksanaan penghentian penyidikan (SP3). Secara keseluruhan, realisasi perkara tahun 2022 adalah sebanyak 3 perkara dari BPOM di Ambon.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

Tabel 112. Perbandingan Realisasi dan Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	88,00%	112.82%	76,00%	75,00%	98.68%	76,00%	68,13%	89,64%



Gambar 112. Diagram Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 karena pada tahun 2021 terdapat 2 perkara yang selesai mulai dari proses SPDP, Tahap 1, P21 sampai dengan

Tahap 2 dan 1 perkara yang tidak terealisasi, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 2 perkara yang selesai mulai dari proses SPDP, Tahap 1, P21 sampai dengan Tahap 2 dan 1 perkara yang hanya sampai pada proses tahap 1 sehingga menjadi carry over ke tahun 2023.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 113. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022 THD RENSTRA
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78,00%	88,00%	112,82%	82,00%	88,00%	107,32%

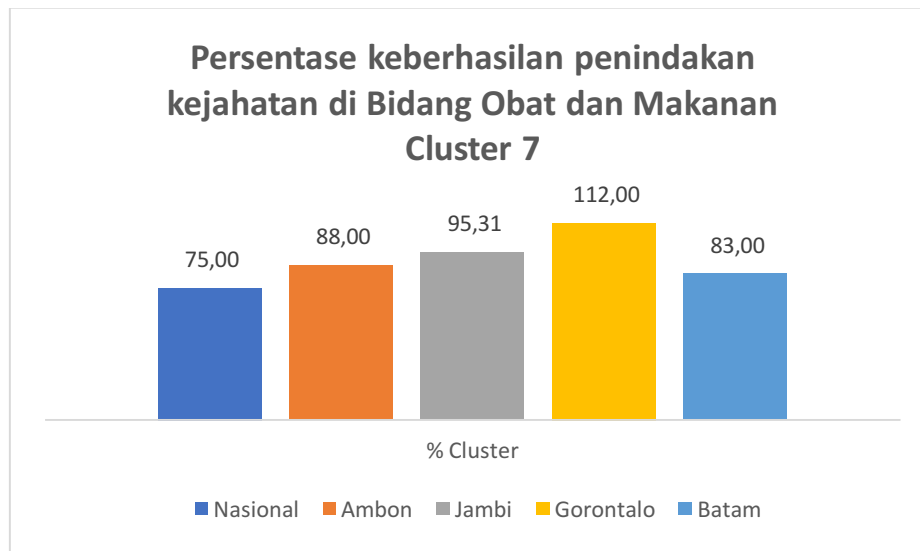
Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 **sudah mencapai** target Renstra tahun 2024 namun tetap diperlukan upaya perbaikan agar target tercapai di tahun 2024.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 114. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan

Realisasi kinerja Balai lain yang sejenis

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	88,00	95,31	112,00	83,00
Target Nasional	75,00			



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2022 yang tertinggi adalah BPOM Gorontalo dan yang terendah adalah BPOM Batam. Keempat balai telah mencapai target IKU nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Capaian tahapan perkara sampai tahun 2022 :

- Realisasi perkara tahun 2022 (tahun n) sebanyak 2 perkara dengan rincian 2 perkara sudah dikirimkan SPDPnya ke Kejaksaan Negeri Tual melalui Satreskrim Polres Maluku Tenggara dan Kejaksaan Tinggi Propinsi Maluku melalui Korwas PPNS Polda Maluku. Selanjutnya ke-2 perkara tersebut sudah dilakukan proses Tahap I, P21 dan Tahap 2 di tahun 2022.
- Realisasi Carry Over : dari target 1 perkara tersebut sudah dilakukan proses penghentian penyidikan (SP3) karena belum cukup bukti berdasarkan hasil gelar perkara dengan Korwas PPNS Polda Maluku.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target adalah :

- Aktif melakukan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi melalui kegiatan Cyber Patrol pada market place dan media sosial.
- Peningkatkan koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga

setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan dengan baik.

- Peningkatan kompetensi petugas di bidang penindakan sehingga menemukan dan mengelola proses penyidikan agar dapat berjalan lancar.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai*	Belum selesai**	
			Rencana aksi	Timeline
1	Aktif melakukan Cyber Patrol pada market place media social dalam menemukan kasus yang akan ditargetkan menjadi perkara yang ditindaklanjuti secara non maupun pro Justitia.	v		
2	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait (Criminal Justice System) secara intensif terkait penyelesaian berkas perkara untuk menghindari perkara yang tumpang tindih karena keterbatasan penyidik.	v		

8. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan hasil capaian pada TW 1 sd 4, Monev yang dilakukan telah diperketat dengan berkala melalui peningkatan koordinasi internal dalam dan di luar kota serta Koordinasi dengan Kejaksaan sampai dengan P21 dan Tahap 2 sehingga capaian telah memenuhi ekspektasi (100%).

SASARAN STRATEGIS 8

Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan NPS 102,43% (Memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 24. INDEKS RB UPT

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Gambar 113. Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil Reformasi Birokrasi

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tataaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT (60%)
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

Gambar 114. Rincian Bobot Komponen Pengungkit

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi yang tertuju pada dua sasaran utama yaitu Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN dan Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Di bawah ini adalah tabel rincian bobot komponen hasil penilaian unit kerja Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

NO	UNSUR KOMPONEN HASIL	BOBOT (40%)
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
2	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

Gambar 115. Rincian Bobot Komponen Hasil

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian indikator Indeks RB Balai POM di Ambon dihitung tahunan.

Tabel 115. Realisasi Indeks RB UPT dengan Target 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s.d Triwulan				Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria capaian
		I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Indeks RB UPT	86,00	-	-	-	86,00	-	-	-	90,72	90,72	105,49%	memenuhi ekspektasi

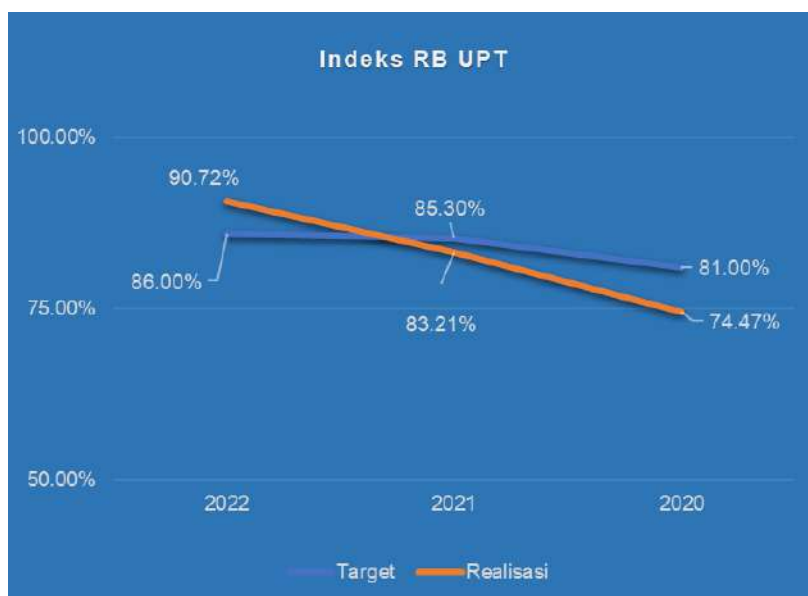
Berdasarkan tabel di atas, perhitungan indikator tersebut diperoleh Indeks RB UPT Balai POM di Ambon terhadap target tahun 2022 adalah 90,72 dengan kategori predikat (sangat memuaskan) dan telah melampaui target yang ditentukan

sebesar 86,00. Persentase capaian kinerja (memenuhi ekspektasi), yaitu terhadap target tahun (kumulatif) sebesar 105,49 %

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan capaian 2 (dua) Tahun sebelumnya

Tabel 116. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks RB UPT Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks RB UPT	86,00	90,72	105,49%	85,3	83,21	99,65%	81	74,47	91,94 %



Dari tabel di atas Indeks RB UPT di wilayah kerja BPOM di Ambon pada tahun 2022 adalah 90,72, pada tahun 2021 yaitu sebesar 83,21, sedangkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 74,47, dengan nilai persentase capaian pada tahun 2022 adalah 105,49%, tahun 2021 adalah 99,65% dan pada tahun 2020 adalah 105,49%. Kemudian untuk perbandingan kriteria capaian pada tahun 2022 meningkat dari pada 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu yang sebelumnya (baik) menjadi (memenuhi ekspektasi).

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

Tabel 117. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020-2024

INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Indeks RB UPT	86,00	90,72	105,49%	91	90,72	99,69%

Realisasi Indeks RB UPT BPOM di AMbon tahun 2022 telah hampir memenuhi i target Renstra tahun 2024, karenanya tetap diperlukan upaya dalam mencapainya di waktu mendatang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional.

Tabel 118. Indeks RB UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	BPOM Ambon	BPOM Jambi	BPOM Gorontalo	BPOM Batam
Indeks RB UPT	90,72	84,12	92,81	89,09
Target Nasional	85			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks RB UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon tahun 2022 tertinggi yang kedua dibandingkan dengan Balai POM setara (Kluster 7) dan berada diatas target nasional.

5. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkata kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).**

Pada tahun 2022 BPOM di Ambon telah dinilai oleh TPI Badan POM dan juga KemenPANRB, akan tetapi belum berhasil mencapai nilai yang ditargetkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Hal tersebut terjadi karena dengan adanya perbedaan hasil penilaian TPI Badan POM dengan hasil penilaian KemenPANRB untuk penetapan WBK/WBBM yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit hasil penilaian TPI perlu dikonversikan dengan hasil penilaian oleh KemenPANRB. Dimana realisasi BPOM Ambon adalah 83.21 dimana capaiannya 99,65% (kategori baik). Beberapa hal yang telah dilakukan untuk mendukung meraih predikat WBK/WBBM dari BPOM di Ambon antara lain dengan melakukan sosialisasi RB secara online di media Whats App grup kantor, media sosial Instagram dan media sosial lainnya mengenai peningkatan pelayanan publik, evaluasi internal setiap bulan, pemberian penghargaan kinerja pegawai maupun pelayan publik, sosialisasi gratifikasi, serta respon cepat terhadap pertanyaan masyarakat di media online. Terdapat juga inovasi-inovasi yang dibuat dan digunakan untuk mendukung proses pelayanan public baik internal maupun eksternal, seperti Program inovasi QUICK RESPONSE (QR) DATA memudahkan pengarsipan dan pengaksesan secara digital di lingkup Balai POM Ambon Program inovasi Si PANDAN (Slap Hadapi Pandemi dengan Kegiatan Online), merupakan terobosan Inovasi BPOM Ambon untuk merespon masa pandemic COVID 19 agar kegiatan tetap berjalan dengan baik, yaitu berupa Bimtek Virtual, KIE via Online, Informasi Layanan Masyarakat via Media Elektronik, Inspeksi Sarana Virtual dan Cyber Patrol. Selain itu juga terdapat beberapa program AOC (Agent of Change) yang mendukung unit kerja guna meningkatkan kualitas kinerja dalam melakukan pelayanan publik.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Adanya komitmen yang tinggi mulai dari pimpinan unit kerja hingga seluruh pegawai untuk meraih WBK/WBBM, pada tahun 2022 telah di buat berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mendukung unit kerja BPOM Ambon meraih WBK/WBBM, akan tetapi dikarenakan beberapa hal termasuk pandemic covid yang masih berlangsung, maka beberapa kegiatan dan inovasi yang telah dibuat kurang berjalan maksimal. Maka dari pada itu, BPOM di Ambon terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan menginisiasi ataupun melakukan monitoring evaluasi terhadap inovasi-inovasi yang ada untuk menyesuaikan dengan suatu kondisi khususnya pandemic covid yang masih berlangsung. Inovasi-inovasi yang sudah berjalan akan terus dikembangkan sehingga kebermanfaatannya bagi pegawai maupun masyarakat khususnya di Provinsi Maluku dapat dirasakan, yang pada akhirnya BPOM di Ambon akan dapat meraih WBK/WBBM.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai*	Belum selesai**	
			Rencana aksi	Timeline
	Membuat pelatihan ataupun workshop bagi seluruh pegawai dalam hal reformasi birokrasi guna lebih meningkatkan komitmen dalam meraih WBK/WBBM untuk BPOM di Ambon	v		
	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi pada 6 area perubahan, sehingga lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan public	v		
	Memperbaiki laporan kinerja dalam hal penyajian informasi kinerja sehingga data yang diperoleh dan diolah lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan	v		
	Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, baik itu bulanan, triwulan maupun semesteran dan akan terus dilakukan secara berkelanjutan	v		

	Melakukan survey Indeks Persepsi Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi secara berkala	v		
	Mengkomunikasikan setiap perubahan kepada masyarakat melalui manajemen media secara optimal, khususnya pada media sosial maupun media cetak	v		
	Mengkomunikasikan setiap perubahan kepada masyarakat melalui manajemen media secara optimal	v		
	Meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi yang sudah berjalan maupun melalui sikap komitmen siap melayani dari pegawai BPOM di Ambon.	v		

IKSS 25. Nilai AKIP

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BPOM Ambon, dengan kategori penilaian :

Tabel 119. Kriteria Penilaian AKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup (Memadai)
6.	> 30 s.d. 50	C	Kurang
7.	< 30	D	Sangat Kurang

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 120. Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Nilai AKIP BPOM Ambon	77.40	-	-	-	77.40	-	-	-	76.92	99.38%	Belum memenuhi ekspektasi

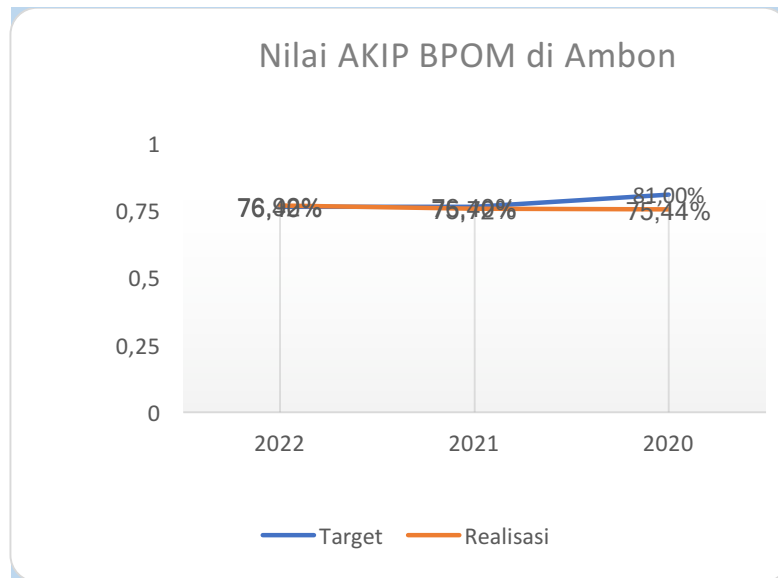
Periode penetapan target Nilai AKIP adalah tahunan dengan target Tahun 2022 sebesar 77,40 dimana Balai POM di Ambon memperoleh nilai Indeks AKIP Sebesar 76.92 kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan tahun tahun Sebelumnya

Tabel 121. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai AKIP BPOM Ambon Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai AKIP BPOM Ambon	77.40	76.92	99.38%	76.40	75.72	99.10%	81.00 %	75.44 %	93.14 %

Realisasi dan capaian Nilai AKIP BPOM Ambon tahun 2022 lebih tinggi dari tahun 2021 dan 2020.



Gambar 116 Diagram IKSS 25 perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 122. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

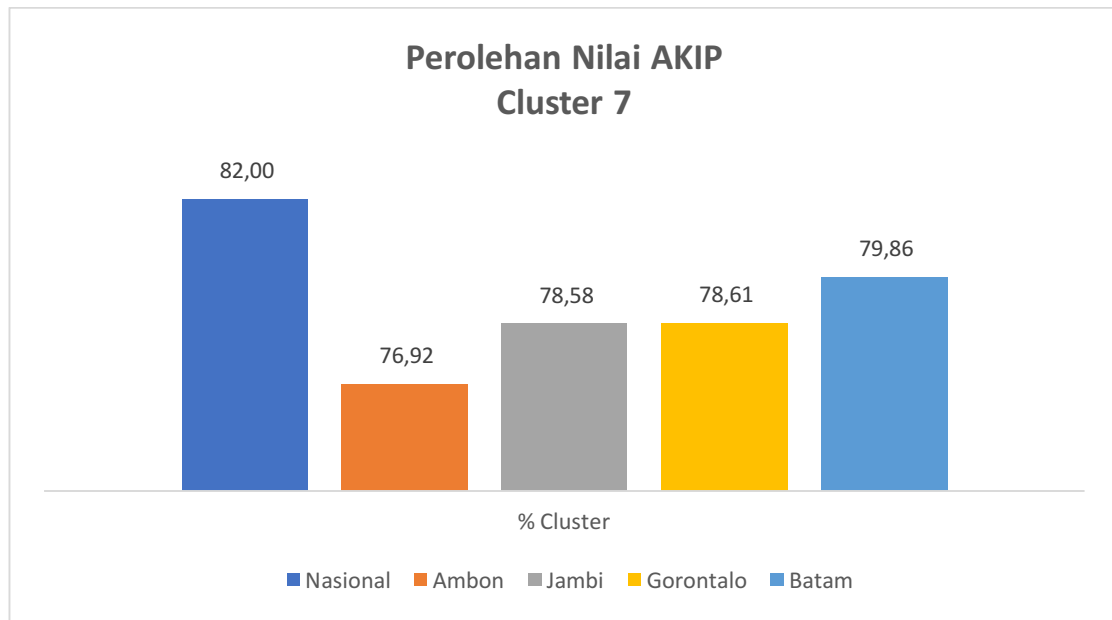
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Nilai AKIP BPOM Ambon	77.40	76.92	99.38%	79.4	76.92	96,88%

Realisasi Nilai AKIP BPOM Ambon tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2020-2024 karenanya diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2020-2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 123. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Nilai AKIP BPOM Ambon	76.92	78.58	78,61	79,86
Target Nasional	82			



Gambar 117. Diagram IKSS 25 Perbandingan Nilai AKIP tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Nilai AKIP BPOM Ambon tahun 2022 yang terendah dalam kelompok kluster 7 dan belum mencapai target IKU nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Rekomendasi Solusi di masa mendatang (SESUAIKAN LHE AMBON YANG DITERIMA 2023)

Nilai AKIP BPOM Ambon tahun 2022 adalah 76.92 (kategori BB), sehingga perlu dilakukan beberapa upaya untuk mencapai target nilai A.

Terhadap beberapa hal yang perlu diperbaiki berdasarkan rekomendasi dari APIP terhadap implementasi SAKIP BPOM di Ambon pada tahun 2022 maka dilakukan:

- ✓ Perencanaan kinerja: menambahkan mapping antara analisa internal-eksternal dengan analisa SWOT dengan tujuan dan strategis; Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan

- untuk mencapai kinerja; memastikan indikator antar kelompok substansi tidak tindi, dan memastikan kesesuaian besaran anggaran antara RAPK dan RKA
- ✓ Pengukuran kinerja: menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment; menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi data kinerja dalam SOP secara lengkap dan jelas sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance dalam pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi.; melakukan reuiu terhadap IKU secara berkala.
 - ✓ Pelaporan kinerja: menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama sebagai perbaikan strategi dalam implementasi untuk peningkatan capaian kinerja; Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.
 - ✓ Evaluasi Internal (**M**elaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi ; **M**emanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan serta memberikan masukan kepada pemilik program berdasarkan hasil implementasi yang telah dilaksanakan)
 - ✓ Capaian Kinerja (**M**emanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja serta meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur; **M**emanfaatkan hasil evaluasi internal intenl triwulan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja).

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor yang menunjang pencapaian indikator nilai AKIP antara lain :

- Program Inovasi PUSH KINERJA (Publish and Show Up Kinerja) BPOM Ambon menyajikan profil kinerja BPOM Ambon yang disajikan melalui LED Pelayanan public dan media sosial
- Tindak lanjut rekomendasi perbaikan Sebagian besar sudah dilaksanakan secara memadai
- Capaian kinerja sebagian besar sudah memenuhi kriteria keandalan data
- Evaluasi internal masih Sebagian besar sudah ditindaklanjuti bentuk Langkah-langkah nyata
- Pelaporan kinerja sudah dimanfaatkan namun belum maksimal untuk menilai dan memperbaiki kinerja
- System pengukuran sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi
- Monitoring kinerja sudah dilakukan secara memadai dengan pemanfaatan reward dan punishment masih belum maksimal.
- Tindak lanjut Balai POM terhadap rekomendasi pelaksanaan SAKIP BPOM Ambon yang diberikan baik secara internal maupun eksternal.
- Dilakukan rapat monitoring/evaluasi setiap bulan dan triwulan untuk mengidentifikasi kendala dan tindak lanjut yang diperlukan antara pimpinan dan penanggung jawab kegiatan.
- BPOM Ambon sudah mulai menerapkan pemanfaatan data kinerja (perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pemanfaatan) dalam pemberian reward dan punishment, diantaranya dalam penilaian pencapaian target SKP yang berpengaruh terhadap pemotongan nilai tunjangan kinerja.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan evaluasi setiap triwulan, telah dilakukan perbaikan secara bertahap sesuai rekomendasi APIP terhadap implementasi SAKIP tahun sebelumnya, yaitu BPOM di Ambon telah melakukan beberapa perbaikan seperti:

- Mengesahkan dokumen Renstra 2020-2024 dan mempublikasikan ulang dokumen yang telah disahkan.
- Hasil rapat berupa notulen dan laporan-laporan monev disimpan dalam 1 drive Monev.
- Point dan capaian keberhasilan serta kegagalan dituangkan dalam Notulen, dan RATL dituangkan dalam Notulen
- Membuat RATL LHE untuk 2022

- Dokumen perencanaan Renstra 2020-2024 Balai POM di Ambon di turunkan lebih teknis dengan mapping analisa Eksternal-Internal, analisa SWOT dan tujuan startegis
- Memastikan keselarasan sasaran kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dalam dokumen Renstra dengan dokumen perencanaan yang lain seperti dokumen RKT dan PK terutama untuk penulisan narasi maupun keselarasan penetapan target kinerja
- Menetapkan target kinerja jangka menengah, jangka pendek dan triwulanan dengan memenuhi kriteria penetapan target yang baik berdasarkan basis data yg memadai, dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan organisasi;
- Rencana Aksi atas kinerja agar mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
- Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian kinerja unit serta memanfaatkan hasil pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishmen
- Menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP sehingga menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan aplikasi e-performance dalam pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi.
- Melakukan reviu terhadap IKU secara berkala.
- Menindaklanjuti rekomendasi dalam BAB IV Laporan Kinerja dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama
- Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishmen
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodic atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi.
- Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan serta memberikan masukan kepada pemilik program berdasarkan hasil implementasi yang telah dilaksanakan
- Memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk

perbaikan/peningkatan kinerja serta meningkatkan keandalan data capaian kinerja dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusuri

- Memanfaatkan hasil evaluasi internal internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat menjadi media antisipasi terhadap munculnya potensi target kinerja tidak tercapai dan menghasilkan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan kinerja

8. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan hasil realisasi nilai AKIP tahun 2021 75,715 kemudian pada pada tahun 2022 nilai AKIP 76,92 menunjukkan peningkatan karena beberapa rekomendasi telah dilaksanakan.

SASARAN STRATEGIS 9

Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil mewujudkan SDM yang Berkinerja optimal dengan NPS 100.52% (memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 26. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. SDM memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan unit kerja melaksanakan program dan kerjanya. Maka daripada itu, SDM perlu diberikan peningkatan kompetensi melalui suatu pelatihan agar kompeten dalam berkinerja. SDM yang kompeten adalah modal

untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas pokok pekerjaannya.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun.

Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS);
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami).

Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian Biro SDM adalah 83,18. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Balai POM di Ambon dibagi total jumlah pegawai di Balai POM di Ambon. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Ambon tahun 2022 sudah lebih dari target yang ditetapkan dan mendapat kriteria “tinggi”. Penilaian capaian kinerja terhadap target telah Memenuhi ekspektasi , yaitu 100,52%.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 124. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s.d Triwulan				Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)	Kriteria capaian
		I	II	III	IV	I	II	III	IV			
Indeks Profesionalitas ASN	82,75	-	-	-	82,75	-	-	-	83,18	83,16	100,52%	memenuhi ekspektasi

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan indikator tersebut diperoleh Indeks Profesionalitas ASN UPT Balai POM di Ambon terhadap target tahun 2022 adalah 83,18 dengan kriteria tinggi. Penilaian telah melebihi target yang ditentukan sebesar 82.75. Penilaian capaian kinerja terhadap target telah Memenuhi Ekspektasi, yaitu terhadap target tahun (kumulatif) sebesar 100,52%.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan capaian 2 (dua) Tahun sebelumnya

Tabel 125. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 dengan capaian Tahun 2021 dan 2020.

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indeks Profesionalitas ASN	82,75	83,18	100,52 %	82,50	74,34	90,11	75,00	82,30	109,73



Dari tabel di atas Indeks Profesionalitas ASN UPT di wilayah kerja BPOM di Ambon pada tahun 2022 yaitu sebesar 100,52%, nilai persentase capaian pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2020 target terlalu rendah sehingga capaian sangat tinggi sehingga dilakukan revisi dan target dinaikkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024

Tabel 126. Perbandingan Realisasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2020 - 2024

INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Indeks Profesional ASN	82,75	83,18	100,52	83,25	83,18	99,92

Realisasi Indeks Profesional ASN di Ambon tahun 2022 telah hampir memenuhi target Renstra tahun 2024, karenanya tetap diperlukan upaya dalam mencapainya di waktu mendatang.

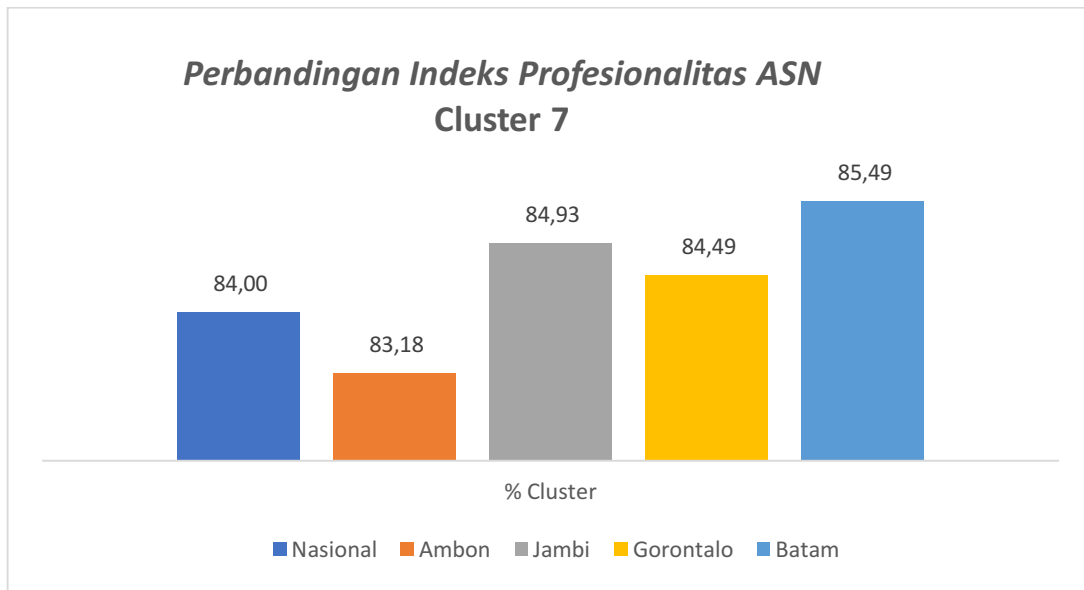
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional.

Tabel 127. Indeks Profesionalitas ASN UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional.

Indikator Kinerja	Balai POM Ambon	Balai POM Jambi	Balai POM Gorontalo	Balai POM Batam
Indeks Profesional ASN	83,18	84,93	84,49	85,48
Target Nasional	84,00			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Profesionalitas ASN UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon tahun 2022 terendah dibandingkan

dengan BPOM lain pada kluster 7. dan dibawah target nasional, namun telah mencapai target.



Gambar 108. Diagram Indeks Profesionalitas ASN UPT di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Nilai indeks profesionalitas ASN UPT seperti yang sudah dijelaskan di atas dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sampai pada saat ini BPOM di Ambon telah dilakukan rencana aksi dan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain :

- 1) Mengkoordinir untuk semua fungsional mengikuti pelatihan untuk mendapatkan nilai IP pegawai sesuai target.
- 2) Peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP telah dilaksanakan namun tidak semua pegawai tidak merasa optimal dalam mengikuti peningkatan kompetensi secara daring, seperti pelatihan jabatan Fungsional oleh masing-masing Jabatan Fungsional Tertentu oleh instansi Pembina, lalu terdapat Diklat PIM yang seharusnya dilakukan belum terlaksana terlaksana bagi pejabat struktural;

- 3) Memastikan semua pegawai berkinerja dan dibuktikan dengan dilakukannya penilaian SKP selama 4 (empat) triwulan pada tahun 2022 yang telah dikonversi menjadi SKP tahunan.
- 4) Telah dilakukan pelaporan dan pengendalian disiplin kehadiran maupun pelaporan mengikuti apel/upacara secara daring.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- 1) Memberikan kesempatan bagi pegawai yang akan melakukan Tugas Belajar maupun Izin Belajar yang telah difasilitasi oleh PPSDM dengan memperhatikan disiplin ilmu yang dibutuhkan unit kerja guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam kinerja unit kerja BPOM di Ambon;
- 2) Melakukan peningkatan kompetensi untuk seluruh pegawai, baik itu pejabat Struktural, Fungsional Tertentu, Pelaksana, hingga PPNPN untuk diberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya baik itu pelatihan secara internal maupun eksternal dengan pihak ketiga;
- 3) Membuat perjanjian kinerja dan melakukan penilaian kinerja tepat waktu oleh atasan, serta pembinaan pegawai atau konseling guna meningkatkan optimalisasi pelayanan unit kerja baik secara individu maupun secara tim.
- 4) Melakukan monitoring terkait aspek disiplin pegawai, kode etik dan perilaku pegawai, terutama dalam laporan yang dilakukan secara rutin, seperti laporan disiplin kehadiran dan laporan apel pegawai;
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap aspek pengukuran Indeks Profesionalitas ASN UPT pada BPOM di Ambon secara berkala, sehingga data yang ada valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak lanjut		
		Selesai*	Belum selesai**	
			Rencana aksi	Timeli ne
1	Dilakukan monitoring secara berkala setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP	v		
2	Diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi, terutama Kompetensi Inti dari masing-masing pegawai yang menduduki Jabatan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP	v		
3	Dilakukan pembinaan berupa konsultasi kepegawaian jika terdapat pegawai yang bermasalah sehingga mengalami penurunan kinerja.	v		

SASARAN STRATEGIS 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon

Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon telah berhasil meningkatkan performa laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dengan NPS 113,72% (memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 27 . Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

1. Perbandingan target dan realisasi triwulan tahun 2022

Berdasarkan hasil penilaian PPPOMN, realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 78.92% dengan rincian persentase pemenuhan SRL 81.88%, persentase pemenuhan standar kompetensi 87.10%, persentase pemenuhan standar peralatan 67.77%.

Dengan demikian capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 **telah mencapai 105.32%** dengan kriteria **“telah memenuhi ekspektasi”**.

Tabel 128. Realisasi **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP** tahun 2022

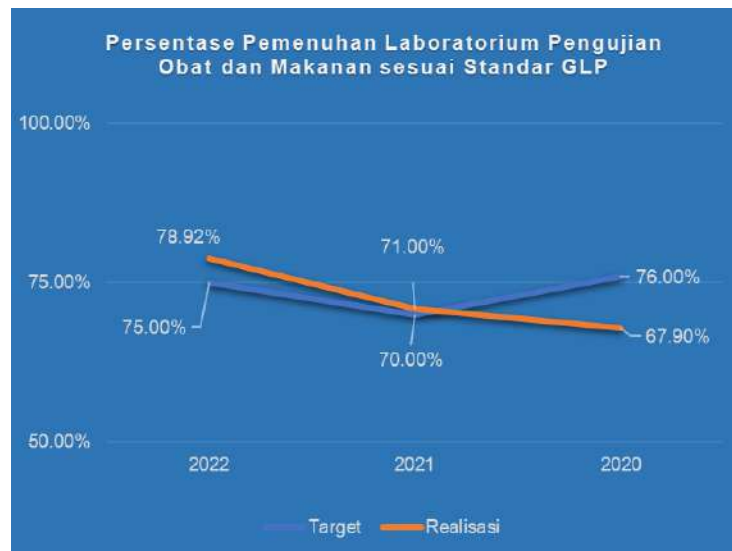
INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	CAPAIAN PENYESUAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	76,67	74,02	74,57	78,92	105,32	105,32

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun tahun sebelumnya

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat terhadap target pada tahun 2022 merupakan realisasi terendah dalam 3 tahun. Terjadi peningkatan jumlah TMS : 33 item TMK (33 item TMK label) di tahun 2020 menjadi 13 item TMK (5 item TMK label dan 8 item TMK uji) di tahun 2021 dan 51 item TMK (34 item TMK label dan 17 TMK uji) di tahun 2022.

Tabel 129. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</i>	75.00%	78.92%	105.32%	70.00%	71.00%	101.43%	76.00%	67.90%	89.34%



Gambar 119. Diagram IKSS 27 perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 130. Perbandingan Realisasi **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP** Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

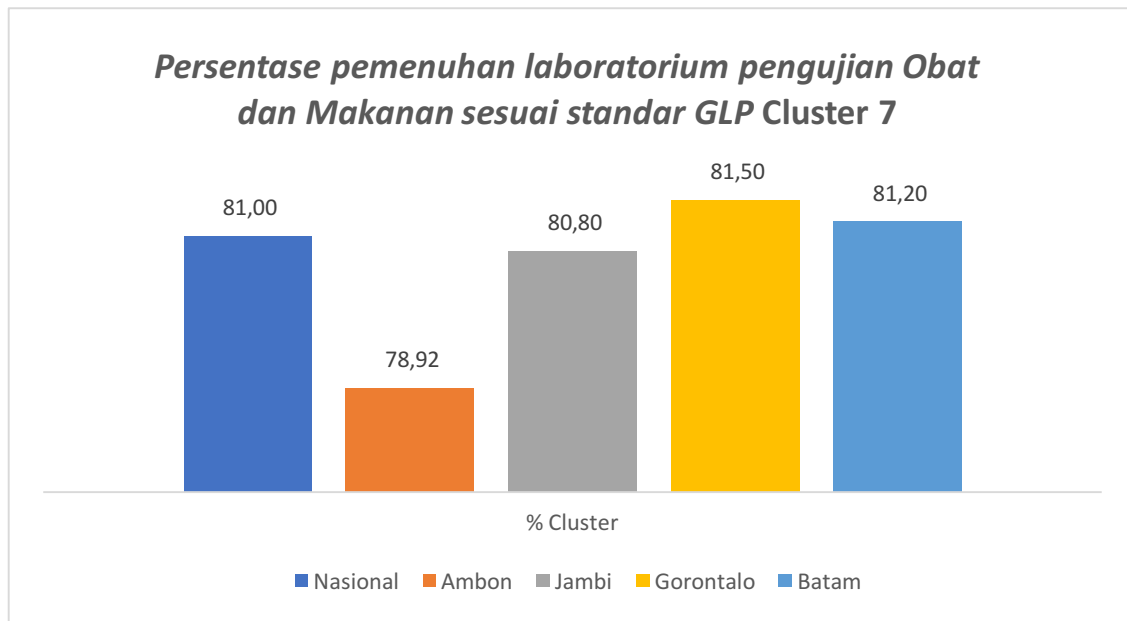
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75,00%	78,92%	105,32%	85,00%	78,92%	92,85%

Realisasi Persentase makanan tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, , masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar target Renstra tahun 2024 dapat tercapai.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM dan target nasional

Tabel 131. Perbandingan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
<i>Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</i>	78,92	80,80	81,50	81,20
Target Nasional	81,00			



Gambar 120. Diagram IKSS 27 Perbandingan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, Realisasi BPOM Ambon adalah paling rendah dan lebih rendah dibandingkan target nasional. Realisasi tertinggi diperoleh BPOM di Kendari.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan laporan ringkas penilaian kemampuan laboratorium BPOM Ambon :

Tabel 132. Penilaian kemampuan laboratorium BPOM Ambon

No	Bidang/ Laboratorium	Persentase Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (%)	Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%)	Persentase Pemenuhan Standar Peralatan (%)
1	Obat dan Nappza	66.5	86.6	65.2
2	Pangan	80.4		
3	Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	93.8		
4	Kosmetik	84.1		
	Rata-rata Kimia	81.2	86.6	65.2
5	Mikrobiologi	82.6	87.6	70.3

Rata-Rata Nilai Pemenuhan (%)	81.88	87.10	67.77
Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium	78.92		

Pada tahun 2021 Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium telah memenuhi batas minimal GLP 75%.

Keberhasilan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada tahun 2022 ini disebabkan oleh:

- Berdasar hasil monev PPPOMN, pada tahun 2022 **Persentase Pemenuhan Standar Peralatan** : 61.47% dan tahun 2022 **70.3%**. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dari penambahan jumlah peralatan laboratorium Mikrobiologi diantaranya air sampler, inkubator 24-26 oC, 36-38 oC, 41-41 oC, inkubator untuk bioindikator.
- Berdasar hasil monev PPPOMN, pada tahun 2022, pemenuhan **Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi (%) 87.10%** (melampaui batas minimal 75%), dengan rician sbb :
 - * untuk laboratorium kimia 86.6% (pada rentang 65,80 - 100) pada tingkat PFM yang sesuai.
 - * untuk laboratorium mikrobiologi 87.6% (pada rentang 77.15-91.63 pada rentang PFM yang sesuai
- Dari data **Standar ruang lingkup** telah melampaui batas minimal 75% yaitu **81.88%** (tertinggi dari ketiga standar pada GLP) karena kenaikan kemampuan uji yang signifikan pada bidang OTSK (72.88 % di 2021 naik ke 93.8% di 2022), kosmetika (65.77 % di 2021 naik ke 84.1% di 2022), dan mikrobiologi (66.67 % di 2021 naik ke 82.6% di 2022). Perencanaan, realisasi dan monev yang dilakukan berkala oleh PPPOMN-BPOM di Ambon menjadi hal yang mendorong peningkatan standar kompetensi PFM.

Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya aktif menyelaraskan GAP dengan perencanaan khususnya pada standar peralatan. Dikarenakan dalam merealisasikan standar ini memerlukan dana dan efisiensi, diperlukan perencanaan dan koordinasi antara BPOM Ambon, PPPOMN, dan keuangan. Demikian pula pada standar ruang lingkup dan kompetensi yang berhubungan dengan regionalisasi laboratorium menjadi hal yang perlu ditingkatkan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2022 antara lain:

- Rapat monev dengan PPPOMN yang dilakukan setiap Triwulan dilakukan sesuai rencana, dan difeedback oleh tiap bagian laboratorium.
- Realisasi standar ruang lingkup yang direncanakan tidak terlepas dari komitmen pimpinan dalam menyediakan sarana dan prasarana yaitu reagen, suku cadang, alat, dan pelatihan. Antara lain pengadaan baku pembanding steviosida
- Kegiatan peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengujian diantaranya Pertemuan teknis Regionalisasi, Pelatihan internal tahun 2022 menggunakan GC-MS dan IAC-HPLC, Bimtek pada sediaan suplemen kesehatan yang mengandung mikrobiotik, webinar pemeliharaan alat dari vendor penyedia alat, serta pendampingan pengujian terhadap PFM lain untuk mendapatkan bukti dukung kompetensi.
- Proses pengadaan secara tender maupun langsung terlaksana dengan baik antara user-panitia teknis-pejabat pengadaan-PPK yang baik sehingga kebutuhana peralatan dapat terealisasi sesuai rencana.
- Menjadikan standar ruang lingkup menjadi target dalam SKP masing masing penguji menyesuaikan dengan kebutuhan dan prasarana yang ada dan menjadi ukuran dalam pemberian reward and punishment.

7. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Rekomendasi untuk Membuat perencanaan program peningkatan SRL dan peningkatan SKL setiap tahun dan dilakukan monev oleh P3OMN setiap tri wulan untuk melihat progress apakah sudah sesuai target telah dilaksanakan.

IKSS 28 PENETAPAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG OPTIMAL

Penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal bertujuan untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Kriteria yang digunakan adalah:

- a. 2,26 – 3 : Optimal
- b. 1,51 – 2,25 : Cukup Optimal
- c. 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- d. 0 – 0,75 : Sangat Kurang Optimal

Terdapat 2 (dua) komponen dalam penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, yaitu :

1) Pemutahiran data

Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam system BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang harus dimutahirkan dalam hal ini adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan

2) Pemanfaatan Sistem

Pemanfaatan Sistem yang dimaksud disini adalah sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja yang terdiri dari Berita Aktual yang ada pada subsite unit kerja, pemanfaatan *Sharing* folder, pemanfaatan dan penggunaan *dashboard* BBC,

serta pemanfaatan dan penggunaan email, dalam hal ini adalah email corporate.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Tabel 133. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan Target Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Target s/d Triwulan				Realisasi s.d Triwulan				Realisasi 2022	Capaian 2022 (%)
		I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,63	2,75	2,75	2,75	122,22%

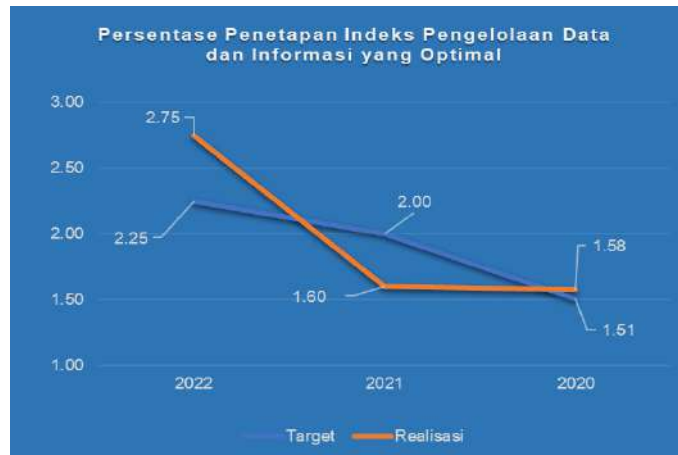
Berdasarkan tabel di atas, perhitungan indikator tersebut diperoleh Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal Balai POM di Ambon terhadap target tahun 2022 adalah 2,75 dengan kriteria **optimal**. Persentase capaian indikator **122,22 %**, yaitu **Tidak dapat disimpulkan**.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2022 dengan 2 (dua) tahun Sebelumnya

Tabel 134. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan 2020.

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<i>Persentase Penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal</i>	2,25	2,75	122,22	2,00	1,6	80,00	1,51	1,58	104,64

Kemudian untuk perbandingan kriteria capaian pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sama, yaitu cukup optimal. Sedangkan pada tahun 2022 kriteria capaiannya yaitu telah optimal.



Gambar 121. Diagram perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra 2020 – 2024
Tabel 135. Perbandingan Realisasi Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal Tahun 2022 Terhadap Target Renstra 2024

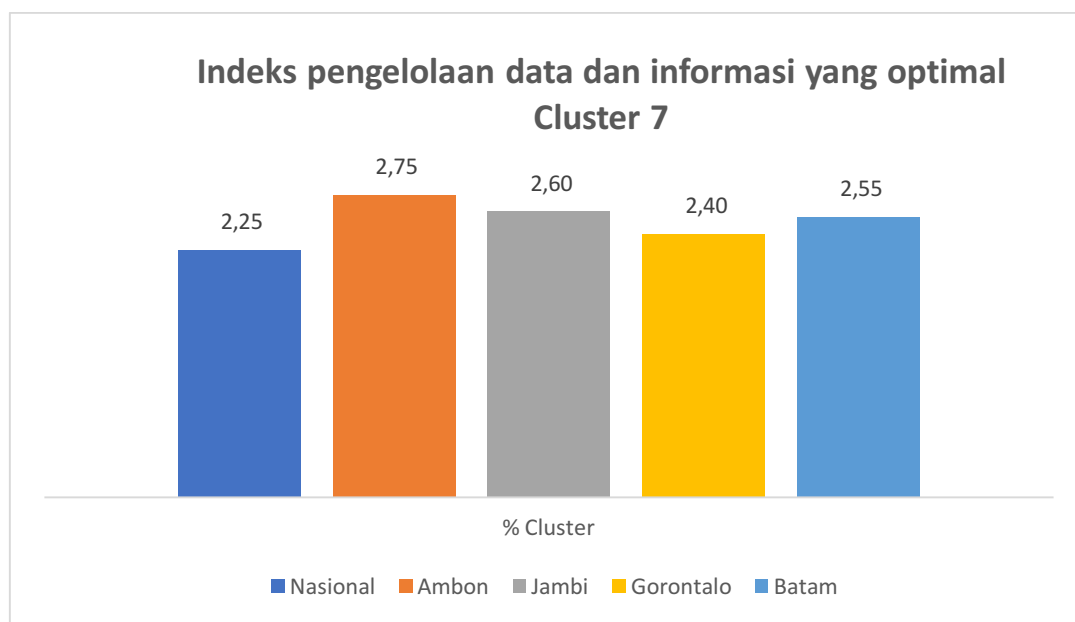
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2022	CAPAIAN THD RENSTRA
Penetapan Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,25	2,75	122,22	3,00	2,75	91,67

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal BPOM di Ambon tahun 2022 belum melampaui target Renstra tahun 2024, sehingga perlu dilakukan peningkatan terkait Indeks pengelolaan data dan informasi.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Sejenis/Setara, dengan IKU BPOM atau Target Nasional

Tabel 136. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Indikator Kinerja	Balai POM Ambon	Balai POM Jambi	Balai POM Gorontalo	Balai POM Batam
Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,75	2,6	2,55	2,40
Target Nasional	2,25			



Gambar 122. Diagram Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di Wilayah Kerja BPOM di Ambon dibandingkan dengan Balai POM yang Setara (Kluster 7) dan Target Nasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal di Wilayah Kerja BPOM di Ambon tahun 2022 paling tinggi dan di atas target nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya kenaikan nilai indeks, antara lain:

- 1) Indeks pemanfaatan sistem informasi email 2 : Adanya monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada seluruh pegawai untuk selalu mengakses email corporate.
- 2) Indeks pemanfaatan sistem informasi sharing folder 3 : Adanya konsistensi pemanfaatan sharing folder dan melakukan kegiatan bidang pemeriksaan.
- 3) Indeks pemanfaatan sistem informasi berita actual 3 : peningkatan jumlah upload berita actual yang diikuti oleh peningkatan jumlah pengunjung hingga rata rata 327 pengunjung/berita actual yang diupload.
- 4) Pada indeks Pemutakhiran BOC-SPIMKER nilai komposit 0,4 : dikarenakan petugas selalu tepat waktu dalam melakukan verifikasi kasus keracunan.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Faktor menunjang keberhasilan pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi adalah sudah dilakukan sentralisasi jaringan pada seluruh pegawai dalam satu manajemen, peningkatan layanan jaringan WIFI dari 30mbps pada 4 titik (TU, inkom, pem, pengujian) menjadi 100mbps dalam 1 manajemen, pembatasan kecepatan pada setiap pegawai agar tidak terintervensi (pembatasan disesuaikan dengan bandwidth balai dengan total user +- 120 perangkat), ketersediaan alat pengolah data yang terjangkau oleh semua personil pegawai BPOM Ambon dan komitmen untuk selalu melakukan pemanfaatan informasi data dan pemutakhiran BOC secara berkala.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Telah dilaksanakan login yang konsisten setiap bulan agar nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM-BOC; SIPT telah digunakan secara konsisten di tahun 2022, serta komunikasi dengan Pusdatin terkait kendala SIPT.

SASARAN STRATEGIS 11

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel
Pada Tahun 2022, BPOM di Ambon mencapai NPS 96,60%
(belum memenuhi ekspektasi)

Pencapaian sasaran strategis IV pada tahun 2022 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, yang diuraikan sebagai berikut :

IKSS 29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- 1) Revisi DIPA
- 2) Deviasi Halaman III DIPA
- 3) Pengelolaan UP
- 4) Rekon LPJ Bendahara
- 5) Data Kontrak
- 6) Penyelesaian Tagihan
- 7) Penyerapan Anggaran
- 8) Retur SP2D
- 9) Perencanaan Kas (Renkas)
- 10) Pengembalian/Kesalahan SPM
- 11) Dispensasi Penyampaian SPM

- 12) Pagu Minus
- 13) Konfirmasi Capaian Output

1. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 137. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon tahun 2022

INDIKATOR	TARGET 2022 (%)	TARGET s.d. (%)				REALISASI s.d. (%)				CAPAIAN 2022	KRITERIA CAPAIAN
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV		
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	61.51	59.40	59.89	89.84	96,60	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM Ambon adalah 89,84 dengan **capaian 96,60%** kategori “belum memenuhi ekspektasi”.



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN LIP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	061	063	432548	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	Nilai	100.00	81.40	93.79	100.00	100.00	99.57	100.00	100.00	96.85	100%	96.85
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.14	18.76	10.00	10.00	9.96	5.00	25.00			
					Nilai Aspek		90.70			98.67		100.00				

Disclaimer:
Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-S/PS/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 123. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM Ambon Tahun 2022

2. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 138. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun 2021 dan 2020 BPOM Ambon

INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2021			TAHUN 2020		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Kinerja Anggaran BPOM Ambon	93,00	89,84	96,60%	92,40	89,87	97,26%	93,00	90.63	97.45 %

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran BPOM Ambon pada tahun 2020, 2021 dan 2022 relatif sama, tidak mengalami peningkatan.

Dalam Tampilan Diagram



Gambar 124. Diagram perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun Sebelumnya

3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target renstra 2020-2024 BPOM Ambon

Tabel 139. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra 2020-2024 BPOM Ambon

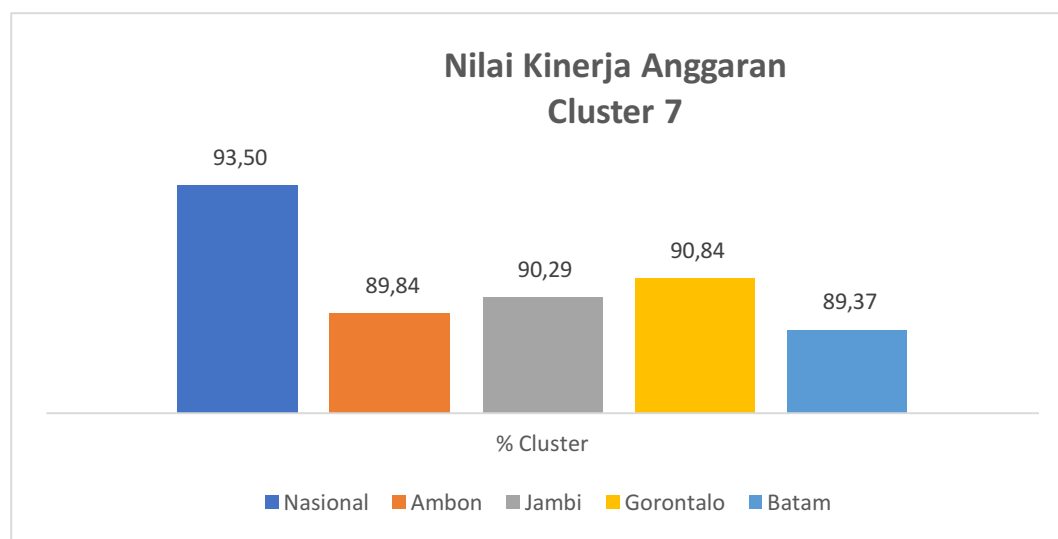
INDIKATOR	TAHUN 2022			RENSTRA 2020-2024		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI 2021	CAPAIAN THD RENSTRA
Nilai Kinerja Anggaran BPOM Ambon	93,00	89,84	96,60%	95	89.84	94.57%

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon tahun 2022 **belum mencapai** target Renstra tahun 2024, dengan kategori belum memenuhi ekspektasi. Sehingga masih diperlukan upaya perbaikan secara berkesinambungan agar capaian terhadap target Renstra tahun 2024 tidak menurun atau meningkat.

4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 140. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Indikator Kinerja	BPOM di Ambon	BPOM di Jambi	BPOM di Gorontalo	BPOM di Batam
Nilai Kinerja Anggaran	89.84	90.29	90.84	89.37
Target Nasional	93.5			



Gambar 125. Diagram IKSS 29 Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran tahun 2022 dengan balai lain sejenis dan target nasional

Apabila dibandingkan dengan Balai sekluster, realisasi BPOM Ambon berada di tengah capaian realisasi kluster 7 tahun 2022.

5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

- kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibarengi dengan efisiensi penggunaan anggaran yang rendah. Nilai EKA memiliki bobot 60% dan IKPA 40%. untuk komponen di EKA terdiri atas 4 bagian yaitu penyerapan, konsistensi, capaian realisasi output dan efisiensi. nilai terendah dari keempat komponen adalah dari efisiensi.
- Belum terisinya CAPUT bulan november yang mempengaruhi nilai EKA dan IKPA

Rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan :

RPD harus disesuaikan dengan realisasi bulanan dengan melakukan koordinasi dengan masing-masing korpoksi untuk menyesuaikan realisasi dengan RPD. Volume RO juga harus disesuaikan dengan anggaran.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis keenam antara lain :

- Desk data e-monev dan data manual secara continue untuk menjamin validitas data yang disajikan
- Menetapkan petugas khusus sebagai penanggungjawab seluruh data kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis keenam Pengisian rutin e-monev . antara lain :

- Pelaporan kinerja sesuai timeline.
Hal-hal yang perlu ditingkatkan agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian ini pada tahun mendatang adalah :
- Peningkatan kompetensi petugas perencana dan pengumpul data dalam penginputan data agar sesuai dengan timeline

- Monitoring dan evaluasi secara kontinyu terhadap update data kinerja setiap bulan - Desk data secara continue
- Mengoptimalkan tim evaluasi kinerja yang ada agar konsisten memantau pencapaian kinerja - Secara ketat menerapkan sistem penilaian SKP setiap tri wulan berdasarkan cascading yang telah ditetapkan.

Dari hasil analisis tersebut dapat dijelaskan bahwa BPOM di Ambon telah menerapkan secara konsisten sistem AKIP yang terdiri dari tahapan perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, akuntabilitas kinerja BPOM di Ambon, meskipun demikian perbaikan secara continue harus tetap dilaksanakan sehingga dapat ditingkatkan perolehannya di Tahun 2022.

7. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Adapun Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya BPOM di Ambon :

- Melakukan Desk data monev setiap awal bulan - Sudah adanya petugas khusus penanggung jawab data kinerja - Pelaporan Kinerja yang tepat waktu

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada sub bab ini diuraikan progress tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan oleh APIP pada pelaksanaan SAKIP sebelumnya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 141. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi APIP sebelumnya

No	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
			Selesai	Belum	
				Rencana Aksi	Timeline
<i>Berdasarkan surat hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022 dari surat Inspektur Utama nomor B-PI.04.7.72.01.23.10 tanggal 18 Januari 2023 :</i>					
1	Terdapat hal yang menyebabkan hasil penilaian tidak optimal yaitu belum seluruh Satuan Kerja mengimplemen tasikan sistem maupun	BPOM melakukan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performance (e-planning dan SIMETRIS) SECARA memadai, konsisten, pengisian data pada aplikasi lengkap, berkala, dan isian data harus selaras antar laporan.		1.Melakukan input pada aplikasi pelaporan kinerja e-performance dan evaluasi internal pada tiap bulan dengan tepat waktu dan sesuai dengan data yang disajikan dalam RHPK INTERNAL, 2.melakukan revisi data pada apk eplanning	Sebelum tgl10 pada tiap bulannya dan menyesuaikan data setiap kali ada revisi Anggaran baik revisi POK maupun revisi DIPA

	pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten, pengisian data oleh Satuan Kerja pada aplikasi yang dibangun di BPOM tidak lengkap, tidak berkala, maupun isian data tidak selaras antar laporan.	Melakukan pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN; melakukan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP	setiap kali ada revisi Anggaran baik revisi POK maupun revisi DIPA	
2	Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya.	Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain	Membuat program dan inovasi yang menunjang kenaikan nilai komponen yang memerlukan perhatian, dan mengupayakan penghargaan/apresiasi dari Unit/instansi lain	tahun 2023
3	Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP.	Melakukan tindakan perbaikan, peningkatan yang lebih komprehensif untuk mencapai target sasaran tiap indikator kerja. Antara lain memaksimalkan sistem monev serta tindak lanjutnya, melakukan sosialisasi dan pengumuman berkala pada kesempatan seperti apel atau rapat	Melakukan pembahasan RATL TIAP indikator setiap rapat evaluasi internal pada tiap bulan; dan menginternalisasinya	tahun 2023
Berdasarkan LKE AKIP BPOM Ambon hasil desk tanggal 21.11.2022 :				
4	Perencanaan	1. Terinternalisasi kepada Seluruh Pegawai ; 2. Menambahkan mapping antara analisa internal-eksternal vs analisa SWOT vs tujuan dan strategis; 3. Memastikan akan IKU antar Substansi tidak tumpang tindih (bila perlu pakai Koordinator) ; 4. Anggaran antara RAPK dan RKA	1. Terinternalisasi membuat program kepada Seluruh Pegawai ; 2. Membuat mapping antara analisa internal-eksternal vs analisa SWOT vs tujuan dan strategis; 3. Memastikan akan IKU antar	2023

		selalu dipastikan cocok		Substansi tidak tumpang tindih (bila perlu pakai Koordinator) ; 4. Memastikan anggaran antara RAPK dan RKA selalu cocok	
5	Pengukuran Kinerja	1. SOP Monev agar lebih detail dan sesuai dengan proses yg dilaksanakan; 2. Evaluasi Internal (notulen) memuat Capaian setiap IKU (input dan ouput), alasan capaian, RATL terhadap kendala/hambatan, penjelasan bila terjadi revisi anggaran (input); 3. Bukti komitmen pimpinan serta pegawai untuk pencapaian kinerja organisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai.		1. Melengkapi SOP Monev agar lebih detail dan sesuai dengan proses yg dilaksanakan; 2. Evaluasi Internal (notulen) memuat Capaian setiap IKU (input dan ouput), alasan capaian, RATL terhadap kendala/hambatan, penjelasan bila terjadi revisi anggaran (input); 3. Bukti komitmen pimpinan serta pegawai untuk pencapaian kinerja organisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai.	2023
6	Evaluasi Akuntabilitas	RATL LHE tahun sebelumnya dan diformalkan		Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja dan menginternalisasinya	2023
7	Capaian Kinerja	Menjelaskan capaian (tertinggi/terendah), progress capaian dengan sebelumnya dan strategi	selesai		
Berdasarkan surat laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021					
8	Perencanaan : Nilai 24.80, turun dari 25.41	Belum terdapat pengesahan pada Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 yang telah dipublikasikan pada website Badan POM; pada matriks pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi dalam Bab III Renstra diketahui terdapat perbedaan narasi sasaran kegiatan antara matriks pemetaan sebagaimana disebutkan di atas dengan narasi sasaran kegiatan pada Bab IV Renstra.; ketidakseragaman antar Balai terhadap pemetaan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan dan strategi dalam Bab III Renstra. ; target kinerja jangka	selesai.		

		menengah, jangka pendek dan triwulanan belum didukung dengan kertas kerja penetapan target, dasar basis data yang memadai serta cara perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target kinerja; belum terdapat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil perkembangan target jangka menengah; RAPK belum ada sub bagian rinci			
9	Pengukuran : 18.13, naik dari 16.88	IKU belum dilakukan reuiu secara berkala; Belum terdapat penetapan PK dan hasil cascading turunan dari Unit Kerja sampai dengan individu; SOP pengumpulan data kinerja belum ditetapkan; hasil monitoring target kinerja setara eselon IV belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment ; pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja masih belum sepenuhnya diakomodir oleh aplikasi e-performance	selesai		
10	Pelaporan : 11.59, Naik dari 11.51	Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan; belum adanya tindak lanjut atas rekomendasi dalam BAB IV Laporan Kinerja dan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Utama; Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja belum dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment	selesai		
11	Capaian kinerja : 13.39. Turun dari 14.34	Memaksimalkan pemanfaatan pemantauan rencana aksi, laporan evaluasi internal dan laporan interim dalam rangka pemantauan kinerja.; peningkatan keandalan data kinerja yang disajikan, untuk menjadi data kinerja yang andal dan mampu telusur dengan cara dilengkapi dengan lampiran data dukung yang memadai dan tepat.	selesai		

3.3 Efisiensi anggaran

Anggaran Kegiatan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal pada Tahun 2022 sebesar Rp 23.670.173.000,- (Dua puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Tanggal 04 Desember DIPA Pemotongan APBNP keluar sehingga Pagu Balai POM di Ambon berubah menjadi Rp 22.551.018.000,- (Dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh satu juta delapan belas ribu rupiah). Untuk Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan 4 Tahun 2022 Balai POM di Ambon dari jumlah anggaran yang dialokasikan telah terealisasi sebesar Rp 22.493.574.379,- (Dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) atau sebesar **99.75%**.

Tabel 148. Realisasi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2022

OUTPUT		Awal 2022		Target APBN 2022		Realisasi 2022	
		Volume	Pagu (Rp)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)
AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	14	140,754,000	14	140,754,000	14	140,995,850
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	153	117,465,000	153	117,465,000	180	117,229,400
BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	69,571,000	21	69,571,000	21	69,261,050
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	159,488,000	1	159,488,000	1	154,157,350
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	39	143,077,000	39	143,077,000	39	141,494,500

CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	75,000,000	1	75,000,000	1	74,145,350
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	118,424,000	1	118,424,000	1	117,609,570
EBA.962	Layanan Umum	1	608,152,000	1	608,152,000	1	608,140,500
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1,371,010,000	1	1,371,010,000	1	1,369,226,251
QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	3	367,634,000	3	367,634,000	3	365,643,933
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1,600	190,600,000	1,600	190,600,000	1612	188,199,150
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56	691,166,000	56	691,166,000	56	687,772,400
QDB.002	Desa Pangan Aman	18	735,042,000	18	735,042,000	18	731,419,650
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	6	95,060,000	6	95,060,000	6	93,186,000
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	435	466,750,000	435	466,750,000	444	464,752,270
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	1,440	984,886,000	1,440	984,886,000	1,440	984,691,390

QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	83	71,153,000	85	71,153,000	85	70,818,700
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa Oleh BB/BPOM	93	77,544,000	93	77,544,000	93	77,103,800.00
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1,029	1,446,388,000	1,029	1,446,388,000	1,042	1,436,046,250
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	3,390,185,000	1	3,390,185,000	1	3,390,133,500
EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	11,231,669,000	1	11,231,669,000	1	11,211,547,515
TOTAL					22,551,018,000		22,493,574,379

Pengelolaan anggaran BPOM di Ambon senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan BPOM Ambon dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- ✓ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- ✓ Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- ✓ Percepatan pengadaan barang dan jasa

Analisis Efisiensi Kinerja

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). dengan kriteria :

- $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien,
- $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 146. Tingkat Efisiensi

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tingkat efisiensi kinerja BPOM Ambon tahun 2022 sebagai berikut :

Table 147. Tingkat efisiensi kinerja BPOM Ambon tahun 2022

	OUTPUT	TE	KATEGORI
AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BB/BPOM	0.00	Efisien
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM	0.18	Efisien
BDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	0.00	Efisien
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0.03	Efisien
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BB/BPOM	0.01	Efisien
CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0.01	Efisien
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0.01	Efisien
EBA.962	Layanan Umum	0.00	Efisien
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.00	Efisien
QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	0.01	Efisien
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0.02	Efisien
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.00	Efisien
QDB.002	Desa Pangan Aman	0.00	Efisien
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	0.02	Efisien
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0.03	Efisien
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BB/BPOM	0.00	Efisien
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa oleh BB/BPOM	0.00	Efisien
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa Oleh BB/BPOM	0.01	Efisien

QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	0.02	Efisien
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	0.00	Efisien
EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	0.00	Efisien
TOTAL		0.01	Efisien

Pada tahun 2022 BPOM di Ambon melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil semua kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 sampai 0,18. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BB/BPOM mempunyai TE tertinggi karena output tercapai melebihi target dengan penyerapan anggaran 99.80%.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BPOM Ambon mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Tabel 148. Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis		IE	TE	Capaian TE
Stakeholder Perspective				
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	0.96	-0.04	75 %
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	1.00	0.00	100 %
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.02	0.02	100 %
Internal Process Perspective				
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.08	0.08	100 %
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.01	0.01	100 %
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.00	0.00	100 %
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.13	0.13	100 %
Learning & Growth Perspective				
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	1.03	0.03	100 %
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.01	0.01	100 %
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	1.12	0.12	100 %
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	0.97	-0.03	75 %
Efisiensi Total				100 %

Realisasi efisiensi anggaran total 11 sasaran strategis adalah “Efisien” karena mencapai nilai 100%. Capaian indikator sasaran strategis yang belum sepenuhnya efektif karena capaian outcome yang lebih kecil dibandingkan anggaran yang dikeluarkan. Kedepannya diperlukan upaya peningkatan capaian realisasi target sasaran strategis, jika memungkinkan menghapus kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- I. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp 1.004.108.207,- atau 4,46% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan sampel dan pengujian sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan; FGD Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan; Bimbingan teknis / FGD/ Sosialisasi, dan kegiatan penunjang lain. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama adalah “tidak efisien” .
- II. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedua “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp 116.410.579,- atau 0,52% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Talkshow, Pameran, Sosialisasi di Media; Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pengawasan Obat dan Makanan; Pemberdayaan Masyarakat, dan kegiatan penunjang lain. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kedua adalah “ efisien”
- III. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketiga “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp 166.710.408,- atau 0,74% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk

kegiatan Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pengawasan Obat dan Makanan; Sosialisasi dan Desk registrasi dalam rangka jemput bola Registrasi Pangan Olahan; Pameran dan sosialisasi di media ; KIE; pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketiga adalah “efisien”.

- IV. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp 1.598.220.958,- atau 7,11% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan oleh petugas balai (Luar/ Dalam Kota) di Prov Maluku; Operasi Gabungan Menjelang Lebaran, Natal/Tahun Baru; Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan; Pemeriksaan sarana dalam rangka perizinan dan sertifikasi; Bimtek Pendampingan UMKM; Pendampingan dan monitoring UMKM dalam pemenuhan standar , dan kegiatan penunjang lain. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah “efisien” .
- V. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp 1.573.186.713,- atau 6,99% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Komunikasi informasi dan Edukasi Masyarakat mengenai Pengawasan Obat dan Makanan; Pemberdayaan Masyarakat; Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan KIE Pengawasan Obat dan Makanan; Koordinasi / Evaluasi dan Monitoring dalam rangka Pengawasan PJAS; Penyuluhan Komunitas pasar dan Kampanye Pasar; Pengawasan Keamanan Pangan Pasar , dan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kelima adalah “efisien”.
- VI. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis keenam “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp573.980.287,- atau 2,55% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk Pengujian Sampel Obat,

Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan dan Makanan; Perkuatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan dan Rokok; Peningkatan Kapasitas Petugas Pengawasan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah “efisien”

- VII. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis ketujuh “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp506.639.783,- atau 2,25% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Peningkatan Kompetensi petugas dalam rangka Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan; Penyusunan Analisis, Koordinasi / Konsultasi dan Kerja sama penyelesaian Kejahatan dan Penjejukan Digital Kejahatan Obat dan Makanan; Pelaksanaan operasi intelijen, operasi penindakan , dan kegiatan penunjang penindakan lain.. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah “efisien”
- VIII. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kedelapan “Terwujudnya tata kelola pemerintahan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp179.442.575,- atau 0,80% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Surveilans, Optimalisasi Zona Integritas Menuju WBK 2022; Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keenam adalah “efisien”
- IX. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesembilan “Terwujudnya SDM di wilayah kerja BPOM di Ambon yang berkinerja optimal” sebesar Rp390.631.433,- atau 1,74% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Rapat Evaluasi dan Bimbingan Teknis / Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Petugas BPOM Ambon; Pembinaan dan Peningkatan Jasmani dan Rohani Pegawai; Bimtek Analisis/ Workshop Teknis dan Manajerial. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesembilan adalah “efisien”

- X. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesepuluh “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp4.936.045.671,- atau 21,94% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini Rekalibrasi alat laboratorium; Surveilans Laboratorium oleh KAN BSN; Bimtek Analisis dengan Instrumen Bidang Kimia Obat dan NAPZA; Bimtek /Workshop Teknis, Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesepuluh adalah “efisien”.
- XI. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran strategis kesebelas “Terkelolanya Keuangan di wilayah kerja BPOM di Ambon” sebesar Rp11.448.197.765,- atau 50,90% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM; Pelaksanaan Implementasi SAI dan Operasional Satuan Kerja; Honor tenaga pendukung manajemen satker; Konsultasi / Koordinasi / Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengawasan obat dan Makanan serta Perjalanan Pimpinan; Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis kesebelas adalah “tidak efisien”.

3.4. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

- Berdasarkan analisa yang telah ditampilkan pada laporan kinerja sebelumnya dan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan, terlihat adanya pola kecenderungan kenaikan realisasi dari seluruh target indikator. Namun dikarenakan evaluasi capaian untuk tahun 2022 ini berubah yang sebelumnya di tahun 2021 dikatakan baik pada rentang capaian 90-110%, sehingga gambaran yang memenuhi ekspektasi hanya 14 indikator dan 2 indikator tidak dapat disimpulkan (capaian diatas 120%).

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Realisasi 2021	Realisasi 2022	Keterangan
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	IKSS1	Persentase obat yang memenuhi syarat	66.47%	81.89	Naik
		IKSS2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	97.55%	84.96	Turun
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64.81%	73.40	Naik
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.67%	86.67	Turun
		IKSS5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	95.00%	91.76	Turun
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	IKSS6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Ambon	78.32	76.12	Turun
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.30	92.87	Naik
		IKSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	68.02	71.15	Naik
		IKSS9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	89.48	92.41	Naik

SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00%	100.00	Naik
		IKSS11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55.13%	74.55	Naik
		IKSS12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	90.82%	100.00	Naik
		IKSS13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68.42%	78.49	Naik
		IKSS14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72.01%	76.01	Naik
		IKSS15	Indeks Pelayanan Publik	4.46	4.38	Turun
		IKSS16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	97.78	-
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS17	Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan	95.17	93.76	Turun
		IKSS18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	56.00	Naik
		IKSS19	Jumlah desa pangan aman	12	18.00	Naik
		IKSS20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	6.00	Naik
SS6	Meningkatnya efektivitas	IKSS21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	99.58%	98.19	Turun

	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00%	100.00	Naik
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75.00%	88.00	Naik
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	IKSS24	Indeks RB BPOM di Ambon	83.21	90.72	Naik
		IKSS25	Nilai AKIP Balai POM di Ambon	75.715	76.92	Naik
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS26	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	74.34	83.18	Naik
SS10	Memkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	IKSS27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	71.00%	78.92	Naik
		IKSS28	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal	1.6	2.75	Naik
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	IKSS29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	89.87	89.84	Turun

- Terkait sasaran strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon telah dilakukan intervensi yang sesuai, dan membutuhkan dukungan/tindak lanjut baik dari pusat maupun stakeholder, agar pencapaiannya dapat maksimal, khususnya mengenai persyaratan penilaian label yang berubah ubah dan belum secara keseluruhan diimplementasikan oleh produsen lokal maupun luar Maluku.
- Pada tahun 2022 pencapaian 2 indikator melewati batas ekspektasi (diatas 120%) sehingga untuk tahun 2023 akan diusulkan untuk menaikkan target/rencana dikarenakan capaian di tahun 2022 ini telah melewati target renstra 2024.
- Laporan triwulan di TW I pada IKSS 1 realisasi nya yang semula 82,35% menurun di triwulan kedua menjadi 71,95% dilakukan langkah antara lain dan sesuai juknis terbaru penerapan TMK Minor yang telah dimulai untuk sampel Juni yang rutin dilakukan oleh BPOM di Ambon, KIE dan pembinaan sarana distribusi . Hal ini sangat bermanfaat sehingga ada peningkatan realisasi persentase obat yang memenuhi syarat 79,87 % (TW III) dan 81,89 % (TW IV). Hasil Capaian 94,61% cukup meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 86,55%.
- Laporan triwulan di TW I pada IKSS 3 realisasi nya yang semula 75,56% menurun di triwulan kedua menjadi 61,88% sehingga dilakukan langkah antara lain penerapan TMK Minor yang telah dimulai untuk sampel Juni yang rutin dilakukan oleh BPOM di Ambon, KIE dan pembinaan sarana distribusi . Hal ini sangat bermanfaat sehingga ada peningkatan realisasi persentase obat yang memenuhi syarat 68,99 % (TW III) dan 73,4 % (TW IV). Hasil Capaian 85,35% cukup meningkat dibandingkan tahun 2021 yang hanya 76,25%.
- laporan dapat digunakan IKSS 15 :untuk monev terhadap progress UMKM yang didampingi secara berkala sehingga pencapaian realisasi dapat disesuaikan dengan target ; dan sebagai seleksi awal dalam penetapan target UMK yang didampingi diperketat dengan memilih yang memiliki komitmen tinggi baik dari sisi pembiayaan sarana produksi
- Berdasarkan laporan kinerja tahunan dipaparkan untuk setiap bagian yang berperan dalam pencapaian indikator obat dan makanan yang aman dan

bermutu, agar secepat dalam melakukan tindakan perbaikan/ peningkatan melalui program program yang mendukung. .

LAPORAN KINERJA 2022



BAB IV PENUTUP

BALAI PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI AMBON



PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode Rencana Strategis 2020-2024, Pada tahun 2022 ini evaluasi kinerja didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2022 yang mengacu pada Renstra BPOM di Ambon tahun 2021-2024, Reviu Renstra 2020-2024, dan DIPA tahun 2022. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 21 kegiatan utama.

- Secara keseluruhan terdapat peningkatan capaian terhadap target tahunan 2022 dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Nilai NPSS total BPOM di Ambon pada tahun 2021 total adalah 97,41% naik menjadi 101,39% kriteria MEMENUHI EKSPEKTASI di tahun 2022 dan capaian terhadap target seluruh indikator telah mendekati angka capaian 100%. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 128 Tahun 2022, kriteria pencapaian sasaran strategis memenuhi ekspektasi pada rentang capaian $100\% \leq x \leq 120\%$, mengalami kenaikan dibanding tahun 2021 dimana kriteria pencapaian sasaran strategis dikatakan 'baik' pada rentang $90\% \leq x \leq 110\%$.
- Diperoleh nilai NPSS sebesar 101,39% dengan nilai NPS perspektif stakeholder sebesar 96,13%, NPS perspektif internal proses sebesar 104,71%, NPS perspektif learning & growth sebesar 103,32%.
- Nilai capaian keberhasilan tiap sasaran strategis BPOM Ambon tahun 2022 sebagai berikut :

Sasaran strategis		NPS	Kriteria	Pola perubahan capaian terhadap target dari 2021 ke 2022	Strategi untuk meningkatkan capaian terhadap target yang juga meningkat
1	Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	93.48%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Turun 0,11%	-
2	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	95,15%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Turun 6,56%	-
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	99.77%	Belum Memenuhi Ekspektasi	Naik 2,45%	Meningkatkan bimbingan dan pendampingan pada setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan pelaku usaha
4	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	107.35%	Memenuhi Ekspektasi	Naik 9,44%	Peningkatan komitmen pelaku usaha dalam pendampingan proses perizinan ; Peningkatan komunikasi dengan PIC terkait, serta intervensi melalui desk CAPA; Optimalkan peran pemda melalui instansi terkait, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha ; Peningkatan

					pemahaman, pembinaan, pendampingan bagi fasilitas produksi
5	Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	99,57%	Belum Memenuhi Ekspetasi	Turun 0,74%	-
6	Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	99,10%	Belum Memenuhi Ekspetasi	Turun 0,69%	-
7	Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkungan kerja Balai POM di Ambon	112,82%	Memenuhi Ekspetasi	Naik 14,14%	Meningkatkan frekuensi koordinasi dengan komponen Criminal Justice System sehingga setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dapat berjalan dengan baik
8	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon	102,43%	Memenuhi Ekspetasi	Naik 3,05%	Meningkatkan nilai komponen pengungkit dan hasil dengan menambah inovasi inovasi BPOM di Ambon dan peningkatan layanan publik; Melakukan perbaikan terhadap rekomendasi APIP

9	Mewujudkan SDM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon yang berkinerja optimal	100,52%	Memenuhi Ekspetasi	Naik 10,41%	Mengkoordinir untuk semua fungsional mengikuti pelatihan untuk mendapatkan nilai IP pegawai sesuai target.
10	Melakukan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	113,72%	Memenuhi Ekspetasi	Naik 23,01%	Kenaikan standar ruang lingkup dan standar peralatan yang signifikan dengan meningkatkan kemampuan uji dan kesiapan sarana prasarana pengujian; Intervensi 4 indeks penyumbang dan menindaklanjuti rekomendasi tahun lalu untuk pemanfaatan SIPT dan BOC di tahun 2022.
11	Pengelolaan keuangan secara Akuntabel	96,60%	Belum Memenuhi Ekspetasi	Turun 5,22%	-

- Indikator Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki capaian terendah 85,35% (capaian 85,35%) dengan realisasi 73,40% karena masih banyak ditemukan peredaran obat dengan penandaan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK label penandaan). sedangkan capaian tertinggi pada indikator “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sebesar 126,99 % dengan realisasi 97,78% .

Sasaran “Mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkungan kerja Balai POM di Ambon” menjadi capaian terendah terhadap target 2022 (93,485%), sedangkan sasaran “Melakukan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat

dan makanan” menjadi capaian tertinggi terhadap target 2022 (113,72%). Sedangkan sasaran yang mengalami kenaikan yang tertinggi / sangat signifikan yaitu sasaran strategi “Melakukan penguatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan”.

Capaian indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (126,99%) dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal (122,22%), telah melebihi 120% menunjukkan keberhasilan dalam mencapai melebihi target tahun 2023/2024 dengan upaya yang maksimal.

- Strategi yang dilakukan dalam mencapai kenaikan capaian terhadap target antara lain dengan melakukan tindak lanjut/ intervensi terhadap masukan dari analisa internal maupun masukan eksternal serta melakukan program pendukung.
- Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 hingga 0,18., dengan tingkat efisiensi 100 untuk total sasaran strategis masuk kriteria **EFISIEN**.
- Pemanfaatan laporan kinerja tahun 2021 dapat dilihat dari kenaikan signifikan nilai NPSS 97.41% (tahun 2021) menjadi 101.39% (tahun 2022).
- Target kinerja untuk seluruh BPOM di Ambon telah di monitor capaiannya setiap triwulan dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hasil monitoring tersebut telah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*. Pemberian reward yang telah diterapkan adalah kriteria pegawai teladan (pertahun) dan pegawai Manise (per bulan), pemberian nilai perilaku yang baik pada SKP sedangkan *punishment* berupa penilaian yang buruk sampai dengan pemotongan tunjangan kinerja.
- Berdasarkan perbandingan realisasi indikator sasaran pada kluster 7 (BPOM di Jambi, BPOM di Ambon, BPOM di Gorontalo, BPOM di Batam), BPOM di Ambon mencapai realisasi tertinggi untuk indikator sasaran strategis 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 20, 28 di tahun 2022.
- Sasaran strategis “Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja balai POM di Ambon” menjadi perhatian khusus dikarenakan kelima target belum memenuhi ekspektasi, namun BPOM di Ambon telah dilakukan berbagai upaya dan dikarenakan sasaran stakeholder ini menjadi tanggung jawab

berbagai pihak sehingga koordinasi dan kolaborasi harus lebih maksimal dalam mencapai Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Maluku.

4.2. Saran

4.2.1 Perlu dibuat perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring evaluasi yang komprehensif di tahun 2023 dengan memanfaatkan hasil evaluasi tahun 2022 untuk mencapai target 13 indikator yang belum memenuhi ekspektasi di tahun 2021 (belum mencapai 100% target), yaitu :

- Indikator ke-1 – 5 : sasaran strategis terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon diperlukan peningkatan : “Perlu koordinasi antara BPOM Ambon dengan Kepedutan BADAN POM khususnya untuk TMK penandaan, tindak lanjut pelaporan TMK dan koordinasi dengan Pemda, monitoring dan evaluasi terhadap TMK penandaan dan TMS uji di tiap bulan berjalan serta melakukan inovasi terkait penyampaian penyebaran informasi ke kalangan pelaku usaha dan masyarakat “.
- Indikator ke-6 : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Ambon (95,15%) : diperlukan peningkatan penyusunan konten/materi informasi dan edukasi tentang produk Obat dan Makanan yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pesan utama yang perlu disampaikan untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait pengenalan logo obat, petunjuk penyimpanan produk, nomor ijin edar, tanggal kedaluwarsa, ciri-ciri dan efek samping produk yang mengandung bahan berbahaya khususnya pada obat tradisional dan pangan olahan. BPOM di Ambon harus meningkatkan pemberdayaan peran komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan informasi tentang Obat dan Makanan .
- Indikator ke-8 : Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan(99,40%) : diperlukan peningkatan optimalisasi pelibatan media secara aktif dalam publikasi hasil pengawasan, intensifikasi KIE dengan bentuk sosialisasi yang mudah diterima oleh masyarakat, tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BPOM Ambon harus ringkas dan menarik serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus konsisten untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk

yang berbahaya.

- Indikator ke-9 : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM (96,26%); Diperlukan peningkatan : Penyebarluasan informasi non elektronik lebih intensif agar memberi akses bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi.
- Indikator ke-15 : Indeks Pelayanan Publik (98,43%); Diperlukan peningkatan tampilan prosedur pelayanan dalam bentuk infografis agar pelanggan dapat memahami dengan jelas, publikasi standar pelayanan melalui media elektronik dan non elektronik.
- Indikator ke-17: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan (98,28%); Penyesuaian tema KIE terhadap isu terkini atau yang menjadi perhatian masyarakat luas sehingga meningkatkan minat masyarakat terhadap KIE yang BPOM di Ambon laksanakan.
- Indikator ke-21 : Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (98,19%); Diperlukan peningkatan : Koordinasi yang baik dan komunikasi efektif antara laboratorium uji BPOM Ambon dengan laboratorium satu region 6 (BBPOM Manado) terkait sampling, pengiriman dan pengujian regionalisasi; Perencanaan kebutuhan perawatan instrumen laboratorium (HPLC, GC, AAS dan GC MS) untuk mencegah resiko kerusakan alat karena beban sampel yang tinggi.; Lebih intensif dalam monitoring penanganan flow sampel agar tidak menumpuk di akhir tahun; dukungan penuh dari ketersediaan sarana dan prasarana, peralatan/ pendukung, metoda uji, reagen/media, kompetensi penguji (pelatihan teknis pengujian).”
- Indikator ke-25 : Nilai AKIP UPT (99.38%), Diperlukan peningkatan : “Penilaian mandiri LKE oleh tim SAKIP Balai POM Ambon terhadap hasil monitoring dan evaluasi kinerja internal untuk perbaikan pelaksanaan program secara periodik; memanfaatkan informasi kinerja yang telah disajikan dilengkapi dengan dasar perhitungan (formulasi) yang valid dan didukung dengan sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten) dan mampu telusur”
- Indikator ke-29 : Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon “ Pemantauan Ikpa dan Eka Secara Berkala dan Perencanaan Yang Matang”.

4.2.2. Untuk indikator capaian yang melebihi 120% Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

(126,99%) dan Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal (122,22%), melihat dari target tahun 2023/2024 yang telah tercapai di tahun 2022 perlu ditindaklanjuti dengan mengusulkan revisi target pada periode RENSTRA berikutnya.

4.2.3. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP. Perlu diperkuat komitmen untuk mengoptimalkan pencapaian target, (pelaksanaan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut) secara periodik. Hasil pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment bagi pegawai.

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Ambon
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hermanto, S.Si., Apt., MPPM
Jabatan : Kepala Balai POM di Ambon
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ambon, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71.58
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.45



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Ambon

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.55
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89.6

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.40
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	18
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82.75
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
23,670,173,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ambon, 16 Desember 2021

Pihak Pertama



Hermanto, S.Si., Apt., MPPM

2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BPOM di Ambon
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	86.55	368.588.980, 00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	177.252.900, 00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	465.534.560, 00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	274.469.980, 00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	71.153.000, 00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu.												80	118.283.500, 00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												89,5	30.715.000, 00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												71,58	118.283.500, 00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM												96	27.725.000, 00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	230.624.700, 00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	208.225.500, 00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	150.000.000, 00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	26.273.000, 00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	434.599.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.45	398.903.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	78.891.000,00
17.	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	95.40	246.070.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	5	10	20	30	40	50	56	62	70	85	95	56	831.537.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	5	10	20	25	35	40	50	60	75	85	95	18	911.079.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	6	17	28	35	44	55	64	75	85	92	98	100	581.548.600,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	8	18	30	40	50	60	68	75	85	90	96	100	288.936.440,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kesehatan di bidang Obat dan Makanan	5	8	12	15	20	25	30	40	50	60	70	78	792.434.000,00
23.	Indeks RB UPT												86	70.426.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												77.40	94.926.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												82.75	702.410.340,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												75	5.030.330.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			0.5			1			1.575			2.25	122.444.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT			14			37.5			65.5			93	10.451.240.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	20	30	40	50	56	62	70	85	95	6	367.269.000,00
Total													23.670.173.000,00	

Ambon, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Ambon

 Hermanto, S.Si., Apt., MPPM
Catatan :

Penetapan Target di bawah ini :

- Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
- Jumlah Desa Pangan Aman
- Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Naik

Mengikuti Ketentuan sebagai berikut :

- Target B01 s.d. B11 Menggambarkan Progres Kegiatan
- Target B12 Merupakan Target Indikator

3. Rencana Kinerja BPOM Ambon Tahun 2022



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

Jl. dr. Kayadoe SK. 20 Kudamati, Ambon 97116 Maluku Indonesia
Telp. (0911) 312655, 342742 ; Fax : 342742 ; WhatsApp : 0811-4800-222
Email : bpom_ambon@pom.go.id, bpom_ambon@yahoo.com, ulpk_ambon@gmail.com
Website : www.bpomambon.com ; Subsite : ambon.pom.go.id
Instagram : @balaipomambon ; Facebook : Balai POM di Ambon

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

NOMOR HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di

Ambon Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan (Balai Besar/Balai) Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 17 Desember 2021



KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON

HERMANTOS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON NOMOR HK.02.02.29A.29A5.12.21.334 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KINERJA (BALAI BESAR/BALAI) PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2022

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON
TAHUN 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86,55
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,6

	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		Indeks Pelayanan Publik	4,45
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56

		Jumlah desa pangan aman	18
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	78
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	86
		Nilai AKIP UPT	77,40
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	82,75
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	75
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 17 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON**



5. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM Ambon Tahun 2022

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target Tahunan	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian	
			Pembilang	Penyebut	Realisasi			
Stakeholder Perspective								
SS1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Ambon	KSS1	Persentase obat yang memenuhi syarat	86,55	850	1.049	81,89	94,01%	94,01%
	KSS2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	61,00	288	339	84,50	83,30%	93,30%
	KSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	267	381	72,40	85,25%	85,25%
	KSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,00	91	105	80,07	98,48%	98,48%
	KSS5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	88,00	78	85	91,76	85,56%	95,56%
Capaian SS1						93,48%	93,48%	
SS2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM Ambon	KSS6	Indeks kesadaran masyarakat (awake mind index) terhadap obat dan makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BPOM di Ambon	80,00	-	-	76,12	85,15%	95,15%
Capaian SS2						85,15%	95,15%	
SS3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	KSS7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,00	-	-	92,87	103,05%	103,05%
	KSS8	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,58	-	-	71,15	69,40%	98,40%
	KSS9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	96,00	-	-	92,41	95,25%	98,26%
Capaian SS3						99,72%	98,77%	
Capaian Perspective stakeholder						96,13%	96,13%	
Internal Process Perspective								
SS4 Meningkatnya efektivitas pemantauan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BPOM di Ambon	KSS10	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88,00	503	503	100,00	102,04%	102,04%
	KSS11	Persentase keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	66,00	-	-	74,88	112,98%	112,98%
	KSS12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang dilaksanakan tepat waktu	88,00	160	160	100,00	102,04%	102,04%
	KSS13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	72,00	73	93	76,49	109,02%	109,02%
	KSS14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00	762	1.042	76,01	100,01%	100,01%
	KSS15	Indeks Pelayanan Publik	4,48	-	-	4,38	98,43%	98,43%
	KSS16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembungkutan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	762	1.042	97,78	126,99%	126,99%
Capaian SS4						107,35%	107,35%	
SS5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	KSS17	Tingkat efektivitas KE Obat dan Makanan	85,40	-	-	83,76	88,26%	98,26%
	KSS18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	56,00	-	-	56,00	100,00%	100,00%
	KSS19	Jumlah desa pangan aman	18,00	-	-	16,00	100,00%	100,00%
	KSS20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6,00	-	-	6,00	100,00%	100,00%

Capaian SS5								99,57%	99,57%
SS5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan proses dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	KSS21	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	-	-	98,19	88,18%	98,18%
		KSS22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	-	-	100,00	100,00%	100,00%
Capaian SS6								99,10%	99,10%
SS7	Meningkatnya efektivitas penanganan keluhan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	KSS23	Persentase keberhasilan penindakan keluhan di bidang Obat dan Makanan	78,00	-	-	88,00	112,82%	112,82%
Capaian SS7								112,82%	112,82%
Capaian Internal Process Perspective								104,71%	104,71%
Learning & Growth Perspective									
SS9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BPOM di Ambon yang optimal	KSS24	Indeks RB BPOM di Ambon	86,00	-	-	90,72	108,49%	105,40%
		KSS25	Nilai AKP Balai POM di Ambon	77,40	-	-	76,62	89,36%	98,38%
Capaian SS8								102,43%	102,43%
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	KSS26	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	82,75	-	-	83,18	100,52%	100,52%
Capaian SS9								108,52%	108,52%
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BPOM di Ambon	KSS27	Persentase peningkatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar	75,00	-	-	76,62	105,23%	105,23%
		KSS28	Indeks pengelolaan data dan informasi BPOM di Ambon yang optimal	2,26	-	-	2,75	122,22%	122,22%
Capaian SS10								113,72%	113,72%
SS11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Ambon secara Akuntabel	KSS29	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Ambon	83,00	-	-	90,00	88,77%	98,77%
Capaian SS11								96,77%	96,77%
Capaian Learning & Growth Perspective								103,36%	103,36%
NPS TOTAL								101,40%	101,40%

6. Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja BPOM Ambon Tahun 2022

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA
TAHUN ANGGARAN 2022

OUTPUT	April 2022		Target APBNP 2022		Revisi 2022		Persentase Capaian		IE	IC	TE	KATEGORI	
	Volume	Page (Rp)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (Volume)	Input (Anggaran)	Output (%)	Input (%)					
AEA.001	Laporan kegiatan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan oleh BBPOM	14	140.754.000	14	140.754.000	14	140.995.850,00	100,00%	100,17%	1,00	1,00	0,00	Efisien
BAH.001	Kepuasan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diawaklakan oleh BBPOM	153	117.465.000	153	117.465.000	180	117.229.400,00	117,65%	98,89%	1,18	1,00	0,18	Efisien
BDC.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	69.571.000	21	69.571.000	21	69.261.050,00	100,00%	99,99%	1,00	1,00	0,00	
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	159.488.000	1	159.488.000	1	154.157.350,00	100,00%	96,66%	1,00	1,00	0,00	Efisien
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BBPOM	39	143.077.000	39	143.077.000	39	141.494.500,00	100,00%	98,89%	1,00	1,00	0,01	Efisien
CAB.002	Layanan Sarana Pelayanan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	75.000.000	1	75.000.000	1	74.145.350,00	100,00%	98,86%	1,00	1,00	0,01	Efisien
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1	118.424.000	1	118.424.000	1	117.699.570,00	100,00%	99,31%	1,00	1,00	0,01	
EBA.962	Layanan Umum	1	608.152.000	1	608.152.000	1	608.148.500,00	100,00%	100,00%	1,00	1,00	0,00	
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1.371.010.000	1	1.371.010.000	1	1.369.226.251,00	100,00%	99,87%	1,00	1,00	0,00	
QCD.U48	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM AMBON	3	387.634.000	3	387.634.000	3	385.643.933,00	100,00%	99,48%	1,00	1,00	0,01	Efisien
QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	1.600	190.600.000	1.600	190.600.000	1612	188.199.150,00	100,75%	98,74%	1,02	1,00	0,02	
QDE.001	Selidat dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	56	691.186.000	56	691.186.000	56	687.772.400,00	100,00%	99,51%	1,00	1,00	0,00	Efisien
QDE.002	Desa Pangan Aman	18	735.042.000	18	735.042.000	18	731.419.650,00	100,00%	99,51%	1,00	1,00	0,00	Efisien
QDE.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	6	95.060.000	6	95.060.000	6	93.186.000,00	100,00%	98,03%	1,02	1,00	0,02	Efisien
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM	435	466.750.000	435	466.750.000	444	464.752.270,00	102,07%	99,57%	1,02	1,00	0,02	Efisien
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM	1.440	584.886.000	1.440	584.886.000	1.440	584.691.390,00	100,00%	99,96%	1,00	1,00	0,00	Efisien
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BBPOM	83	71.153.000	85	71.153.000	85	70.818.700,00	100,00%	99,59%	1,00	1,00	0,00	Efisien
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksakan BBPOM	93	77.544.000	93	77.544.000	93	77.103.800,00	100,00%	99,43%	1,00	1,00	0,01	Efisien

QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM	1.029	1.446.388.000	1.029	1.446.388.000	1.042	1.436.046.250,00	101,20%	99,28%	1,02	1,00	0,02	Efisien
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	3.390.185.000	1	3.390.185.000	1	3.390.133.500	100,00%	100,00%	1,00	1,00	0,00	
EAA.004	Layanan Perkantoran UPT	1	11.231.669.000	1	11.231.669.000	1	11.211.547.515,00	100,00%	99,82%	1,00	1,00	0,00	Efisien
TOTAL					22.551.818.000		22.493.374.319	99,83%	99,79%	1,01	1,00	0,01	

7. Pengukuran Tingkat Efisiensi Anggaran BPOM Ambon Tahun 2022

Kategori Anggaran	Kode Anggaran	Uraian Anggaran (Kategori)	Dipul					Egip			R	TR	Capaian TR
			Target	Realisasi	Progres	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
Struktur Organisasi	81001	Penyediaan dan penggantian peralatan	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81002	Penyediaan dan penggantian kendaraan	91,00	91,00	100,00%	91,00	91,00	100,00%	100,00%	91,00	91,00	100,00%	100,00%
	81003	Penyediaan dan penggantian gedung	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	100,00%	20,00	20,00	100,00%	100,00%
	81004	Penyediaan dan penggantian peralatan kantor	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81005	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81006	Penyediaan dan penggantian peralatan transportasi	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81007	Penyediaan dan penggantian peralatan kesehatan	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81008	Penyediaan dan penggantian peralatan keamanan	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81009	Penyediaan dan penggantian peralatan pemeliharaan	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	81010	Penyediaan dan penggantian peralatan lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
Informasi dan Komunikasi	82001	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82002	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82003	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82004	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82005	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82006	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82007	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82008	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82009	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	82010	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
Kelembagaan dan Organisasi	83001	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83002	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83003	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83004	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83005	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83006	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83007	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83008	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83009	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%
	83010	Penyediaan dan penggantian peralatan komunikasi lain-lain	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%	50,00	50,00	100,00%	100,00%

8. Perbandingan Kinerja BPOM Ambon dengan BPOM Jambi dan Target Nasional

SASARAN KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	Nasional Target	Jambi			Ambon				
				Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	% capaian penyesuaian	
Nilai Kinerja Organisasi						102,80	102,68			101,39%	101,39%
Perspektif Stakeholder						103,04	103,04			96,13%	96,13%
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang						103,90	103,90			93,48%	93,48%
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,25	94,2	97,84	103,86	103,86	86,55	81,89	94,62%	94,62%
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	78	87,73	112,47	112,47	91	84,96	93,36%	93,36%
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	88,5	91	94,33	103,66	103,66	86	73,4	85,35%	85,35%
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77,5	88	90,2	102,50	102,50	88	86,67	98,49%	98,49%
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	85	82,46	97,01	97,01	96	91,76	95,58%	95,58%
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat						99,44	99,44			95,15%	95,15%
	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	80	78	77,56	99,44	99,44	80,00	76,12	95,15%	95,15%
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan						105,79	105,79			99,77%	99,77%
	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89	88,9	93,8	105,51	105,51	89,60	92,87	103,65%	103,65%
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	71,92	76,54	106,42	106,42	71,58	71,15	99,40%	99,40%
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89,45	89	93,83	105,43	105,43	96,00	92,41	96,26%	96,26%

Perspektif Internal Proses				103,83	103,47			104,71%	104,71%	
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana				109,67	108,22			107,35%	107,35%	
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	91	81	85,01	104,95	104,95	98	100	102,04%	102,04%
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65	54	62,14	115,07	115,07	66	74,55	112,95%	112,95%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	91	88	100	113,64	113,64	98	100	102,04%	102,04%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	55	63,27	115,04	115,04	72	78,49	109,01%	109,01%
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	71	68,63	96,66	96,66	76	76,01	100,01%	100,01%
15	Indeks Pelayanan Publik	4,28	4,01	4,17	103,99	103,99	4,45	4,38	98,43%	98,43%
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	77	91,11	118,32	118,32	77	97,78	126,99%	126,99%
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi,				99,75	99,75			99,57%	99,57%	
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93	95,4	94,45	99,00	99,00	95,40	93,76	98,28%	98,28%
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	2010	56	56	100,00	100,00	56,00	56	100,00%	100,00%
19	Jumlah desa pangan aman	648	18	18	100,00	100,00	18,00	18	100,00%	100,00%
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	255	6	6	100,00	100,00	6,00	6	100,00%	100,00%

SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan							100,00	100,00			99,10%	99,10%
	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	100	98,19		98,19%	98,19%
	22	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	100,00	100,00	100	100		100,00%	100,00%
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan							105,90	105,90			112,82%	112,82%
	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	73	90	95,31	105,90	105,90	78	88		112,82%	112,82%
Perspektif Learning and Growth							101,51	101,51			103,32%	103,32%
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang							102,61	102,61			102,43%	102,43%
	24	Indeks RB	85	78,9	84,12	106,62	106,62	86,00	90,72		105,49%	105,49%
	25	Nilai AKIP	82	79,7	78,58	98,59	98,59	77,40	76,92		99,38%	99,38%
SK.9 Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal							99,62	99,62			100,52%	100,52%
	26	Indeks Profesionalitas ASN	84	85,25	84,93	99,62	99,62	82,75	83,18		100,52%	100,52%
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data							104,94	104,94			113,72%	113,72%
	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	81	77	80,8	104,94	104,94	75	78,92		105,23%	105,23%
	28	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2,25	2,25	2,6	94,67	94,67	2,25	2,75		122,22%	122,22%
SK.11 Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel							98,89	98,89			96,60%	96,60%
	29	Nilai Kinerja Anggaran	93,5	91,3	90,29	98,89	98,89	93	89,84		96,60%	96,60%

9. Perbandingan Kinerja BPOM Ambon dengan BPOM Gorontalo dan BPOM Batam

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja Utama	Ambon				Gorontalo				Batam			
			Target	Realisasi	% Capaian	% capaian penyesuaian	Target	Realisasi	% Capaian	% capaian penyesuaian	Target	Realisasi	% Capaian	% capaian penyesuaian
Nilai Kinerja Organisasi					101,39%	101,39%			105,66%	105,66%			102,03	102,03
Perspektif Stakeholder					96,13%	96,13%			104,84%	104,84%			100,29	100,29
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang					93,48%	93,48%			103,33%	103,33%			92,71	92,71
	1	Persentase Obat yang memenuhi	86,55	81,89	94,62%	94,62%	87,00	88,69	101,94%	101,94%	80,00	74,61	93,26	93,26
	2	Persentase Makanan yang	91	84,96	93,36%	93,36%	89,50	89,77	100,30%	100,30%	82,00	80,56	98,24	98,24
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	86	73,4	85,35%	85,35%	88,00	83,74	95,16%	95,16%	80	72,73	90,91	90,91
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	88	86,67	98,49%	98,49%	82,20	89,13	108,43%	108,43%	85	75,44	88,75	88,75
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	96	91,76	95,58%	95,58%	89,00	98,61	110,80%	110,80%	89	82,22	92,38	92,38
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan					95,15%	95,15%			98,96%	98,96%			105,52	105,52
	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	76,12	95,15%	95,15%	84,00	83,13	98,96%	98,96%	82	86,53	105,52	105,52
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan					99,77%	99,77%			112,23%	112,23%			102,63	102,63
	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	89,60	92,87	103,65%	103,65%	86,70	97,8	112,80%	112,80%	89,10	94,10	105,61	105,61
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	71,58	71,15	99,40%	99,40%	86,35	81,73	123,18%	123,18%	71,85	74,97	104,34	104,34
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	96,00	92,41	96,26%	96,26%	93,00	93,66	100,71%	100,71%	89	87,16	97,93	97,93
Perspektif Internal Proses					104,71%	104,71%			109,87%	109,87%			104,25	104,25
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik					107,35%	107,35%			103,67%	103,67%			104,33	104,33
	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan	98	100	102,04%	102,04%	100,00	100	100,00%	100,00%	86	98,58	114,63	114,63
	11	Persentase	66	74,55	112,95%	112,95%	80,00	91	113,75%	113,75%	62	65,18	105,13	105,13
	12	Persentase keputusan penilaian	98	100	102,04%	102,04%	99,00	99,73	100,74%	100,74%	95	96,66	101,75	101,75

13	Persentase sarana produksi Obat	72	78.49	109.01%	109.01%	60,00	60,42	100,70%	100,70%	60	63,75	106,25	106,25
14	Persentase sarana distribusi Obat	76	76.01	100.01%	100.01%	66,00	66,14	100,21%	100,21%	81	68,80	84,94	84,94
15	Indeks Pelayanan Publik	4.45	4.38	98.43%	98.43%	4,26	3,98	93,43%	93,43%	4,30	4,30	100,00	100,00
16	Persentase UMKM yang	77	97.78	126.99%	126.99%	77,00	90	116,88%		68	80,00	117,65	117,65
SK5 Meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan													
17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan	95.40	93.76	98.28%	98.28%	98,00	95	96,94%	96,94%	92	93,22	101,55	101,55
18	Jumlah sekolah dengan Pangan	56.00	56	100.00%	100.00%	52,00	52	100,00%	100,00%	52	52	100,00	100,00
19	Jumlah desa pangan aman	18.00	18	100.00%	100.00%	18,00	18	100,00%	100,00%	18	18	100,00	100,00
20	Jumlah pasar pangan aman	6.00	6	100.00%	100.00%	3,00	3	100,00%	100,00%	3	3	100,00	100,00
SK6 Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan													
21	Persentase sampel Obat yang	100	98.19	98.19%	98.19%	100,00	100	100,00%	100,00%	100	98,82	98,82	98,82
22	Persentase sampel Makanan yang	100	100	100.00%	100.00%	100,00	100	100,00%	100,00%	100	98,37	98,37	98,37
SK7 Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan													
23	Persentase keberhasilan	78	88	112.82%	112.82%	82,00	112	136,59%	136,59%	73	83,00	113,70	113,70
Perspektif Learning and Growth													
SK8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang													
24	Indeks RB	86.00	90.72	105.49%	105.49%	80,70	92,81	115,01%	115,01%	82,80	89,09	107,60	107,60
25	Nilai AKIP	77.40	76.92	99.38%	99.38%	81,80	78,61	96,10%	96,10%	79,10	79,86	100,96	100,96
SK9 Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal													
26	Indeks Profesionalitas ASN	82.75	83.18	100.52%	100.52%	84,00	80,83	96,23%	96,23%	85,50	85,48	99,98	99,98
SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan													
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan	75	78.92	105.23%	105.23%	81,00	81,5	100,62%	100,62%	80,00	81,20	101,50	101,50
28	Indeks pengelolaan data dan	2.25	2.75	122.22%	122.22%	2,25	2,55	113,33%	113,33%	2,25	2,40	106,67	106,67
SK11 Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel													
29	Nilai Kinerja Anggaran	93	89.84	96.60%	96.60%	90,80	90,84	100,26%	100,26%	91,30	89,37	97,89	97,89

10. Ringkasan Perbandingan NPS Balai Sejenis

SASARAN KEGIATAN	CAPAIAN NPS			
	JAMBI	AMBON	GORONT ALO	BATAM
NPS Stakeholder Perspective	103.04	96.13%	104.84%	100.29
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	103.90	93.48%	103.33%	92.71
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	99.44	95.15%	98.96%	105.52
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	105.79	99.77%	112.23%	102.63
NPS Internal Process	103.83	104.71 %	109.87%	104.25
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	109.67	107.35 %	103.67%	104.33
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99.75	99.57%	99.23%	100.39

SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	100.00	99.10%	100.00%	98.60
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	105.90	112.82 %	136.59%	113.70
NPS Perspektif Learning & Growth	100.23	103.32 %	102.13%	101.56
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	102.61	102.43 %	105.55%	104.28
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	99.62	100.52 %	95.71%	99.98
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99.80	113.72 %	106.98%	104.08
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	98.89	96.60%	100.26%	97.89
NPSS	102.37	101.39 %	105.61%	102.03

11. Nilai Kinerja Anggaran SATKER 2022

NILAI KINERJA ANGGARAN SATKER 2022 (BB/BPOM)

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA	No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	88,36	97,07	91,84	18	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	85,2	96,85	89,86
2	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MANADO	86,64	97,67	91,05	19	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	85,69	96,08	89,85
3	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI	86,08	98,26	90,95	20	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	86,64	94,52	89,79
4	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SURABAYA	86,53	97,5	90,92	21	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALANGKARAYA	86,58	94,37	89,70
5	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	86,55	97,28	90,84	22	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	85,93	95,33	89,69
6	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	86,89	96,76	90,84	23	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN YOGYAKARTA	85,84	95,36	89,65
7	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	86,72	96,75	90,73	24	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	85,47	95,83	89,61
8	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEMARANG	86,59	96,88	90,71	25	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	86,55	94,15	89,59
9	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALEMBANG	86,42	96,81	90,58	26	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	86,73	93,75	89,54
10	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	86,73	96,28	90,55	27	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	86,75	93,69	89,53
11	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAMBI	87,21	94,9	90,29	28	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAMUJU	86,29	94,21	89,46
12	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	86,46	95,98	90,27	29	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	86,34	93,95	89,38
13	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	86,4	96,02	90,25	30	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	85,7	93,93	88,99
14	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	85,72	96,97	90,22	31	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDA ACEH	85,31	94,41	88,95
15	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PADANG	87,42	94,37	90,20	32	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PONTIANAK	86,06	93,2	88,92
16	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MEDAN	86,07	96,22	90,13	33	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SAMARINDA	85,67	93,55	88,82
17	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU	86,13	95,97	90,07	34	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN	87,04	90,03	88,24

12. Capaian Nilai SKM

CAPAIAN NILAI SKM BALAI BESAR/BALAI POM (2)

No	Unit Pelayanan	Nilai SKM 2021	Nilai SKM 2022	Naik/ Turun	Target 2022	Capaian Target (%)
18	Balai Besar POM di Padang	93,13	91,65	-1,48	90,50	101,27
19	Balai Besar POM di Pontianak	90,70	91,39	0,69	90,50	100,98
20	Balai POM di Sofifi	88,73	92,26	3,53	91,50	100,83
21	Balai POM di Gorontalo	94,52	93,66	-0,86	93,00	100,71
22	Balai POM di Manokwari	92,28	99,33	7,05	99,00	100,33
23	Balai POM di Bengkulu	90,53	95,23	4,70	95,00	100,24
24	Balai POM di Palu	90,98	92,09	1,11	92,00	100,10
25	Balai Besar POM di Denpasar	89,56	89,77	0,21	90,10	99,63
26	Balai Besar POM di Samarinda	86,90	87,65	0,75	88,00	99,60
27	Balai POM di Kupang	89,99	89,06	-0,93	90,00	98,96
28	Balai Besar POM di Palembang	92,21	90,93	-1,28	92,00	98,84
29	Balai Besar POM di Makassar	92,04	91,90	-0,14	93,00	98,82
30	Balai Besar POM di Jayapura	91,76	89,40	-2,36	90,50	98,78
31	Balai POM di Batam	88,23	87,16	-1,07	89,00	97,93
32	Balai POM di Ambon	89,48	92,41	2,93	96,00	96,26
33	Balai Besar POM di Banda Aceh	94,00	91,93	-2,07	96,00	95,76
34	Balai POM di Tarakan	85,26	80,86	-4,40	88,00	91,89

27

13. Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Tahun 2022

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	92,3	93,5	101,2%	7	119
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	92,3	98,6	106,9%	3	102
3	Balai Besar POM di Bandung	92,3	94,4	102,3%	7	117
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	92,3	98,1	106,3%	6	122
5	Balai Besar POM di Denpasar	91,8	94,1	102,5%	23	214
6	Balai Besar POM di Jakarta	87,7	95,1	108,4%	57	1236
7	Balai Besar POM di Jayapura	92,3	94,5	102,4%	8	127
8	Balai Besar POM di Makassar	84,6	90,6	107,1%	9	43
9	Balai Besar POM di Manado	91,0	97,8	107,4%	6	97
10	Balai Besar POM di Mataram	88,7	90,3	101,8%	7	56
11	Balai Besar POM di Medan	92,3	97,2	105,4%	10	119
12	Balai Besar POM di Padang	83,8	94,7	113,0%	6	130
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	89,8	96,3	107,2%	6	182
14	Balai Besar POM di Palembang	89,9	97,0	107,9%	9	183
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	89,3	97,3	108,9%	12	258
16	Balai Besar POM di Pontianak	92,3	90,8	98,4%	7	148
17	Balai Besar POM di Samarinda	85,7	95,8	111,8%	9	226
18	Balai Besar POM di Semarang	88,2	94,5	107,1%	36	773
19	Balai Besar POM di Serang	85,8	90,2	105,1%	10	690
20	Balai Besar POM di Surabaya	84,7	94,2	111,2%	24	640
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	87,7	95,9	109,4%	10	135
22	Balai POM di Ambon	89,6	92,9	103,6%	9	106
23	Balai POM di Batam	89,1	94,1	105,6%	6	208
24	Balai POM di Bengkulu	92,3	95,9	103,9%	4	97
25	Balai POM di Gorontalo	86,7	97,8	112,8%	8	94
26	Balai POM di Jambi	88,9	93,8	105,5%	3	106
27	Balai POM di Kendari	81,3	93,1	114,6%	8	88
28	Balai POM di Kupang	91,3	91,3	99,9%	6	65
29	Balai POM di Mamuju	92,3	96,1	104,1%	7	86
30	Balai POM di Manokwari	88,3	92,3	104,5%	10	179
31	Balai POM di Palu	91,1	95,0	104,2%	5	81
32	Balai POM di Pangkalpinang	92,3	91,2	98,8%	11	102
33	Balai POM di Sofifi	92,3	97,0	105,1%	6	71
34	Balai POM di Tarakan	89,4	93,3	104,4%	8	70

14. Indeks Pelayanan Publik UPP UPT BPOM

No	Unit Pelayanan Publik	IPP Tahun 2021	Target IPP Tahun 2022	IPP 2022	Keterangan
18	Balai Besar POM di Mataram	4,42	4,51	4,48	Sangat Baik
19	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4,50	4,45	4,46	Sangat Baik
20	Balai POM di Palu	4,19	4,40	4,39	Sangat Baik
21	Balai POM di Ambon	4,46	4,45	4,38	Sangat Baik
22	Balai Besar POM di Samarinda	4,44	4,45	4,33	Sangat Baik
23	Balai POM di Batam	4,12	4,30	4,30	Sangat Baik
24	Balai Besar POM di Pontianak	4,25	4,20	4,27	Sangat Baik
25	Balai Besar POM di Jayapura	4,33	4,40	4,24	Sangat Baik
26	Balai POM di Jambi	4,32	4,01	4,17	Sangat Baik
27	Balai Besar POM di Palembang	4,27	4,20	4,14	Sangat Baik
28	Balai POM di Sofifi	4,22	4,20	4,12	Sangat Baik
29	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,45	4,40	4,11	Sangat Baik
30	Balai Besar POM di Padang	4,42	4,45	4,10	Sangat Baik
31	Balai Besar POM di Manado	4,38	4,30	4,10	Sangat Baik
32	Balai POM di Kupang	4,13	4,30	3,98	Baik
33	Balai POM di Gorontalo	4,31	4,30	3,98	Baik
34	Balai POM di Tarakan	0	3,01	3,94	Baik

15. Target dan Capaian Intervensi Kab/Kota dan Desa Tahun 2022

No	Nama Balai	Target Kab/Kota 2022	Capaian	Target Desa 2022	Capaian		
					Stunting	Non Stunting	Total
1	BBPOM di Aceh	4	4	6	1	5	6
2	BBPOM di Denpasar	1	1	6	1	5	6
3	BBPOM di Serang	1	1	6	2	4	6
4	BPOM di Bengkulu	2	2	6	1	5	6
5	BBPOM di Yogyakarta	1	1	7	4	3	7
6	BBPOM di Jakarta	1	1	7	2	5	7
7	BPOM di Gorontalo	1	1	6	1	5	6
8	BPOM di Jambi	2	2	6	4	2	6
9	BBPOM di Bandung	4	4	9	2	7	9
10	BBPOM di Semarang	5	5	9	1	8	9
11	BBPOM di Surabaya	6	6	9	1	8	9
12	BBPOM di Pontianak	2	2	7	1	6	7
13	BBPOM di Banjarmasin	2	2	7	2	5	7
14	BBPOM di Palangkaraya	2	2	6	1	5	6
15	BPOM di Samarinda	2	2	6	3	3	6
16	BPOM di Kota Tarakan	1	1	1	0	1	1
17	BPOM di Pangkalpinang	1	1	6	2	4	6
18	BPOM di Batam	1	1	6	3	3	6
19	BBPOM di Bandar Lampung	2	2	9	1	8	9
20	BPOM di Ambon	2	2	6	4	2	6
21	BPOM di Sofifi	2	2	6	1	5	6
22	BBPOM di Mataram	2	2	6	1	5	6
23	BPOM di Kupang	3	3	7	1	6	7
24	BBPOM di Jayapura	3	3	5	1	4	5
25	BPOM di Manokwari	2	2	4	1	3	4
26	BBPOM di Pekanbaru	2	2	6	2	4	6
27	BPOM di Mamuju	1	1	6	1	5	6
28	BBPOM di Makassar	4	4	7	1	6	7
29	BPOM di Palu	2	2	7	1	6	7
30	BPOM di Kendari	3	3	7	1	6	7
31	BBPOM di Manado	2	2	7	1	6	7
32	BBPOM di Padang	3	3	9	1	8	9
33	BBPOM di Palembang	3	3	7	3	4	7
34	BBPOM di Medan	5	5	6	1	5	6
	Total	80	80	221	54	167	221

16. Hasil Penilaian Monitoring dan Keberlanjutan Desa Pangan Aman 2022

No	Nama UPT BPOM	Desa Pangan Aman (Total nilai 15)
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	14,5
2	Balai POM di Ambon	14,25
3	Balai Besar POM di Denpasar	14,25
4	Balai POM di Kendari	13,75
5	Balai Besar POM di Jakarta	13,75
6	Balai Besar POM di Pontianak	13,75
7	Balai POM di Pangkal Pinang	13,75
8	Balai POM di Mamuju	13,75
9	Balai Besar POM di Serang	13,25
10	Balai POM di Jambi	13,25
11	Balai Besar POM di Surabaya	13,25
12	Balai POM di Bengkulu	12,75
13	Balai POM di Kupang	12,75
14	Balai POM di Manokwari	12,75
15	Balai POM di Palu	12,75
16	Balai Besar POM di Makassar	12,75
17	Balai Besar POM di Manado	12,75
18	Balai POM di Kota Tarakan	12,75
19	Balai Besar POM di Semarang	12,25
20	Balai POM di Gorontalo	12,25
21	Balai Besar POM di Pekanbaru	12,25
22	Balai Besar POM di Jayapura	11,75
23	Balai Besar POM di Samarinda	11,75
24	Balai POM di Batam	11,75
25	Balai Besar POM di Palembang	11,25
26	Balai POM di Sofifi	11,25
27	Balai Besar POM di Banjarmasin	11
28	Balai POM di Palangka Raya	10,75
29	Balai Besar POM di Banda Aceh	10,75
30	Balai Besar POM di Bandar Lampung	10,25
31	Balai Besar POM di Bandung	9,5
32	Balai Besar POM di Padang	9,5
33	Balai Besar POM di Mataram	9,25
34	Balai Besar POM di Medan	8,75

17. Hasil Penilaian Pemenuhan Peralatan Pengujian sesuai Standar GLP 2022

No.	Balai Besar/Balai POM	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Tahun 2021	Tahun 2022	Peringkatan
23	Palu	76,5	77,0	70,0	74,5	82,6	8,1
24	Jayapura	70,8	77,8	73,8	74,1	80,2	6,1
25	Kendari	73,9	79,4	68,4	73,9	80,4	6,5
26	Banjarmasin	70,2	82,0	68,2	73,4	82,2	8,8
27	Bandar Lampung	75,9	81,1	63,3	73,4	81,0	7,6
28	Gorontalo	70,2	76,3	66,8	71,1	81,5	10,4
29	Ambon	68,3	81,8	62,8	71,0	80,6	9,6
30	Manokwari	68,0	76,1	59,9	68,0	78,6	10,7
31	Jambi	66,6	77,2	57,3	67,0	80,8	13,8
32	Mamuju	50,4	76,0	29,4	51,9	55,7	3,8
33	Sofifi	42,9	47,7	26,2	38,9	36,3	-2,6
34	Tarakan	31,73	58,74	19,34		36,6	

18. Perbandingan IP ASN Tahun 2021 dan Tahun 2022

No.	Nama Unit Kerja	Tahun 2021		Tahun 2022	
		IP ASN	Jumlah Orang	IP ASN	Jumlah Orang
14	Balai Besar POM di Yogyakarta	84,81	103	86,63	98
15	Balai Besar POM di Surabaya	83,11	136	85,79	130
16	Balai Besar POM di Serang	85,3	82	84,31	75
17	Balai Besar POM di Denpasar	81,05	94	84,4	91
18	Balai Besar POM di Mataram	84,37	70	85,08	66
19	Balai POM di Kupang	85	57	81,56	55
20	Balai Besar POM di Pontianak	84,81	73	84,96	68
21	Balai Besar POM di Palangkaraya	84,64	56	84,67	52
22	Balai Besar POM di Banjarmasin	83,09	68	84,96	57
23	Balai Besar POM di Samarinda	84,74	74	85,17	60
24	Balai Besar POM di Manado	85,14	71	85,54	67
25	Balai POM di Palu	85,3	66	84	56
26	Balai Besar POM di Makassar	85,44	116	81,14	110
27	Balai POM di Kendari	84,64	69	84,6	65
28	Balai POM di Gorontalo	81,3	46	80,83	41
29	Balai POM di Ambon	74,34	57	83,18	54
30	Balai Besar POM di Jayapura	84,93	72	85,4	67
31	Balai POM di Manokwari	84,58	42	84,38	39
32	Balai POM di Sofifi	81,69	34	82,42	33
33	Balai POM di Mamuju	82,36	37	84,32	33
34	Balai POM di Tarakan	86,05	19	85,04	23

19. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Email

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
total_akun_individu	57	57	67	67	67	67	67	66	66	66	65	65
total_akun_unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
total_individu_login	24	25	39	30	34	28	31	55	55	51	45	35
total_individu_aktif	24	25	39	30	34	28	31	55	55	51	45	35
total_unitbalai_aktif	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aspek Login (%)	12,63	13,16	17,46	13,43	15,22	12,54	13,88	25	25	23,18	20,77	16,15
Aspek Pemanfaatan (b) (%)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Aspek Pemanfaatan (c) (%)	12,63	13,16	17,46	13,43	15,22	12,54	13,88	25	25	23,18	20,77	16,15
Perhitungan (%)	65,26	66,32	74,92	66,86	70,44	65,08	67,76	90	90	86,36	81,54	72,3
Perhitungan per TW	65,26	65,79	68,83	68,34	68,76	68,15	68,09	70,83	72,96	74,3	74,96	74,74
Nilai Indeks	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - BOC

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Aktifitas												
Login BOC	10	20	40	40	40	20	40	30	40	40	30	40
Akses BCC	15	45	60	60	60	60	60	30	60	60	60	60
Total	25	65	100	100	100	80	100	60	100	100	90	100
Perhitungan per TW	25	45	63,33	72,5	78	78,33	81,43	78,75	81,11	83	83,64	85
Nilai Indeks Per TW	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Aktifitas												
Jumlah Akses	222	334	378	274	404	288	169	276	201	246	99	146
Perhitungan	222	278	311,33	302	322,4	316,67	295,57	293,13	282,89	279,2	262,82	253,08
Nilai Indeks	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Berita Aktual

	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Upload	16	16	48	44	20	16	11	20	9	15	16	17
Jumlah Viewer	13076	2126	6267	3620	2058	798	385	789	471	880	211	462
Perhitungan Rata2 Berita	16	16	26,67	31	28,8	26,67	24,43	23,88	22,22	21,5	21	20,67
Perhitungan Rata2 Pengunjung	817,25	475,06	268,36	202,33	188,52	174,66	165,67	152,46	147,95	141,72	132,82	125,58
Indeks Per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SPIMKER

Aktifitas	TW I			TW II			TW III			TW IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Jumlah Entry	1			2			1	2	1		1	
Jumlah Verifikasi	1	0	0	2			1	2	1		1	0
Perhitungan	100	85	85	100	85	85	100	100	100	85	100	85
Perhitungan per TW	100	92,5	90	92,5	91	90	91,43	92,5	93,33	92,5	93,18	92,5
Nilai Indeks per TW	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Komposit	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT

Penilaian	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
% Sarana	122,28	122,28	122,28	93,58	116,79	102,32	95,95	93,58	103,92	114,76	113,31	118,45
% Sampling	62,72	62,72	62,72	70,63	69,01	97,14	116,62	116,48	115,79	115,56	108,13	100,56
% Pengujian												
Rata-Rata	92,5	92,5	92,5	82,11	92,9	99,73	106,29	105,03	109,86	115,16	110,72	109,51
Indeks per Bulan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Komposit SIPT	2,4	2,4	2,4	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

Indeks	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Indeks Pemanfaatan	1,75	1,75	2	2,25	2,25	2,25	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Indeks Pemutakhiran	3	3	3	2,2	3	3	3	3	3	3	3	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,38	2,38	2,5	2,23	2,63	2,63	2,63	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75